

MELAMPAUI DEMOKRASI

MELAMPAUI DEMOKRASI

Internasionalisasi Politik Ulama dan Politik Bervisi Kepentingan Nasional

Refleksi Satu Windu Partai Kebangkitan Bangsa

A. Muhaimin Iskandar

KLIK.R Jogjakarta

Melampaui Demokrasi

Internasionalisasi Politik Ulama dan
Politik Bervisi Kepentingan Nasional:
Refleksi Satu Windu Partai Kebangkitan Bangsa

© KLIK.R, 2006

Editor : Umaruddin Masdar

Layout : Abu Abdiella

Cover : Imambang Ali

Penyelaras akhir : Jazilul Fawaid

Diterbitkan atas kerjasama Dewan Pengurus Pusat Partai
Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dan Yayasan Kajian dan
Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK.R)

KLIK.R : Jl. Imogiri Barat Km. 6, No. 26

Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul Jogjakarta

e-mail: klik_r@yahoo.com

Cetakan I, Juni 2006

ISBN: 979-9466-18-0

DAFTAR ISI

Daftar Isi ~ v

Pengantar Penulis ~ viii

- I **PKB di Tengah Kompleksitas Persoalan Bangsa dan Krisis Sistem Dunia ~1**
 - Teologi Aksi ~1
 - Tiga Tantangan Kita ~ 3
- II **Ideologi, Demokrasi dan Kepentingan Nasional ~ 13**
 - Radikalisasi dan Disorientasi Masyarakat ~13
 - Empat Agenda PKB ~16
 - Partai Advokasi ~24
- III. **Partai Advokasi dan Pengembangan PKB ~ 27**
 - Kerangka Dasar Partai Advokasi ~ 27
 - Filosofi Advokasi oleh PKB ~ 31
 - Advokasi sebagai Terapan Spiritualitas Politik PKB ~ 35
 - Modal Dasar Pengembangan ~ 39
 - Kaderisasi Partai ~ 44
- IV. **Fundamental Politik Partai Kerja Modern: PKB Lima Tahun ke Depan ~ 49**
 - Pengantar ~ 49
 - Tantangan Eksternal ~ 50
 - Tantangan Internal ~ 54
 - Isu-isu Strategis ke Depan ~ 61

- Strategi Politik Memenangkan Pertarungan: dari “Politik Kerumunan” ke “Politik Organisasional” ~ 63
- V. Sentralisme Demokratis, “Mediakrasi”, dan Kepemimpinan Politik Visioner ~ 71**
 - Sentralisme Demokratis ~ 71
 - Jebakan "Mediakrasi" ~ 75
 - Kepentingan Nasional ~ 79
- VI. PKB dan Politik Pemuda ~ 83**
 - Idealisme Pemuda dan Perubahan Politik ~ 83
 - Pemuda sebagai Aset Bangsa ~ 85
 - Pemuda dalam Struktur PKB ~ 87
 - Inti Kepemimpinan Kita ~ 91
- VII. Gus Dur dan Internasionalisasi Peran Ulama ~ 95**
 - Garansi Demokrasi dan Pluralisme ~ 95
 - Pandangan Hidup Pesantren ~ 98
 - Internasionalisasi Peran Ulama ~ 103
- VIII. PKB dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam ~ 107**
 - Pemecah Kebuntuan Dialog Islam-Negara ~ 107
 - PKB, Pewaris Tradisi Besar Islam ~ 108
 - Visi Dasar Politik-Keagamaan ~ 110
 - Politik Strategis Ulama ~ 115
- IX. Politik Berbasis Tradisi: Strategi PKB Menjemput Gelombang Pasang Globalisasi ~ 119**
 - Akumulasi Modal atau Pengetahuan? ~ 119
 - Walisongo dan Islam Indonesia ~ 124
 - Ulama, Moralisasi Politik dan Transformasi Kultural ~ 127
 - Konsolidasi Pemahaman, ‘Image’ dan Massa ~ 129
 - Politik Kebudayaan PKB dan Gerakan Islam ~ 131

Daftar Pustaka ~ 133

Index ~

Sumber Tulisan ~ 137

Tentang Penulis ~139

PENGANTAR PENULIS

Ketika dipercaya dan dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) 2005-2010, ada beberapa hal penting yang ingin saya lakukan bersama seluruh komponen PKB sebagai manifestasi dari apa yang dinamakan sebagai pengabdian kepada partai, masyarakat dan bangsa. Beberapa hal tersebut hari ini mungkin seperti sebuah mimpi, tetapi saya yakin dengan niat yang benar, kerja keras dan dukungan berbagai pihak, dalam waktu yang tidak terlalu lama agenda tersebut akan terealisasi, sekurang-kurangnya menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan baru yang lebih baik. Istilahnya, *this look like utopis today, but tomorrow it could be reality* (meminjam istilah Wim Dierckxsens, dalam “The End of Neoliberalism, Unsustainable Capitalism and the Need for a New Utopia”, Jurnal *Concilium*, No. 5, Tahun 2004).

Pertama, saya bercita-cita menjadikan PKB sebagai partai politik yang penggerak utamanya adalah gagasan atau

pengetahuan yang terkonsolidasi dengan baik, bukan uang atau bentuk-bentuk pragmatisme yang lain. Karena itu, PKB harus mempunyai mesin pengetahuan yang baik, di samping mesin administrasi dan mesin-mesin politik yang lain.

Keinginan tersebut tentu tidak mudah diwujudkan terutama di tengah kehidupan politik yang cenderung pragmatis dan kosong ideologi, di mana gerakan politik yang ada banyak dikendalikan oleh uang dan kekuasaan (aliansi pemilik modal dan penguasa). Tapi saya percaya, belajar dari pengalaman negara-negara yang berhasil mencapai kemakmuran dalam pembangunan ekonomi yang stabil, gerakan politik yang dibangun di atas bangunan pengetahuan yang utuh akan jauh lebih membawa manfaat luas dan memiliki unsur keabadian.

Kedua, PKB bisa merumuskan dengan baik politik kiai di zaman ini, sehingga kharisma dan kemandiriannya lebih terjaga dan perannya lebih maksimal baik dalam politik nasional maupun internasional. Diperlukan kontekstualisasi dan sekaligus internasionalisasi peran ulama yang bisa mencegah mereka terus terjebak dan terkecoh dalam politik praktis yang bersifat jangka pendek.

Ketiga, PKB menjadi partai yang digerakkan oleh kaum muda yang loyal kepada garis komando dan ideologi partai serta ditunjang oleh etos kerja keras. Politik kaum muda yang enerjik dan penuh dengan spirit perubahan perlu dipayungi oleh politik ulama yang visioner dan kharismanya yang memberi motivasi

spiritual secara total bagi pelaku gerakan politik PKB secara keseluruhan. Dari situlah disiplin partai akan tumbuh dan tradisi politik baru akan berkembang.

Oleh karenanya, PKB perlu melakukan konsolidasi pengetahuan, penataan gerakan dan kontekstualisasi nilai-nilai yang selama ini menjadi sumber inspirasi gerakan politik masyarakat santri dan Nusantara pada umumnya. Ketiga hal tersebut perlu dilakukan secara sinergis agar tidak menjadi gerakan yang saling mengunci atau menutup di kemudian hari.

Buku ini semula merupakan naskah sambutan saya dalam berbagai acara dan sebagian lagi merupakan kata pengantar untuk beberapa buku yang dikembangkan dengan perspektif dan referensi yang lebih lengkap untuk lebih menjelaskan ketiga agenda di atas. Pengembangan itu sendiri diperlukan untuk memperkaya wawasan politik dan gerakan kita sejalan dengan perubahan politik di tingkat nasional maupun global.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang dalam kepada para kiai yang telah memberi dukungan kepada saya khususnya dan kepengurusan DPP PKB 2005-2010, sehingga kinerja dan agenda partai tetap berjalan efektif -- meski ada beberapa kekurangan dan gangguan di sana-sini sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.

Kepada seluruh jajaran pengurus DPP PKB saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus atas kerja keras mereka dalam membesarkan PKB, menjalankan program-program

partai sesuai keputusan Muktamar II di Semarang dan menjaga soliditas kolektif yang militan di tengah godaan berbagai pihak yang terus berusaha memecah-belah dan merongrong PKB dari berbagai penjurur. Soliditas dan militansi itu menunjukkan bahwa perjuangan politik mereka sudah sampai pada level ketulusan dan keikhlasan yang hampir total, karena politik bagi mereka sudah menjadi panggilan hidup yang bernilai ibadah.

Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang selama ini diberikan, semoga kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga ada kesepahaman dan keselarasan gerak untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagai warga bangsa yang merdeka dan bermartabat.

Jakarta, Juni 2006

A. Muhaimin Iskandar

- 1 -

PKB DI TENGAH KOMPLEKSITAS PERSOALAN BANGSA DAN KRISIS SISTEM DUNIA

Teologi Aksi

Salah satu ajaran penting dunia pesantren adalah keharusan untuk menata dan meluruskan *niat* dalam setiap melaksanakan aktivitas. Kiai-kiai selalu mengajarkan bahwa nilai sebuah perbuatan atau aktivitas sangat tergantung pada niat orang atau kelompok yang melakukan. Niat akan membedakan apakah suatu aktivitas itu bernilai ibadah atau sekadar kebiasaan (*tamyiz al-'ibadah 'an al-'adah*). Karena itu, ulama seperti Imam asy-Syafi'i memasukkan niat dalam kategori wajib dalam setiap ibadah seperti wudlu, salat, puasa, dsb.

Niat juga mempunyai efek psikologis yang sangat kuat. Dengan niat, seseorang akan memiliki “energi kehendak” yang akan sangat menentukan keberhasilan dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Energi kehendak menjadi kekuatan penting yang akan mempengaruhi motivasi dan orientasi hidup

seseorang atau kelompok dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Karena itu, tidak berlebihan kiranya jika para ulama menyatakan bahwa perbuatan hanya bisa diukur tingkat keberhasilannya dan dievaluasi sejak dari niatnya (*innal a'mala innama tuhsabu idza kaanat bi niyyatin wala tuhsabu idza kaanat bighairi niyyatin*).

KH Yusuf Hasyim Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jatim, misalnya, sering memberi nasihat kepada santrinya bahwa niat yang baik adalah awal yang baik pula. Awal yang baik merupakan separo dari keberhasilan aktivitas atau perbuatan. Begitulah teologi niat dalam pemikiran masyarakat pesantren.

Dengan nalar dan landasan berpikir seperti itu juga, maka pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) periode 2005-2010 dilaksanakan bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2005, yaitu hari pendidikan nasional. Pengukuhan pengurus yang bertepatan dengan hari pendidikan nasional bukan semata-mata koinidensi momentum, tetapi juga sesuatu yang diniatkan dan didesain secara sadar bahwa ke depan PKB akan terus menjaga komitmen pada perjuangan politik sebagai proses pendidikan bersama dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hubungan antar-bangsa.

Pada bulan Mei juga, tepatnya tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah kebangkitan politik menuju negara yang bermartabat, mandiri dan berdaulat. Sedangkan kebangkitan

bangsa yang menjadi ruh perjuangan PKB adalah kebangkitan menyeluruh yang melibatkan seluruh sumber daya dan komponen bangsa menuju bangsa yang besar dan jaya di masa depan, dalam arti eksis sebagai negara demokratis dan sejahtera secara ekonomi, serta diperhitungkan dalam pergaulan internasional.

Tiga Tantangan

Pada bulan April 2005, PKB telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya yaitu menyelenggarakan Mukhtar ke-2 di Semarang. Mukhtar merupakan forum evaluasi dan forum tertinggi partai yang dirancang untuk merumuskan program-program partai lima tahun ke depan serta memilih orang-orang yang akan diberi mandat untuk menjalankan program-program tersebut. Dengan program baru yang merupakan kontinuitas dari program lama dan kepengurusan baru yang lebih segar, muda, mau bekerja dan loyal kepada partai, maka ke depan PKB diharapkan bisa lebih baik, dan lebih membawa *masalah* bagi konstituen, masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Saat ini setidaknya-tidaknya ada tiga tantangan besar yang dihadapi PKB. **Pertama**, berkaitan dengan masalah internasional khususnya dalam hubungan antara negara yang satu dengan yang lain di bidang ekonomi dan politik. Hubungan yang selama ini dibangun berlangsung dalam suasana tidak saling menguntungkan, tetapi cenderung intervensionistik, sehingga negara seperti Indonesia seringkali menemui banyak masalah

untuk dapat mengambil keputusan secara mandiri dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya.

Globalisasi merupakan suatu proses sejarah yang tidak mungkin dibendung karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Banyak kalangan memandang bahwa globalisasi merupakan sebuah proses yang tak terelakkan (*inevitable process*). Globalisasi menjadikan politik dan ekonomi dunia terintegrasi. Namun, karena setiap negara tidak memiliki sumber daya, infrastruktur, modal dan teknologi yang sama, maka globalisasi seringkali menguntungkan negara yang kuat dan merugikan negara lemah yang lain.

Seperti dikatakan Mark Rupert dalam bukunya *Ideologies of Globalization: Contending Vision of a New World Order* (2000) globalisasi liberal merupakan pertemuan dua proses historis yang saling terkait; yang pertama dan paling mendasar adalah bahwa globalisasi merupakan produk dinamika ekspansi kapitalis dan akumulasi kapital yang tak terbatas. Kedua, globalisasi merupakan proyek yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial dominan yang tengah berusaha menginstitusionalisasikan kekuatannya ke dalam struktur historis yang akan membantu ekspansi transnasional kapitalis di masa depan.

Karena itu, globalisasi harus diterima dan dijalankan dengan mengendepankan kepentingan nasional. Kita harus banyak belajar dari negara-negara yang sukses “menjinakkan” globalisasi

seperti Cina, Malaysia atau Jepang. Negara-negara tersebut bukan hanya berhasil menjadikan sistem ekonomi politik dunia yang terintegrasi untuk meningkatkan kemakmuran nasional, tetapi juga sukses membangun identitas nasional baru berdasarkan tradisi masyarakat yang ada. Kalau di banyak negara globalisasi (liberalisasi ekonomi) justru diiringi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan dan hancurnya tradisi atau identitas nasionalnya, di ketiga negara tersebut globalisasi bisa berjalan seiring dengan meningkatnya kemakmuran dan semakin kokohnya identitas nasional.

Untuk kepentingan itu, negara membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat. Pengalaman negara seperti Cina dan Malaysia menunjukkan bahwa untuk membangun sebuah struktur negara yang kuat dibutuhkan pemimpin yang berkarakter atau bahkan seorang “diktator yang murah hati” (*benevolent dictator*). Pemimpin yang kuat akan membangun suatu disiplin partai secara ketat, merumuskan dan menjaga kepentingan nasional secara total serta mengakomodasi demokrasi secara bertahap. Tradisi politik di Cina misalnya ditandai dengan disiplin partai yang ketat dan suksesi kepemimpinan nasional yang hampir tidak pernah menimbulkan gejolak, karena selalu ada jaminan bahwa pemimpin baru adalah penerus pemimpin lama. Di Malaysia, Mahathir Mohammad mau melepaskan jabatan kursi Perdana Menteri – tanpa harus keluar dari dunia politik – setelah ia menemukan penggantinya yang tepat, yaitu Abdullah Ahmad

Badawi yang dinilai sangat konsisten dengan nilai-nilai Melayu dan komitmen pada kepentingan nasionalnya. Indonesia juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan visioner seperti itu, tidak sekadar kepemimpinan yang demokratis.

Di samping itu, Indonesia perlu dan harus menjalin hubungan baik dengan semua negara, terutama negara-negara Asia-Afrika dan khususnya lagi negara-negara Islam. Cita-cita besar KH Abdurrahman Wahid untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam bisa dimaknai sebagai salah satu manifestasi dari upaya menjadikan Indonesia lebih bermartabat dalam membangun hubungan antar-negara dan sekaligus menjadi landasan bagi upaya bersama untuk menjinakkan globalisasi. Dengan begitu, PKB bisa berperan aktif dan strategis dalam membangun kesepahaman dan kerjasama yang kokoh bagi terciptanya hubungan antar-bangsa yang lebih adil dan saling menguntungkan.

Sikap seperti di atas penting dirumuskan secara tepat karena sistem politik dunia saat ini sedang memasuki krisis. Situasi *chaos*, eskalasi konflik domestik, perang sipil, sentimen etnis dan keagamaan, maraknya tindakan kekerasan, serta bangkitnya sentimen nasionalisme adalah sebagian tanda bahwa sistem politik dunia saat ini sedang berada dalam situasi ketidakpastian. Situasi seperti itu kemudian mengundang tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi dalam sistem politik dunia kita dan bagaimana dampak serta kelanjutannya di masa mendatang?

Menurut Giovanni Arrighi & Beverly J. Silver dalam *Chaos and Governance in the Modern World System* (1999), krisis sistem politik dunia saat ini disebabkan oleh hegemoni Amerika Serikat yang semakin menurun, khususnya sejak berakhirnya Perang Dingin, di samping integrasi ekonomi dunia yang semakin intensif.

Integrasi ekonomi dunia sendiri tidak selamanya menguntungkan, termasuk bagi negara seperti Indonesia. Karena dalam arsitektur dunia seperti itu, ekonomi pasar adalah pusatnya. Sementara pasar sendiri dikendalikan oleh negara-negara maju (*market is governed by the interests of leading industrial or postindustrial nations*). Dengan demikian, ekonomi pasar – di mana kita sedang menuju ke sana – disadari atau tidak adalah ekonomi yang bisa membawa suatu negara pada kontrol dan ketergantungan terhadap negara-negara industri maju yang lain.

Pada saat yang sama menguatnya ekonomi pasar berkorelasi positif dengan munculnya gerakan-gerakan anti sistem, terorisme dan fundamentalisme agama. Dalam kondisi demikian, negara dituntut untuk bisa memposisikan diri secara tepat dalam percaturan internasional.

Kedua, di dalam negeri sendiri, PKB dihadapkan pada timbul-tenggelamnya persoalan politik dan ekonomi yang semakin kompleks. Negara terlihat lemah menghadapi konspirasi konstitusional di mana banyak hukum dan aturan dibuat tapi justru semakin melemahkan negara itu sendiri.

Negara juga lemah menghadapi konspirasi institusional yang melibatkan lembaga birokrasi, peradilan, dan unsur-unsur negara yang lain, termasuk kepentingan negara atau lembaga internasional lainnya. Hal itu bisa terjadi karena sistem yang dibangun tidak didasarkan pada ideologi yang jelas, tetapi semata-mata menyesuaikan diri dengan perubahan dan kecenderungan yang terjadi di luar atau karena tekanan dari pihak lain.

Karena itu, PKB memandang penting untuk menata kembali proses ideologisasi bangsa sebagai landasan pembangunan sistem ekonomi dan politik secara menyeluruh (restrukturisasi), sehingga negara bisa melindungi kepentingan rakyatnya, bukan dijadikan alat untuk melindungi kepentingan segelintir elit atau kepentingan asing lainnya.

Ideologisasi menjadi terasa penting karena tanpanya proses restrukturisasi politik dan pemulihan ekonomi akan kehilangan arah. Tanpa ideologi, proses tersebut hanya akan dijadikan sebagai alat untuk menjarah dan mengkapling sumberdaya dan kekayaan negara lainnya.

William Liddle (1973) pernah menyatakan bahwa membayangkan suatu masyarakat tanpa ideologi adalah sama dengan membayangkan suatu masyarakat tanpa konflik dan suatu bangsa tanpa harapan, suatu keadaan yang tidak akan ditemukan pada masyarakat kontemporer manapun.

Menurut Liddle ideologi menghasilkan suatu peta realitas sosial yang bisa membedakan penyebab penting perilaku manusia dari yang tidak penting, menjelaskan bagaimana masa

lalu telah membentuk masa kini dan bagaimana masa kini akan membentuk masa depan. Ideologi juga memberikan arah tindakan yang dirancang untuk mencapai masa depan yang diinginkan.

Dengan demikian, ideologisasi menjadi dasar bagi tiga hal sekaligus, yaitu (1) memberi arah dan isi pada upaya proses restrukturisasi politik dan ekonomi nasional, sehingga selain tidak terjadi proses yang tumpang-tindih, tambal-sulam dan bongkar-pasang, juga ada akumulasi dan investasi sumber daya untuk jangka panjang yang akan menjamin tegaknya kepentingan nasional dan terlindunginya kepentingan warga negara baik di masa sekarang maupun di masa depan.

(2) Ideologisasi menjadi salah satu ruh dari pendidikan politik masyarakat yang selama ini telah mengalami buta huruf politik secara hampir total. Kondisi demikian terjadi karena kebijakan politik massa mengambang di masa lampau telah mengakibatkan masyarakat tidak tahu kompleksitas persoalan politik, menjadi apolitik bahkan anti-politik.

Pendidikan politik tanpa ada ruh ideologisasi akan menciptakan lompatan sikap politik yang cenderung pragmatis, di mana masyarakat bergerak secara massif menuju konsumerisme politik: ada uang ada ada dukungan. Ideologisasi memungkinkan berkembangnya perilaku politik yang berorientasi ke depan dan jangka panjang.

(3) Ideologisasi juga memungkinkan kita bisa membaca kepentingan di balik kebijakan, baik kebijakan pemerintah

nasional maupun lembaga-lembaga internasional, termasuk kebijakan negara lain dan perusahaan-perusahaan multinasional, terutama menyangkut dampaknya pada kehidupan masyarakat kita di Indonesia.

Ketiga, secara internal, PKB ke depan ditantang untuk bisa melakukan kaderisasi secara terpadu dan berkelanjutan dan lebih khusus lagi mengembangkan basis kekuatan di luar Jawa. PKB sebagai partai yang mengakar kuat pada tradisi kebudayaan dan keagamaan masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai potensi untuk menyebar di berbagai wilayah geografis dan kultural di Indonesia. PKB harus dikembangkan agar tidak menjadi partai yang selama ini hanya besar di Jawa, khususnya Jawa Timur.

Kaderisasi merupakan hal yang sangat penting karena regenerasi dan suksesi kepemimpinan cepat atau lambat akan terjadi sebagai bagian dari hukum sejarah organisasi dan masyarakat. Sedangkan pengembangan partai di luar Jawa menjadi salah satu fokus PKB periode ini karena sudah saatnya paradigma politik yang Jawa-sentris dihilangkan sehingga wilayah luar Jawa juga merasakan adanya keadilan dan kesejahteraan yang nyata.

Sesuai hasil Mukhtamar II di Semarang, lima tahun ke depan PKB akan memfokuskan diri sebagai partai advokasi. Partai advokasi adalah ideologi PKB untuk membela yang benar. Bagi PKB, advokasi bukan semata-mata pembelaan atau pendampingan, tetapi juga pengambilan posisi PKB sebagai

kekuatan penghubung, sebagai *linkage*, *wasilah*, antara bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain di dunia, antara pemerintah dengan rakyat, antara negara dengan warga negara, antara komunitas yang satu dengan yang lain, antara buruh dengan majikan, antara partai dan konstituen, antara mayoritas dan minoritas dan antara kelompok kepentingan yang satu dengan yang lain.

PKB tidak akan menjadi partai oposisi, tetapi juga bukan partai pemerintah. PKB akan menjalankan tugas sebagai partai advokasi, yaitu mendedikasikan diri sebagai pembela rakyat, bangsa, dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang ada.

Advokasi tidak semata-mata bermakna “pembelaan”, tetapi juga “mediasi”. Sebagai partai politik, PKB harus meningkatkan fungsinya sebagai penghubung berbagai kekuatan bangsa baik secara vertikal (antara massa dan elit) maupun horizontal (antar berbagai kekuatan strategis). Peran seperti ini oleh Key Lawson disebut sebagai *linkage* [Key Lawson (ed.), *Political Parties and Linkage: A Comparative Perspective*, New Heaven, London: Yale University Press, 1980].

Visi advokasi juga berorientasi pada pembangunan kembali struktur politik berkelanjutan, sehingga negara minimal tidak lagi terlalu lemah untuk mengatur aparatnya sendiri (*states are too weak to control their own officials*) – [meminjam kalimat Hilton L Root, “Do Strong Governments Produce Strong Economies?”, *The Independent Review*, Vol. V, No. 4, Spring

2001, hlm. 565–573]. Dalam jangka panjang struktur negara juga bisa cukup kokoh untuk melakukan *sharing* dengan arsitektur sistem dunia.

Pada intinya, visi dan misi partai akan difokuskan pada upaya untuk menghormati dan mewujudkan apa yang menjadi kepentingan dan keamanan warga negara (*interests and safety of citizens*) atau *al-maslahah al-‘ammah*.

Kini yang dibutuhkan adalah kerja keras, kejujuran dan loyalitas pada ideologi partai dan garis komando kepemimpinan partai, sehingga apa yang diagendakan dalam program partai bisa direalisasikan secara konsisten dan maksimal. Dengan modal seperti itulah PKB bekerja untuk kepentingan yang lebih besar, strategis dan lebih membawa *maslahat* bagi semua komponen bangsa.

Jakarta, 2 Mei 2005

- 2 -

IDEOLOGI, DEMOKRASI DAN KEPENTINGAN NASIONAL

Radikalisasi dan Disorientasi Masyarakat

Bersamaan dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi di tingkat nasional dan globalisasi di tingkat internasional, partai-partai politik di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Disebut demikian karena persoalan yang dihadapi partai politik semakin sulit dan kompleks, sementara kemampuan dan daya tahannya semakin lemah akibat pudarnya ideologi dan rapuhnya struktur politik nasional di mana ia berkecimpung di dalamnya.

Secara prosedural, proses demokratisasi di Indonesia yang berjalan sejak reformasi sudah mengalami peningkatan yang menggembirakan. Amandemen UUD 1945, perubahan paket UU Politik dan pembentukan beberapa institusi demokrasi yang ada sudah cukup menjadi landasan yang kokoh untuk menopang proses pembaharuan politik Indonesia. Tradisi politik baru yang lebih demokratis sudah mulai tumbuh. Lembaga-lembaga

politik juga sudah lebih tertata secara lebih baik yang memungkinkan proses demokrasi bisa berjalan sesuai prosedur yang disyaratkan.

Namun, secara substansial, kehidupan masyarakat terutama menyangkut kesejahteraan belum kunjung membaik. Angka pengangguran dan kemiskinan tidak bisa ditekan, bahkan meningkat. Kaum buruh, anak jalanan, pedagang sektor informal, petani, nelayan, masyarakat adat dan kelompok pinggiran yang lain terus mengalami apa yang biasa disebut sebagai deprivasi relatif (*relative deprivation*) dan menghadapi tekanan dalam ketidakberdayaan.

Human Development Report 1992 yang dibuat UNDP misalnya mengestimasi bahwa 20% penduduk dunia di negara-negara maju menerima 82,7% dari total pendapatan dunia. Kalau pada tahun 1950 pendapatan rata-rata dari 20% penduduk yang hidup negara maju dan kaya 30 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 20% penduduk yang hidup di negara miskin, maka pada 1989 rasio ini meningkat dua kali lipat menjadi 60 kali lebih tinggi (Martin Khor, 2001: 17).

Deprivasi relatif adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kapabilitas yang dimiliki seseorang atau masyarakat, sehingga muncul perasaan tersingkirkan dalam berbagai bidang kehidupan (Lihat TR. Gurr, *Why Men Rebel*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970, hlm. 24). Kondisi demikian, kalau terus berlanjut bisa menimbulkan sikap-sikap ekstrem dalam bentuk

radikalisasi pikiran dan gerakan di tengah masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun sosial politik.

Dalam sebuah seminar bertema “The Prospects for the Canadian Summit” yang diselenggarakan di Tokyo 10 Juni 2002 yang lalu, Christopher Coker dari London School of Economics and Political Science mengemukakan bahwa sejalan dengan menguatnya arus globalisasi, terorisme juga semakin meningkat. Ia menyebutkan, pada periode 1968-1989, kasus terorisme yang terjadi di seluruh dunia rata-rata 1.673 per tahun. Pada periode 1990-1996, kasus ini meningkat 162%, yaitu rata-rata 4.389 setiap tahun.

Pada skala internasional, proses globalisasi berjalan sangat massif terutama karena perkembangan teknologi informasi yang sangat dahsyat. Namun, karena infrastruktur politik, ekonomi dan budaya kita masih dalam proses penataan, maka dalam proses tersebut bukan keuntungan yang bisa diakumulasi secara maksimal, tetapi timbunan persoalan yang semakin menumpuk. Politik dalam negeri tidak begitu kokoh menghadapi intervensi pihak asing, akibatnya kedaulatan kurang bisa ditegakkan. Kebijakan ekonomi sangat tergantung pada “kebaikan hati” lembaga keuangan internasional dan modal asing, sehingga kemandirian kurang bisa dicapai. Sementara dalam hal kebudayaan, terjadi proses komodifikasi yang menjadikan kultur dan tradisi masyarakat setempat kehilangan “ruang batin”. Secara perlahan kebudayaan pun menjadi seremoni atau objek wisata belaka. Kebudayaan bangsa kini bisa dikatakan sebagai produk

dan sekaligus korban dari apa yang disebut sebagai *global monoculture*.

Dalam kecenderungan seperti itu, pikiran dan perilaku seseorang sedikit banyak dikendalikan atau dikonstruksikan oleh kekuatan media, baik cetak maupun elektronik. Orang tidak lagi bisa membedakan mana kebutuhan dasar, keinginan, hasratnya atau hawa nafsu sebagai manusia. Meminjam istilah teori hukum atau *usul al-fiqh*, orang tidak bisa membedakan lagi antara *dlaruriyyat* (kebutuhan pokok/dasar), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan akan aksesoris atau sekadar gaya hidup).

Di tengah fakta seperti itu, partai politik – meminjam istilah Dwight Y King (2000) – sebagai satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan, dituntut untuk lebih proaktif dalam menciptakan kondisi-kondisi kemungkinan bagi perubahan fundamental dalam politik, ekonomi dan kebudayaan bangsa.

Empat Agenda PKB

Dalam rangka ikut menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dalam konteks politik nasional dan internasional seperti tersebut di atas, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – seperti ditegaskan Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid dalam berbagai kesempatan – mengagendakan empat program politik. *Pertama*, demokratisasi yang berkelanjutan dengan keluar dari persoalan dikotomi sipil-militer dan agamis-sekular. *Kedua*,

memfokuskan politik-ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pendapatan per kapita. *Ketiga*, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam. Dan *keempat*, mengupayakan penyelesaian persoalan di negara Dunia Ketiga dengan mekanisme dan oleh sesama Dunia Ketiga sendiri.

Yang *pertama*, yaitu demokratisasi berkelanjutan, diperjuangkan bukan hanya karena demokrasi merupakan sistem politik yang realistik dan manusiawi, tetapi juga karena *inherent* di dalamnya ada potensi untuk menyatukan semua komponen dan kekuatan bangsa. Potensi ini tentu tidak dimiliki oleh agama dan nilai-nilai primordial yang lain. Dengan demokrasi, semua kekuatan bisa bersatu dan bangsa menjadi kokoh.

Demokrasi juga memberi peluang dan ruang yang sangat luas kepada seluruh anggota masyarakat untuk mengembangkan diri sebagai individu dan warga negara sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Sangat dimungkinkan munculnya kesadaran masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan manusia, sehingga potensi masyarakat bisa lebih dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih nyata dan luas skalanya.

Namun demokratisasi tidak akan banyak membawa manfaat jika ia tidak berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penting dicatat di sini bahwa demokrasi tidak menjamin berjalan seiring dengan kemakmuran masyarakat. Liberalisasi

politik dan ekonomi tidak selamanya menghadirkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Karena itu, demokrasi lebih dijaga sebagai kerangka dasar untuk menyatukan kekuatan bangsa dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, sementara implementasinya diorientasikan pada terciptanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong terwujudnya kesejahteraan, termasuk kebijakan yang melindungi (protektif) ekonomi rakyat seperti industri kecil dan rumah tangga. Dan itulah agenda *kedua* PKB.

Bukan berarti kita akan menolak ekonomi pasar, karena hal ini juga tidak mungkin, selain karena adanya keuntungan yang bisa diraih dari sistem tersebut. Namun, liberalisasi total tidak mungkin diterapkan kepada sistem ekonomi rakyat, karena hal demikian justru akan menghancurkan sendi-sendi dasar perekonomian nasional. Negara-negara besar seperti Prancis dan Amerika Serikat misalnya, meskipun sepakat dengan pencabutan subsidi, tetapi mereka tetap memberi subsidi kepada sektor pertanian sebagai bagian dari upaya memproteksi perekonomian nasional dan sekaligus melindungi kepentingan warga negaranya. Diperlukan kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) dalam menerapkan kebijakan politik ekonomi, sehingga kita tidak terbelenggu oleh teori atau sistem internasional, tetapi semua diorientasikan untuk kepentingan yang lebih besar dan berjangka panjang.

Agenda *ketiga*, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam, merupakan upaya PKB untuk

menjadikan visi agama yang progresif dan toleran sebagai orientasi universal umat Islam, karena Islam Indonesia secara faktual adalah demikian. PKB secara nyata mewarisi dan mewakili arus utama Islam Indonesia yang transformatif dan toleran. Dengan modal jumlah umat Islam terbesar di dunia, peluang itu tentu bisa diraih. Menjadikan Islam dalam citra yang progresif dan toleran merupakan salah satu upaya mencegah politisasi Islam dan radikalisasi ajarannya serta meminimalisasikan intervensi negara lain (Barat) terhadap dunia Islam sendiri, termasuk Indonesia.

Dunia Islam saat ini bisa dikatakan telah kehilangan rujukan, terutama dalam tradisi pemikiran dan model pengaturan masyarakat dalam satu entitas bernama negara. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika Utara atau di Asia Selatan sudah lama ditinggalkan sebagai “teladan” karena berbagai alasan. Islam Indonesia dalam jangka panjang mempunyai potensi untuk menjadi rujukan, karena Islam Indonesia yang dimanifestasikan dalam tradisi pesantren dan masyarakat lokal sangat mengakar dalam kebudayaan masyarakat dan peradaban Islam sendiri, sekaligus mempunyai watak kosmopolitan, di mana ia selalu terbuka terhadap nilai-nilai baru yang datang dari peradaban lain.

Agenda *keempat*, yaitu mengupayakan penyelesaian masalah Dunia Ketiga oleh Dunia Ketiga sendiri, merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan Dunia Ketiga yang berlebihan terhadap negara-negara industri maju.

Ketergantungan adalah awal dari hilangnya kemandirian dan kedaulatan.

Kecenderungan intervensi dari negara-negara maju perlu diminimalisasikan, karena hal tersebut secara nyata sering membuat negara Dunai Ketiga kehilangan kemandirian dalam merumuskan persoalan internalnya dan dalam membuat kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat.

Untuk bisa berperan dalam kerangka tersebut, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi partai politik, yaitu orientasi masa depan yang jelas dengan ideologi yang berpihak dan kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Tanpa orientasi jangka panjang, partai politik akan selalu terjebak dalam hedonisme dan pragmatisme kekuasaan. Tidak ada ideologi berarti tidak ada lagi pertarungan besar. Sedangkan tanpa kepemimpinan yang kuat, partai politik akan menjadi kuda tunggangan untuk mengejar kekuasaan dan jabatan yang dilakukan oleh kaum petualang yang bermental hedonistik. Politik pun menjadi seperti dunia profesi, di mana orang bekerja untuk mereka yang telah atau akan membayarnya, bukan untuk masyarakat yang telah memberi mandat kepadanya melalui pemilihan umum.

Sebagian sarjana Barat seperti Daniel Bell, Seymour Martin Lipset, Edward Shils dan Raymond Aron memang telah mengkampanyekan berakhirnya ideologi (*the end of ideology*). Pandangan ini didasarkan pada konfidensi positivistik bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mengambil alih dan menyelesaikan semua persoalan manusia atau masyarakat (lihat

misalnya SM Lipset, *Political Man: The Social Bases of of Politics*, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1981, hlm. 524-565).

Namun pandangan itu tidak relevan diterapkan di Indonesia yang belum pernah mengalami proses ideologisasi sampai pada titik di mana bangunan ideologi yang menjadi dasar bagi pembangunan struktur ekonomi dan politik sudah kokoh dan jelas. Karena ketidakjelasan itulah sampai saat ini Indonesia mengalami krisis struktural dan disorientasi yang mengakibatkan lemahnya kemampuan negara untuk melindungi kepentingan rakyatnya dan tidak tumbuhnya pemimpin-pemimpin nasional yang kuat dan berkarakter.

Fakta yang mudah untuk dijadikan contoh adalah seringnya muncul aturan hukum (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dsb.) yang tumpang-tindih atau bahkan bertentangan dengan aturan hukum yang lain atau sebelumnya. Begitu juga selalu dibuat lembaga-lembaga baik dalam bentuk komisi-komisi atau badan-badan yang seringkali tumpang-tindih dengan lembaga yang sudah ada dan semakin menambah beban keuangan negara. Yang berkaitan dengan masalah hukum misalnya di tingkat pusat ada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dsb. Ini menunjukkan bahwa belum ada arah yang jelas dari restrukturisasi sistem politik dan hukum nasional.

Karena itulah, empat agenda besar PKB di atas akan ditopang

oleh proses ideologisasi dan kaderisasi. Ideologisasi adalah proses pencarian dan perumusan pijakan-pijakan gerak untuk melakukan perubahan fundamental dalam berbagai sektor kehidupan bangsa dengan merengkuh dan merekatkan energi dan sumberdaya yang dimiliki seluruh komponen bangsa.

Sedangkan hakikat kaderisasi adalah pencarian akan makna ideologi sebagai kekuatan pengikat dalam hubungan baik antara warga negara secara perorangan maupun kelompok di satu pihak dan negara di pihak lain (Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman: Kumpulan Pemikiran KH Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia*, Jakarta: Kompas, 1999, hlm. 114).

Dengan demikian, kaderisasi merupakan proses terus-menerus dalam kerangka penguatan ideologi kader dalam arti luas, menjaga identitas, nilai-nilai dan tujuan kolektif, sirkulasi sumberdaya dan pengaturan arus kekuasaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kaderisasi juga berguna untuk menyiapkan para calon pemimpin partai yang akan menjamin bahwa rotasi dan proses suksesi kepemimpinan bisa terus terkonsolidasi, sehingga proses dan kebijakan politik dalam kerangka kepartaian berjalan efektif, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Hal penting yang kemudian perlu dirumuskan adalah materi kaderisasi itu senditi. Dalam tradisi partai Islam yang militan di Timur Tengah semisal Ikhwanul Muslimin atau partai politik Islam di Indonesia, kaderisasi selalu dimulai dengan penanaman

teologi/tauhid melalui reinterpretasi terhadapnya berdasarkan kepentingan kolektif umat. Ideologisasi melalui tauhid ini biasanya menghasilkan kader yang sangat militan.

Seperti ditulis Hassan Hanafi, tauhid mempunyai fungsi praktis melahirkan keteguhan perilaku, dan sistem keyakinan yang melahirkan suatu tujuan transformasi kehidupan manusia dan sistem sosial mereka. Tidak ada Nabi yang datang untuk mengukuhkan *status quo*, karena gerak kenabian dalam sejarah selalu merupakan gerak progresif bagi perubahan sosial secara keseluruhan. Para nabi merupakan guru dan pejuang nilai-nilai kemanusiaan menuju taraf yang lebih tinggi dan sempurna (Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam antara Modernisme dan Posmodernisme: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, 1994: 131).

Partai Kebangkitan Bangsa saat ini, di tengah fakta kerapuhan struktur politik bangsa sebagai akibat dari proses deideologisasi yang massif, memandang perlu dilakukan ideologisasi dalam setiap proses kaderisasi. Karena itu materi-materi yang penting dalam kaderisasi adalah materi yang berkaitan dengan penguatan ideologi kader dan partai. Dalam konteks ini bagaimana menerjemahkan dan mengimplementasikan paham *Ahlus Sunnah wal Jamaah* yang telah direinterpretasikan berdasarkan dimensi kesejarahan masa lalu dan kekinian, dalam kehidupan politik nasional-lokal serta menyandingkannya dengan ideologi-ideologi besar dunia merupakan tugas bersama yang harus segera diselesaikan, sehingga didapatkan suatu ideologi partai dan

kelompok yang bersifat terbuka tetapi mengikat semua pihak di dalamnya.

Partai Advokasi

Dalam konteks ini, menjadi partai advokasi – seperti diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional PKB 13-14 Agustus 2001 di Jakarta dan Mukhtar Luar Bisa (MLB), 17-19 Januari 2002 di Yogyakarta – bisa dikatakan sebagai preferensi *genuine* yang diambil para pemimpin PKB. PKB telah melampaui polemik tidak produktif soal oposisi dan koalisi yang tidak jelas basis ideologisnya. Advokasi menjadi mekanisme untuk mencairkan polarisasi biner antara partai (pro) pemerintah dan partai oposisi. Advokasi menjadi upaya kolektif dari seluruh sumber daya partai politik untuk menciptakan politik sebagai ruang di mana *public policy* diperdebatkan dan dirumuskan.

Di satu sisi, partai advokasi merupakan implementasi awal dan strategis yang diambil PKB sebagai partai yang berideologi dan juga sebagai bagian integral dari upaya kaderisasi berbasis ketrampilan khusus dalam berpolitik. Di sisi lain, dengan menjadi partai advokasi, PKB bisa fokus membela kepentingan rakyat secara optimal demi terlindunginya hak-hak dasar dan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dalam wujud rasa aman, kesehatan dan kecukupan (*al-amna, was-shihbah wal kifayah*).

Menjadi partai advokasi juga merupakan pilihan cerdas untuk keluar dari dikotomi “partai oposisi” dan “partai

pemerintah”. Opisisi konvensional hanya akan melemahkan negara yang secara faktual sudah sangat tidak berdaya. Sementara menjadi partai pro pemerintah juga akan kontraproduktif terhadap upaya untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan meningkatkan kesejahteraan mereka, karena pemerintah yang ada masih sangat dikendalikan oleh kepentingan modal dan kepentingan-kepentingan lainnya, sementara aparatur pemerintahan sudah banyak kehilangan kecerdasan, karakter, kearifan dan kepekaannya.

Kalau agenda dan preferensi ideologis ini bisa dijalankan dengan penuh kesadaran dan loyalitas serta dikuatkan dalam keputusan kolektif yang mengikat tanggung jawab semua komponen partai dalam suatu kolektivitas baru yang bersumber pada niat yang benar (*qasd sahiih*), semangat yang baik (*husn al-himmah*) dan jiwa yang agung (*nufuz al-‘azimah*) – meminjam istilah KH Hasyim Asy’ari dalam kitabnya *ad-Durar al-Muntathirah fil-Masail al-Tis’a ‘Asharah* (1359H/1940M, hlm. 17) – maka, politik PKB sebagai partai kerja ke depan akan jauh lebih berwarna dan bermakna. Itulah kerangka menyeluruh advokasi sebagai terapan dari spiritualitas politik PKB: membela yang benar.

Jakarta, 7 Februari 2005

- 3 -

PARTAI ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN PKB

Kerangka Dasar Partai Advokasi

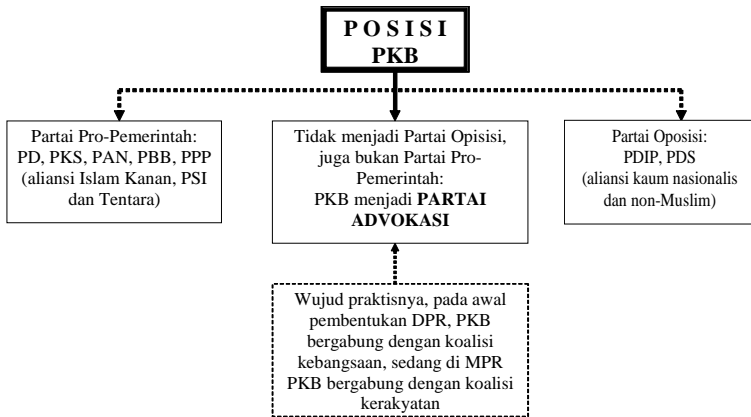
Ketika membuka "Workshop dan Training Advokasi Hukum dan HAM" yang diselenggarakan oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta pada tanggal 13 September 2004, Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa di masa depan dalam politik Indonesia akan ada tiga kekuatan penting yang akan bermain, yaitu partai politik, militer dan kampus/LSM.

Mengingat pentingnya peran partai politik di masa depan, Gus Dur mengharapkan agar PKB bisa benar-benar menjadi partai advokasi yang akan membela kepentingan nasional dalam percaturan geopolitik internasional, membela hak-hak dasar rakyat dan meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta 13-14 Agustus 2001 dan dikuatkan dalam Mukتامar Luar Biasa (MLB) PKB di Yogyakarta pada Januari 2002, PKB telah memutuskan untuk menjadi partai advokasi.

Keputusan Mukernas tersebut wajib didukung dan diperjuangkan sebagai aktivitas politik nyata dalam kehidupan kepartaian sehari-hari. Dalam jangka panjang, keputusan itu sangat strategis bagi eksistensi PKB di masa depan dan konsolidasi berkelanjutan partai yang berdiri pada 23 Juli 1998 ini. Disebut demikian karena tugas partai politik pada dasarnya adalah melayani rakyat (*khadim ar-ra'yyah*) dalam kerangka melindungi hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum.

Dengan memutuskan menjadi partai advokasi, PKB akan lepas dari polemik yang tidak produktif soal oposisi dan koalisi yang tidak jelas basis ideologisnya selain bagi-bagi kekuasaan. Advokasi menjadi mekanisme bagi partai politik untuk mencairkan polarisasi biner antara partai (pro-) penguasa dan partai oposisi. Advokasi akan menjadi upaya-upaya kolektif dari seluruh sumberdaya partai politik (dari konstituen sampai pengurus) untuk menciptakan politik sebagai ruang di mana *public policy* diperdebatkan dan dirumuskan. Dengan demikian, dengan menjadi partai advokasi, PKB bisa melampaui perdebatan klasik soal koalisi atau oposisi yang di Indonesia hampir tidak pernah menjadi praksis politik, tetapi cenderung sebagai alat untuk tawar-menawar politik semata.



Dari konteks filosofi politik, menjadi partai advokasi merupakan manifestasi komitmen PKB sebagaimana terumuskan dalam *mabda' siyasiy* dan *platform* partai ini, terutama menyangkut keberadaan konstituen partai yang sebagian besar relatif terpinggirkan akibat kebijakan salah urus dan salah fokus selama ini.

Advokasi juga bisa menjadi momentum untuk mengembalikan peran ulama di tengah kehidupan masyarakat bangsa dan rakyat banyak, di mana salah satu sumber opini hukum (*legal opinion*) yang menjadi ciri khas PKB adalah fatwa para ulama. Dengan karakter seperti ini, hubungan historis, kultural dan aspiratif antara Nahdlatul Ulama dan PKB bisa berjalan seiring, saling melengkai dan menguatkan, tanpa harus membuat PKB kehilangan watak aslinya sebagai partai terbuka dan partai nasional.

Karena alasan-alasan tersebut, memperjuangkan dan mewujudkan PKB sebagai partai advokasi sudah menjadi komitmen saya sebagai pribadi dan sejak saya dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal DPP PKB. Pasca Mukhtamar di Semarang, saya berharap bisa diletakkan landasan yang kokoh bagi PKB sebagai partai advokasi yang akan terus diperjuangkan dan dipertahankan di masa yang akan datang sebagai praktek politik harian yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, advokasi dengan sendirinya akan menjadi kerja politik dan kampanye partai sepanjang waktu yang akan membesarkan dan memperkokoh eksistensi dan peran PKB di tengah masyarakat, sekaligus memberinya peluang untuk berperan dalam wilayah yang lebih luas.

Bagi kebanyakan orang, terutama aktivis NGO atau organisasi non-pemerintah dan pengamat politik *mainstream*, keputusan PKB untuk menjadi partai advokasi mungkin masih dianggap aneh. Hal ini wajar karena dalam sejarah Indonesia belum ada "partai advokasi" dan juga belum ada rumusan yang jelas soal advokasi oleh partai politik. Advokasi selama ini lebih dikenal sebagai aktivitas dari lembaga-lembaga non-pemerintah atau NGO.

Agar rasa aneh itu tidak berubah wujud menjadi salah paham atau membawa paham yang salah soal partai advokasi, PKB telah merumuskan dan menyediakan perangkat, *guidance* (panduan), strategi, model dan mekanisme advokasi yang akan dilakukan oleh partai ini. Tanpa ini semua, kerja advokasi PKB

hanya akan menjadi wacana. Kalaupun dijalankan akan sangat serabutan, sporadis, kosong dari ideologi, tumpang-tindih, dan tidak pernah mencapai sasaran (Lihat A Muhaimin Iskandar, *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita*, LKiS, 2004: 213-215).

Untuk tahap awal, DPP PKB sudah menerbitkan buku panduan advokasi. Buku berjudul *Partai Advokasi: Wacana, Gerakan dan Keberpihakan*, diterbitkan ketika saya menjadi Sekjen atas kerjasama DPP PKB dan Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK.R) Jogjakarta.

Filosofi Advokasi oleh PKB

Pada masa transisi politik seperti sekarang ini, posisi dan peranan partai politik memang mengalami pergeseran. Namun pergeseran yang terjadi belum sepenuhnya mengarahkan partai politik menjadi institusi mediasi yang mampu melembagakan kepentingan warga masyarakat dalam institusi-institusi publik. Hal ini bisa dilihat dari cara partai politik berhubungan dengan masyarakat dan metodenya dalam melakukan negosiasi kebijakan. Dalam kedua soal ini, partai politik masih cenderung elitis dan belum optimal menggalang partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan politik.

Hal-hal itulah yang hendak dituntaskan PKB melalui pendeklarasian diri sebagai “partai advokasi”. Bagi PKB, pilihan menjadi partai advokasi merupakan bentuk implementasi

kepemimpinan politik partai melalui peran-peran mediasi politik yang diorientasikan pada realisasi prinsip *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuutun bil-maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyat harus diarahkan untuk kemaslahatan). Kemaslahatan di sini mengandung dua arti, yaitu mensejahterakan masyarakat (*ath'amahum min al-ju'*) dan melindungi hak-hak mereka (*amanahum min al-khauf*).

Sebagai konsekuensi politis dan organisatoris sebagai partai advokasi, maka PKB harus segera mentransformasikan gerak politiknya dari “politik kerumunan” ke “politik organisasional”. Politik kerumunan berarti gerak politik yang berbasis isu, momentum dan kepentingan jangka pendek, sementara politik organisasional merupakan gerak politik yang bersandar pada perjuangan kepentingan bersama yang bersifat strategis, jangka panjang dan terlembaga dalam organisasi partai.

Dalam konteks PKB, kepentingan bersama itu mencakup kepentingan konstituen partai, para kiai dan ulama, kader dan pengurus partai, serta kepentingan bangsa pada umumnya yang dibingkai dalam kerangka perjuangan organisasional partai. Inilah kolektivitas baru yang hendak diwujudkan oleh PKB. Harapannya, PKB menjadi partai yang kuat secara organisasi, benar-benar berskala nasional, dekat dengan rakyat (konstituen), serta efektif dalam pelbagai bentuk negosiasi kebijakan.

Kenyataan bahwa PKB bukan bagian dari partai pemerintah tidak berarti PKB secara otomatis menjadi partai oposisi. Masalahnya adalah basis legal-politis sistem politik kita tidak

memberi tempat bagi hadirnya partai oposisi, sehingga dikotomi antara partai pemerintah dan partai oposisi tidak dikenal. Identifikasi politik oposisional dan non-oposisional hanya berlangsung di luar sistem ketatanegaraan. Partai-partai berjalan bebas untuk membangun kerja-kerja politik taktis dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada posisi ekstrem yang pro-pemerintah atau kontra-pemerintah. Begitulah rancang-bangun politik kita yang pada gilirannya mempengaruhi cara partai politik dalam mendekati dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Berbeda dengan negara-negara demokrasi maju (*advanced democracies*) yang telah melembagakan oposisi dalam sistem politiknya, kehadiran partai oposisi bukan saja diakui, tetapi juga diberi peranan dalam sistem politik yang bekerja. Partai oposisi memiliki tanggung jawab, hak dan kewenangan-kewenangan tertentu berkaitan dengan bekerjanya mekanisme-mekanisme kenegaraan (*statecraft mechanisms*). Eksistensi dan peranan partai oposisi, dengan demikian, menjadi bagian penting dari sistem politik demokrasi yang dibangun. Hal semacam itulah yang tidak ada di negeri kita.

Oposisi memang merupakan keniscayaan demokrasi, namun aktualisasinya sangat bergantung pada sejauhmana pelembagaan oposisi berlangsung dalam sistem politik negara bersangkutan. Dalam konteks Indonesia yang secara legal-politis tidak mengakui oposisi sebagai bagian dari sistem politik, maka kehadiran oposisi lebih bersifat fungsional ketimbang formal.

Tak pelak jika partai-partai politik yang berada di luar kekuasaan cenderung bersikap taktis dalam mensikapi kebijakan pemerintah. Ini konsekuensi dari tidak terlembaganya oposisi dalam sistem politik kita.

Menyadari konteks politik seperti itu, PKB mencoba untuk tidak mendikotomikan antara partai pemerintah dan oposisi. Dikotomi partai oposisi dan pemerintah hanya dimungkinkan setelah sistem politik nasional melembagakan eksistensi partai oposisi. Tanpa itu kehadiran partai oposisi tidak benar-benar mewakili oposisi seperti dalam sistem demokrasi. Oleh karenanya, menjadi partai oposisi di sini tidak cukup memadai untuk meningkatkan peran partai dalam proses-proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya yang akan berlangsung adalah proses-proses negosiasi kebijakan antara pemerintah dengan partai-partai yang berada di luar kekuasaan.

Gagasan paling mendasar dari proses negosiasi kebijakan antara pemerintah dan partai politik adalah perlunya partisipasi demokratis dari seluas-luasnya warga masyarakat dalam negosiasi kebijakan. Partai politik, dengan demikian, harus benar-benar berfungsi sebagai institusi mediasi politik yang menyambungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Optimalisasi partisipasi demokratis warga masyarakat itu hanya bisa dijembatani oleh partai yang mengambil peranan sebagai “partai advokasi”. Itulah alasan mendasar mengapa PKB memutuskan dirinya sebagai partai advokasi dan bukan partai oposisi.

Advokasi sebagai Terapan Spiritualitas Politik PKB

PKB didirikan oleh para ulama dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sarana perjuangan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keadilan di Indonesia. Sebagai partai yang dirancang oleh para ulama, politik PKB mempunyai dimensi dan warna spiritualitas tersendiri. Disebut demikian karena politik PKB didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama yang universal dan bersifat membebaskan.

Spiritualitas tidak semata-mata berarti urusan yang berhubungan dengan hati, akal budi atau akhirat. Spiritualitas menjadi semacam *state of mind* yang melampaui hal-hal yang bersifat material, duniawi dan jangka pendek. Adanya landasan spiritual juga memungkinkan seseorang untuk melakukan segala sesuatu sebagai pekerjaan hati atau panggilan hidup, tidak semata-mata tuntutan profesi atau pekerjaan. Hal ini dimungkinkan karena spiritualitas politik PKB merupakan derivasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam yang hakiki tentang kehidupan manusia dan alam semesta.

Dalam konteks hubungan PKB dengan masyarakat atau konstituen, advokasi berarti upaya-upaya menyeluruh yang dilakukan PKB dalam kerangka tindakan politik untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hak-hak dasar warga negara yang menjadi fokus pembelaan PKB adalah apa yang di kalangan ulama pesantren disebut sebagai

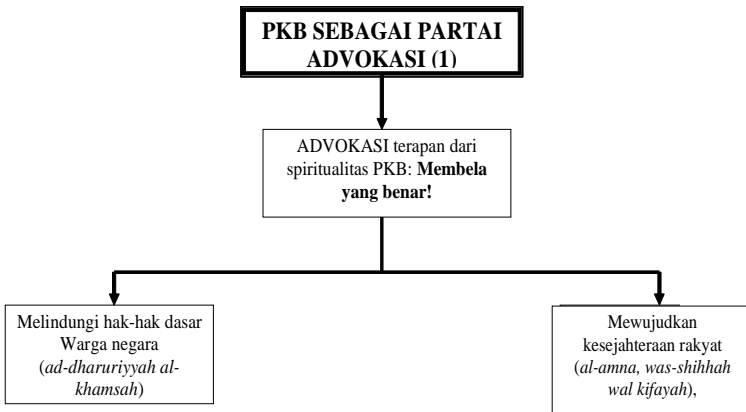
hak dasar yang lima (*ad-dlaruriyyat al-khamsah*) yaitu hak yang dilindungi oleh syariat dan menjadi alasan eksistensi syariat itu sendiri (*maqasid asy-syari'ah*). Kelima hak dasar itu meliputi (1) kebebasan agama atau mempertahankan keyakinan, yang berarti syariat diturunkan bertujuan untuk melindungi agama dan keyakinan setiap orang (*hifz ad-din*); (2) keselamatan jiwa atau fisik dari tindakan di luar ketentuan hukum (*hifz an-nafs*); (3) keselamatan/kelangsungan hidup keturunan atau keluarga (*hifz an-nasl*); (4) keamanan harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-mal*) dan (5) kebebasan berpendapat dan berekspresi (*hifz al-'aql*).

Itulah acuan syariat yang menjadi landasan advokasi PKB dalam membela kepentingan warga negara. Sedangkan berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat acuan syariatnya adalah kaidah hukum (*qawaid fihiyyah, legal maxims*) yang menyatakan bahwa “tugas para pemimpin adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat” (atau biasa dikenal dengan istilah *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manut bil-maslahah*).

Dengan landasan nilai-nilai dan ajaran agama seperti itu, politik PKB bukan hanya mengakar secara total dalam keyakinan dan kesadaran para pelaku politiknya, karena dengan fundamental seperti itu pasti ada nilai ibadah yang dirasakan sehingga ada motivasi yang lebih untuk berkhidmat kepada masyarakat dan bangsa. Lebih dari itu, politik PKB juga mampu mentransformasikan ajaran dan nilai-nilai dasar Islam tentang

kehidupan masyarakat secara luas dalam kerangka yang lebih terbuka, toleran dan membebaskan.

Bagi PKB, ajaran Islam tidak harus dibakukan atau dibekukan untuk kepentingan golongan yang bersifat eksklusif, yaitu menjadi alat pembeda dengan kelompok lain. Tetapi dalam konteks negara nasional seperti Indonesia, ajaran Islam akan lebih mulia jika ditranformasikan menjadi sumber nilai yang bisa mengayomi dan menggerakkan sumber daya umat Islam bersama-sama komponen bangsa yang lain dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran dan kemandirian bangsa.



Kalau dalam konteks hubungan PKB dengan masyarakat advokasi berarti pembelaan dan aktivitas pembebasan yang lain, maka dalam kaitan hubungan PKB dengan kekuatan atau kelompok-kelompok strategis di luarnya, advokasi mencakup pelbagai aktivitas mediasi. Aktivitas mediasi dibutuhkan karena

kepentingan setiap kelompok, golongan atau lembaga politik tentu tidak sama, sehingga dibutuhkan media untuk mencari titik temu atau solusi jika terjadi konfrontasi.

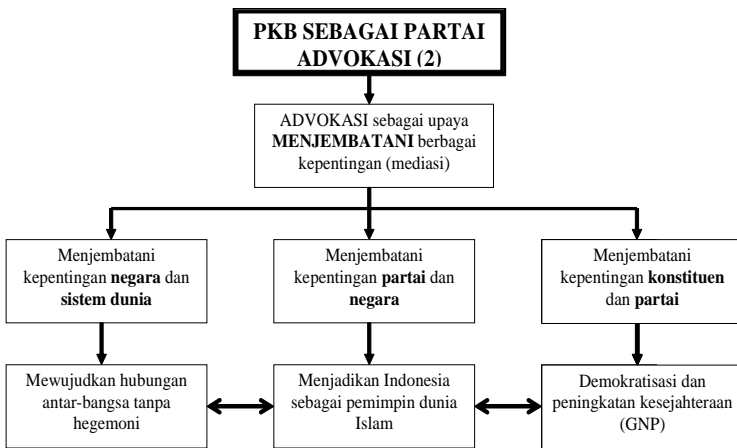
Ada tiga gugus aktivitas mediasi partai, yaitu (1) menjembatani kepentingan negara dan sistem internasional, (2) menjembatani kepentingan partai dan negara, dan (3) menjembatani kepentingan masyarakat dan partai.

Dalam hubungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain atau lembaga-lembaga internasional lainnya, maka langkah-langkah mediasi PKB diarahkan sebagai langkah dasar untuk mewujudkan tata internasional atau hubungan antar-negara yang berdasarkan pada prinsip keadilan, kesamaan derajat dan saling menguntungkan.

Terkait dengan hubungan partai dan negara atau pemerintah, aktivitas mediasi diorientasikan untuk membangun landasan yang kokoh bagi terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan secara maksimal, terwujudnya sistem politik yang demokratis sehingga mampu mewujudkan partisipasi masyarakat yang signifikan dalam proses-proses politik, dan terwujudnya negara nasional yang mandiri dan berdaulat sehingga mampu melindungi kepentingan nasional dan warga negara.

Kalau bangunan dasar ekonomi dan sistem politik itu sudah kokoh, maka dalam jangka panjang cita-cita PKB untuk menjadikan Indonesai sebagai pemimpin dunia Islam akan lebih mudah untuk direalisasikan.

Sementara dalam hubungan antara partai dengan masyarakat, aktivitas mediasi dimaksudkan untuk mengumpulkan, merumuskan dan menindaklanjuti kepentingan atau aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga proses liberalisasi dan demokratisasi berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.



Modal Dasar Pengembangan

Advokasi oleh partai politik adalah komitmen untuk melakukan politik sebagai aktivitas harian (bukan kegiatan lima tahun sekali) dan politik sebagai panggilan hidup (bukan sebagai profesi) guna mengangkat nasib rakyat atau kaum Bumi Putera. Advokasi yang demikian menjadi salah satu upaya untuk membenahi kerapuhan struktural dan menumbuhkan mentalitas kewarganegaraan (*civic mentality*), sehingga partai

politik tidak lagi terjebak pada pragmatisme dan avonturisme yang berorientasi pada uang, kedudukan, kekuasaan semata dan kepentingan sesaat atau jangka pendek lainnya.

Partai advokasi merupakan pilihan strategis dalam upaya memaksimalkan fungsi-fungsi formal partai politik, merumuskan ideologi secara bertahap yang berorientasi pada kepentingan nasional dan kemaslahatan konstituen, dan - dengan sendirinya - mencegah degradasi kultur partai politik yang sudah mencapai ambang batas yang membahayakan seluruh tatanan sistem politik kita.

Sebagai representasi dari komunitas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), politik PKB adalah jalan tengah (*tawasut*), yaitu selalu menjembatani perbedaan pandangan antara dua kelompok politik. Advokasi juga merupakan strategi politik jalan tengah. Rumusannya adalah – seperti disebutkan di atas – PKB akan menjadi jembatan dalam relasi antara negara dengan negara lain, pemerintah vs rakyat, mayoritas vs minoritas, sipil vs militer, tradisi vs modernitas, termasuk perbedaan pandangan antara penganut paham negara Islam vs negara nasional.

Dengan berpolitik di dua sisi, PKB bermaksud menjadi kekuatan penyeimbang dan mediatik dalam arena pertarungan politik yang ada. Bergabungnya FKB dengan Koalisi Kebangsaan di parlemen pada awal pembentukan DPR hasil Pemilu 2004 dimaksudkan untuk mengembangkan politik yang benar-benar membela kepentingan rakyat banyak. Dalam hal kebijakan menyangkut kebutuhan dasar rakyat banyak seperti

subsidi, harga produk pertanian, tarif dasar listrik atau BBM, PKB akan berusaha untuk mewujudkan kebijakan yang benar-benar populis. Artinya, politik PKB mungkin akan cenderung berseberangan dengan pemerintah.

Namun, PKB juga tidak ingin pemerintah dengan mudah dijatuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang akan mengakibatkan instabilitas politik nasional dan menjadikan proses konsolidasi demokrasi menjadi mundur. Karena itu, untuk menjaga kelangsungan jalannya pemerintahan, di MPR PKB bergabung dengan Koalisi Kerakyatan.

Implementasi dari gerakan partai advokasi itu ditopang oleh tiga modal dasar yang dimiliki PKB sejak lahir. Pertama, PKB adalah satu-satunya partai yang dilahirkan dari rahim ulama Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, PKB memiliki hubungan historis, kultural dan aspiratif dengan NU. Meski demikian, sejak masih dalam “kandungan”, PKB tidak dimaksudkan untuk dilahirkan hanya untuk kalangan warga NU, dan tidak pula hanya untuk umat Islam. PKB adalah partai yang dirancang dengan pikiran dan watak sebagai partai terbuka.

Keterbukaan PKB dirumuskan dalam kerangka dasar politiknya, yaitu *Mabda' Siyasi* PKB. Dalam poin nomor 7 *Mabda' Siyasi* disebutkan PKB menyadari bahwa sebagai bangsa pluralistik yang terdiri dari suku, agama, dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

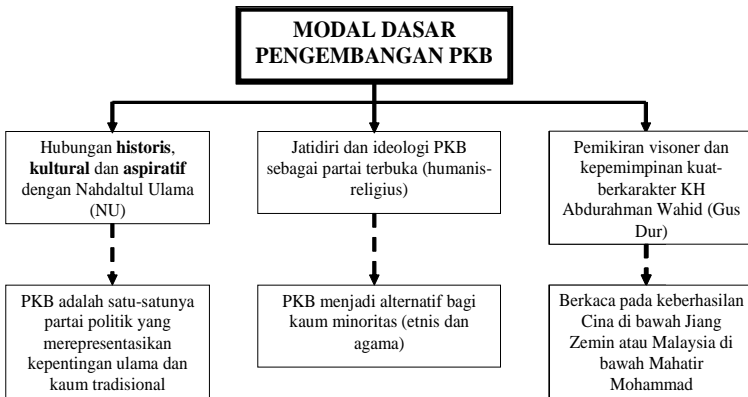
Pada poin 9, *Mabda' Siyasi* secara jelas menyebutkan PKB adalah terbuka dalam pengertian lintas agama, lintas suku, lintas ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.

Modal kedua adalah -- sebagai partai yang dirancang oleh para ulama pesantren seperti disebutkan di atas -- jatidiri PKB sebagai partai terbuka itu sendiri. Artinya sejak awal PKB mendesain rumusan pikiran dan gerak politiknya berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam universal yang mampu merangkum dan merengkuh seluruh potensi dan sumber daya bangsa, baik dari kalangan umat Islam maupun agama dan golongan lain, untuk kepentingan transformasi nasional secara menyeluruh.

Bagi PKB, ajaran Islam dihayati dan dipahami bukan untuk membangun sekat-sekat dan egoisme golongan, tetapi justru untuk menjadi wahana pengayoman berbagai keyakinan dan aspirasi masyarakat yang pluralistik, sehingga agama dan budaya menjadi kekuatan yang bersifat transformatif, bukan sekadar alat legitimasi atau tawar-menawar kepentingan.

Modal ketiga PKB adalah pemikiran visioner KH Abdurrahman Wahid yang diakui dunia sebagai jaminan atas eksistensi Islam yang toleran terhadap pluralitas dan proses demokratisasi yang menopang kedaulatan negara dan melindungi kepentingan masyarakatnya.

Selain itu, Gus Dur juga diakui sebagai tokoh yang telah teruji dan terbukti konsisten serta tangguh sebagai penjaga ideologi partai dan negara nasional, sesuai amanah para pendiri bangsa (*the founding fathers*) dan para ulama deklarator partai, sehingga di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Dewan Syura, PKB tetap eksis sebagai partai yang teguh membela kebenaran dan kepentingan masyarakat di tengah kondisi negara, pemerintahan dan partai-partai politik yang mengalami deideologisasi dan terus-menerus diterjang pragmatisme yang menjerumuskan bangsa ke dalam krisis berkelanjutan.



Menurut hemat saya, dengan ketiga hal di atas berarti PKB mempunyai modal kultural, sosial dan politik yang sangat cukup untuk menjadi partai besar dan berpengaruh baik dalam percaturan politik nasional maupun pergaulan internasional. Modal dasar tersebut hanya akan berguna jika dipahami dan

diimplementasikan dalam kerangka kerja partai politik advokasi yang dijalankan oleh para pemimpin dan kader partai yang awas terhadap gerak sistem dunia, pergeseran kekuatan-kekuatan strategis nasional dan pluralitas aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dengan ditopang oleh kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid dan ulama-ulama yang visioner, serta didukung oleh kader-kader muda partai yang mengerti masalah, loyal, punya nyali dan mau bekerja, saya kira bita-cita para ulama deklarator PKB untuk menjadikan partai ini sebagai salah satu pilar kehidupan bangsa akan lebih mungkin untuk diwujudkan. Dan saya sangat bersyukur, bahwa kepengurusan DPP PKB 2005-2010, didukung oleh kader-kader partai yang berkarakter seperti itu.

Kaderisasi Partai

Hal yang juga sangat fundamental dalam pengembangan PKB adalah soal kaderisasi yang merupakan bagian dari manajemen partai politik. Kaderisasi penting dilakukan karena empat alasan berikut. *Pertama*, alasan ideologis. Alasan ini menyangkut **pendirian** dan **identitas** partai. Pendirian dan identitas partai merupakan penerjemahan dan implementasi dari AD/ART, visi dan misi partai. Pada ujungnya, dalam kerangka ideologis, kaderisasi merupakan proses pencarian dan penguatan nilai-nilai yang menjadi kekuatan pengikat seluruh komponen Partai Kebangkitan Bangsa.

Kedua, alasan strategis. Alasan ini berkaitan dengan **kepentingan** partai, baik dalam skala nasional maupun internal. Kepentingan partai secara garis besar ada dua, yaitu kepentingan menyangkut pembagian kekuasaan (*power sharing*) dan kepentingan membangun inti kepemimpinan (*leadership*) untuk kelangsungan dan eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa di masa depan.

Power sharing berkaitan dengan pencarian dan pembagian sumber-sumber serta alokasi personil kader partai dalam struktur politik dan ekonomi nasional maupun lokal. Sedangkan *leadership* berhubungan dengan manajemen partai terutama berkaitan dengan pembangunan disiplin partai (etos), aturan main (etika), pola rekrutmen dan mekanisme internal partai (aturan).

Ketiga, alasan praktis, menyangkut **kebutuhan** partai dalam membangun militansi dan reputasi untuk menopang program-program partai dalam melakukan *power sharing* dan membangun *leadership*.

Keempat, alasan pragmatis, berkaitan dengan **tuntutan** partai dalam perjuangan politik yang oleh Partai Kebangkitan Bangsa tuntutan itu dirumuskan menjadi: melindungi hak-hak dasar warga negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kaderisasi partai dibutuhkan karena beberapa kepentingan berikut:

1. Membangun pelembagaan hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Ada realitas bahwa sirkulasi kepemimpinan partai yang tersendat
3. Ada fakta historis di masa lalu dan masa kini bahwa suara Partai Kebangkitan Bangsa terkonsentrasi di Jawa, dan terkonsentrasi lagi di Jawa Timur
4. Secara konstitusional, Partai Kebangkitan Bangsa telah memutuskan untuk menjadi partai advokasi. Namun identitas dan operasionalisasi sebagai partai advokasi belum jelas.
5. Ada kebutuhan untuk melakukan operasi politik yang terkoordinasi, sistematis dan tepat sasaran. Dan itu bisa dilakukan jika ada proses kaderisasi yang efektif dan berkelanjutan.

Ada beberapa bentuk dan pola kaderisasi yang bisa dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa. *Peratama*, kaderisasi konvensional dalam bentuk **pelatihan**. Kaderisasi ini akan membentuk **kader simpatisan**, dan sebagai awal untuk melakukan pengembangan konsep dan pengetahuan, penguatan ideologi, dan pembentukan identitas kolektif.

Kedua, kaderisasi melalui penugasan khusus. Kaderisasi ini berbentuk pemberian mandat dan tugas kepada kader untuk memetakan, melakukan penetrasi atau menguasai bidang-bidang kekuasaan tertentu baik di sektor politik maupun ekonomi. Dalam konteks sekarang, kaderisasi ini bisa dilakukan dalam proses Pilkada. Kader yang dihasilkan dari proses ini disebut **kader khusus**.

Ketiga, kaderisasi lewat proses **magang**. Partai secara sistematis dan terkoordinasi bisa memberikan kesempatan magang kepada kader untuk mempelajari, mengambil keuntungan baik secara pengetahuan maupun pengalaman, dan kalau perlu mengambil alih suatu sektor strategis yang bisa menjadi salah satu sumber dana bagi partai dan untuk kesejahteraan konstituen. Proses magang sangat penting karena keterbatasan pengalaman, ketrampilan dan dana yang dimiliki partai. Kader yang diproduksi dari proses magang adalah **kader profesional**.

Keempat, kaderisasi untuk menjadi operator politik. Tujuan pragmatis partai politik adalah mempertahankan dan merebut sumber daya ekonomi dan politik. Untuk kepentingan tersebut diperlukan operasi politik terus-menerus untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Hasil dari proses kaderisasi ini adalah **kader militan**.

Kelima, kaderisasi untuk menyiapkan organiser masyarakat. Proses ini memfokuskan pada upaya-upaya membangun pengetahuan dan ketrampilan kader partai untuk mengelola dan mengarahkan aspirasi masyarakat serta memobilisasi mereka untuk kepentingan partai dan bangsa. Kader yang dihasilkan adalah **kader penggerak**.

Itulah kerangka umum pengembangan PKB ke depan, sekurang-kurangnya pada masa kepemimpinan saya. Dengan dukungan ulama, pengurus dan kader-kader partai yang loyal, tentu terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dimaksud,

baik tujuan partai maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Jakarta, 27 September 2004

FUNDAMENTAL POLITIK PARTAI KERJA MODERN: PKB LIMA TAHUN KE DEPAN

Pengantar

Dalam suatu masyarakat demokratis partai menjembatani kepentingan-kepentingan publik (masyarakat) dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan negara. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh partai-partai yang memiliki dan melingkupi kriteria-kriteria sebagai berikut: *Pertama*, memiliki struktur dan mekanisme internal yang demokratis. *Kedua*, memiliki sistem kepemimpinan yang kuat, berkarakter, berwibawa, rasional dan kompetitif. *Ketiga*, memiliki manajemen organisasi yang profesional dan aspiratif. *Keempat*, memiliki perangkat komunikasi internal yang memadai. *Kelima*, memiliki sikap responsif, persuasif, dan cara yang khas dalam menjawab problem-problem masyarakat dan negara. *Keenam*, intensif memperluas keanggotaan partai, meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus dan aktivis-aktivis partai, serta

mampu mengembangkan aktivitas *fund raising* (penggalangan dana) yang efektif.

Tantangan Eksternal

Terkait dengan perkembangan politik Indonesia kontemporer dan juga cara masyarakat mempersepsi dan mengambil pilihan politik, terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi PKB di masa mendatang. Tantangan-tantangan itu bersumber baik dari dalam maupun dari luar lingkungan partai. Kemampuan menghadapi tantangan-tantangan itu merupakan penentu apakah PKB akan tetap eksis dan signifikan secara politik di masa-masa mendatang.

Tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungan di luar organisasi PKB di antaranya adalah:

1. *Otonomi dan independensi masyarakat.* Dalam pemilu legislatif dan presiden yang lalu, pelbagai hasil riset – dan selanjutnya dibuktikan dengan hasil pemilu – menunjukkan betapa semakin otonom dan independennya warga masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Di satu sisi hal tersebut mengindikasikan semakin rasional dan *melek*-nya warga masyarakat terhadap politik, dan pada sisi yang lain mengindikasikan semakin merosotnya wibawa-wibawa tokoh masyarakat yang menjadi patron politik.

Otonomi dan independensi masyarakat juga menandai semakin melemahnya ikatan-ikatan primordial dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dari merosotnya pengaruh

organisasi-organisasi massa terhadap warganya. Dalam situasi seperti ini, pilihan politik sudah harus menjadi urusan personal setiap warga negara, bukan sekadar urusan para tokoh atau elit-elit dalam masyarakat. Setiap orang memiliki kepentingan tersendiri dengan politik, dan karenanya politik PKB semestinya mulai mengembangkan pendekatan yang lebih personal dan berbasis lokal. Politik memang pada dasarnya adalah lokal dan personal!

Politik yang bersifat lokal dan personal adalah politik yang berorientasi pada penguatan basis lokal dengan sentuhan-sentuhan yang sejauh mungkin bersifat personal kepada pemilih. Politik nasional pada dasarnya adalah akumulasi dari berbagai aspirasi dan kepentingan lokal serta individual.

2. *Iklim kompetisi partai yang semakin ketat.* Partai-partai politik dalam pemilu lalu mengembangkan pola persaingan yang sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ini terutama menyangkut masalah pengorganisasian partai dan cara mereka merespons problem-problem masyarakat. Pada tingkat pengorganisasian, beberapa partai mengembangkan manajemen politik dan organisasi yang lebih profesional dan modern. Sementara pada tingkat *political appeal*, beberapa partai juga mengembangkan pendekatan politik yang berbeda dari yang lain.

Di tengah iklim kompetisi politik yang semakin ketat, partai tidak bisa lagi mengembangkan pola dan cara yang

sama dalam mendekati permasalahan yang ada. PKB harus tampak beda dibanding dengan partai-partai lain. Beda itulah yang kelak akan menjadi alasan mengapa orang harus memilih PKB. Beda di sini bukan saja pada aspek ideologi dan karakteristik partai, lebih dari itu harus tampak dari cara partai dan kader-kadennya bekerja dan memberikan respons terhadap permasalahan dalam masyarakat.

3. *Krisis keteladanan di kalangan pemimpin politik (social distrust)*. Pelbagai survey menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai dan para politisi semakin meningkat. *Rating*-nya berada di bawah kepercayaan mereka terhadap para pemimpin agama maupun adat. Salah satu faktor utama ketidakpercayaan masyarakat itu adalah karena para politisi cenderung tidak bisa menunjukkan keteladanan – dalam pelbagai aspeknya – kepada masyarakat. Para politisi juga terjebak untuk meminta layanan dari masyarakat ketimbang melayani mereka.

Keteladanan erat kaitannya dengan kepantasan umum (*public decency*). Tampil mewah, kalau memang mempunyai, barangkali bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi tampil mewah di tengah masyarakat yang serba sulit tentu akan dianggap tidak pantas. Kepercayaan masyarakat terhadap PKB bisa ditingkatkan manakala para politisinya bisa menjadi contoh dan rujukan masyarakat dalam pelbagai hal. Dalam politik, kepercayaan itu seperti udara. Hilang kepercayaan, hilang pula pengaruh, dan pada gilirannya tidak ada lagi kekuatan.

4. *Sistem pemilu langsung.* Perubahan sistem politik dan kepartaian nasional menegaskan diperlukannya hubungan yang lebih personal dan langsung antara para politisi dengan para pemilih. Legislatif dan eksekutif di pelbagai level mulai dipilih langsung, atau – untuk kasus legislatif – sebut saja semi langsung. Intinya, pemilih mulai memiliki peranan yang cukup menentukan mengenai siapa yang harus lolos pemilu dan siapa yang tidak. Kemungkinan ke depan, sistem pemilu langsung untuk legislatif semakin terbuka ruangnya. Mesin partai – karenanya – tidak bisa lagi menjadi tumpuan satu-satunya, tetapi ia juga harus ditopang oleh kader-kader yang mengakar dan terpercaya di tingkat masyarakat pemilih. Para pemilih mulai berorientasi kepada orang, bukan partai. Para kader dan politisi partai karenanya harus:
 - a. Memiliki kualitas tertentu – sebut saja keunggulan komparatif atau kekhususan – yang bisa diandalkan, sehingga karenanya akan dibutuhkan serta dianggap layak untuk memimpin atau menempati posisi politik tertentu;
 - b. Jujur, konsisten dan bisa menjadi teladan, sehingga karenanya akan dipercaya oleh masyarakat;
 - c. Peduli dan mau berbagi, sehingga karenanya akan dicintai oleh masyarakat.
5. *Semakin bebas dan kuatnya peranan media massa.* Media massa dewasa ini sudah berkembang menjadi rezim tersendiri yang bisa “mematikan” ataupun “menghidupkan” partai/ politisi. Hampir semua partai memiliki pengalaman baik

dan buruk berhadapan dengan “pengadilan media”. Dengan posisinya yang kuat sebagai pembentuk opini masyarakat, media massa tidak bisa dianggap remeh. Meski mungkin melakukan kesalahan dan seringkali memiliki kepentingan sendiri, media massa tetap harus dilihat secara positif sebagai alat bagi partai untuk menjangkau masyarakat (pemilih).

PKB karenanya perlu lebih pro-aktif dan agresif dalam berhubungan dengan media serta mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif dan efektif terhadap mereka. Pada saat yang sama PKB dan kader-kadernya harus memiliki kemampuan mengemas pesan politik partai dan menyampaikannya kepada publik secara tepat melalui media, agar *bias* pesan dapat dikurangi atau dihindari.

Tantangan Internal

Tantangan-tantangan dari lingkungan internal organisasi PKB di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Manajemen organisasi partai yang dilematis: antara demokrasi, efektivitas dan profesionalitas.* Terdapat dilema yang nyata ketika kinerja partai akan dijalankan secara demokratis sekaligus efektif dan profesional. Di satu sisi demokrasi seringkali membutuhkan proses panjang yang tidak efektif, karena aspirasi semua kelompok harus ditampung dan dibicarakan bersama. Di sisi lain, di tengah kecenderungan politik bermodal uang, di mana uang bisa menentukan keputusan/kebijakan, demokrasi juga

mengalami proses degradasi nilai dan manipulasi yang sulit dihindari. Karena alasan efektivitas dan disiplin serta kewibawaan partai, DPP terkadang perlu melampaui demokrasi – bukan mencederainya.

PKB memang dituntut untuk mampu membentuk konsensus politik dan merumuskan prosedur-prosedur organisasi yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Pada saat yang sama, PKB juga dituntut untuk mensinergikan karakter sebagai partai kharismatis dan partai modern, sehingga kepentingan konstituen bisa dikelola dan diperjuangkan secara maksimal, sementara disiplin partai dan etika profesional juga tetap terjaga.

2. *Kecenderungan konflik internal yang cukup tinggi.* Konflik internal dalam tubuh PKB telah menjadi fenomena umum yang mempengaruhi merosotnya citra partai di mata masyarakat. Ada banyak jenis dan sumber konflik. Jenis dan sumber konflik yang perlu untuk diwaspadai adalah konflik yang bersumber dari intervensi pihak luar terhadap urusan internal partai. Kalau konflik yang sumbernya murni internal bisa mendewasakan pelaku-pelaku politik, maka konflik yang bersumber dari intervensi pihak luar justru bersifat menghancurkan.

Konflik memang tidak selamanya harus dinilai secara negatif, karena di dalamnya mengandung proses pembelajaran bagi partai untuk bisa mengelolanya secara produktif. Kalau hal demikian bisa dicapai, maka konflik bisa ditransformasi-

kan sebagai salah satu sumber dinamika internal partai, sehingga PKB bisa membangun struktur dan mekanisme politik internal yang kokoh dan mempunyai daya tahan.

3. *Kinerja anggota legislatif PKB yang belum optimal.* Meski jumlah kader partai yang *performed* di DPR/DPRD terus meningkat, secara umum kinerja anggota legislatif PKB dianggap belum optimal oleh konstituen. Baik optimal dalam pengertian memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun memenangkan agenda partai melawan agenda partai-partai lain. Faktornya antara lain menyangkut soal kapasitas praktis kader legislatif dalam hal legislasi, *budgetting*, pengawasan maupun representasi politik; mekanisme koordinasi partai-fraksi-anggota; persuasi politik ke publik yang lemah; dan *packaging* pesan media yang kurang serius.

PKB harus mulai meningkatkan kapasitas praktis (sebagai legislator) bagi para kader legislatifnya, membangun sistem komunikasi yang efektif antara partai-fraksi-anggota; mengembangkan persuasi politik ke publik yang lebih bersifat personal; serta mengembangkan hubungan yang lebih produktif dengan media.

4. *Meningkatnya tuntutan peningkatan peran kaum muda dan perempuan dalam partai.* Promosi peran kaum muda dan perempuan adalah kemestian bagi partai politik yang demokratis. Di banyak negara, promosi kaum muda dan perempuan menjadi bagian dari strategi dasar regenerasi

partai, sehingga *survival* partai dapat lebih diukur dari waktu ke waktu. Keterlambatan dalam pemberian promosi peran kaum muda dan perempuan menyimpan bahaya terputusnya regenerasi partai pada kurun waktu tertentu dan menyuburkan oligarki yang secara jelas merusak bangunan organisasi partai.

PKB tidak boleh terlambat dalam hal ini. Sudah saatnya partai membangun mekanisme promosi peran kaum muda dan perempuan di pelbagai level kepengurusan dan memberi kesempatan pada mereka untuk berinvestasi secara politik di dalam partai. Energi kaum muda dan perempuan ibarat bensin bagi mobil partai. Mereka ini pula yang diharapkan dapat menjaga partai agar terhindar dari konservatisme politik yang nyata-nyata tidak 'nyambung' dengan perubahan dalam masyarakat. Sebagai tambahan, pemilih pemula dan perempuan di Indonesia adalah yang terbesar dari seluruh segmen pemilih yang ada. Keberadaan kaum muda dan perempuan dalam partai akan meningkatkan ikatan psiko-politik pemilih dengan partai.

5. *Kaderisasi politik partai yang belum sistematis dan terarah.* Kaderisasi merupakan hal esensial bagi partai. Kaderisasi dapat menjadi media rekrutmen anggota, pemeliharaan anggota dan sekaligus media peningkatan kapasitas anggota dan kader partai dalam pelbagai aspeknya, terutama kapasitas praktis sebagai politisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kader partai yang ideologis dan handal hanya bisa diperoleh

melalui proses kaderisasi yang sistematis dan terarah. Kader tidak mungkin begitu saja jatuh dari langit, tetapi ia perlu diproses, dilahirkan.

PKB sudah saatnya memaksimalkan proses kaderisasi partai di pelbagai level kepengurusan, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat nasional. Sistem kaderisasi yang komprehensif dan aplikatif karenanya perlu dirumuskan dan dijalankan sebagai salah satu prioritas program. Kader-kader pelatih atau fasilitator juga harus dicetak agar tersedia sumber daya internal untuk memfasilitasi proses-proses kaderisasi. Mereka ini bisa sekaligus disiapkan sebagai kader-kader ideolog yang akan berkeliling dan memperkuat moral politik serta kemampuan praktis anggota dan kader partai di pelbagai tempat.

Kaderisasi partai semestinya mencerminkan prinsip: (1) Representasi, artinya kader-kader yang direkrut mewakili keragaman sosio-kultural masyarakat Indonesia dengan tetap menempatkan kader-kader NU sebagai kekuatan utama dan yang non-NU sebagai kekuatan pendukung; (2) Kompetensi, artinya perekrutan kader harus mempertimbangkan aspek kemampuan profesional atau keunggulan komparatif dari kader yang direkrut; dan (3) Konstituensi, artinya kader-kader yang direkrut adalah mereka-mereka yang memiliki basis massa dan/atau yang memiliki komitmen dan kesungguhan untuk membangun basis massa guna membesarkan partai. Ketiga prinsip

tersebut semestinya menjadi pertimbangan dasar baik dalam rekrutmen maupun promosi kader ke posisi-posisi strategis di dalam atau di luar partai.

6. *Pendekatan politik partai yang masih konvensional.* PKB hampir tidak beda dengan kebanyakan partai yang masih bertumpu pada pendekatan konvensional dalam politik. Kampanye, misalnya, lebih banyak dipahami terbatas pada masa kampanye pemilu belaka. Caranya pun konvensional seperti pawai, *dangdutan*, konvoi dan sebagainya. Politik PKB masih merupakan politik ‘*grubryak-grubryuk*’, keroyokan. Belum mengandalkan kemampuan personal kader dalam merespons isu-isu yang berkembang. Pesan politik yang dikembangkan juga pada umumnya tidak memiliki kontras dengan yang lain dan kurang menyentuh “kepala” dan hati warga masyarakat. Politik modern, sekali lagi, lebih bertumpu pada: (a) kualitas personal kader, (b) profesionalisme organisasi partai dan (c) pendekatan yang lebih personal pada pemilih. Kampanye *door-to-door* (*canvassing*) sudah semestinya dikembangkan dan diintensifkan untuk mendekati pemilih, karena cara ini bersifat personal dan terukur secara politik. Di atas semua itu, kampanye politik haruslah tidak ditunda-tunda. Ia tidak dimulai pada saat pemilu saja. Kampanye politik dimulai begitu pemilu berakhir, dan tiada hari tanpa kampanye politik.
7. *Desentralisasi politik partai yang belum optimal.* Sejalan dengan otonomi daerah, desentralisasi partai juga perlu

ditingkatkan, karena sentralisasi yang berlebihan menjadi tidak produktif bagi perkembangan partai. Sentralisasi, di mana-mana, mematikan prakarsa dan inisiatif. Padahal politik adalah kreativitas dan prakarsa. Tanpa itu politik hanya akan menjadi urusan administratif yang membosankan dan tidak menarik bagi masyarakat. Oleh karenanya, desentralisasi dan otonomi perlu diperluas dalam hubungan antar struktur partai, terutama antara DPP dengan struktur-struktur di bawahnya. Dengan otonomi, maka partai di daerah akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Dengan otonomi pula maka responsivitas partai terhadap isu-isu kemasyarakatan dapat berlangsung lebih cepat. Agar otonomi tidak merusak etika politik, maka dalam otonomi harus tetap ditegakkan disiplin partai.

8. *Mobilisasi sumber daya partai yang belum cukup efektif.* Masalah ini lebih terkait dengan soal manajemen. Hal ini tampak misalnya dalam pemilu lalu, di mana tumpang tindih, duplikasi program, dan semacamnya membuat sumber daya partai banyak terhambur dan hasilnya tidak sesuai harapan. Prioritas semestinya harus dicanangkan dan dilaksanakan secara konsisten. Perencanaan strategi dan program partai harus dibuat lebih sistematis dan terukur. *Assessment* terhadap sumber daya partai dan perumusan sistem alokasi sumber daya menjadi penting untuk memastikan

setiap sumber daya yang keluar menghasilkan *output* sebagaimana diharapkan.

9. *Penyebaran kader-kader handal yang belum merata.* PKB memang memiliki kader-kader handal, akan tetapi selain jumlahnya terbatas, posisinya juga cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pembentukan dan kemudian penyebaran kader-kader yang handal diperlukan untuk memastikan setiap level kepengurusan partai memiliki motor penggerak yang efektif. Kaderisasi dan pendidikan politik yang diiringi dengan sistem promosi dan distribusi kader yang efektif dan demokratis sangat dibutuhkan ke depan. Pada saat yang sama, kader-kader yang sudah ada, dengan kompetensi masing-masing, perlu segera dikonsolidasikan dan dipromosikan ke posisi-posisi strategis kekuasaan, bisnis dan jika mungkin juga militer.

Isu-isu Strategis Ke Depan

1. *Pembenahan manajemen organisasi partai.* Intinya adalah memastikan partai melembagakan prinsip-prinsip demokrasi dalam segenap prosedur dan mekanisme partai. Termasuk di dalamnya adalah sistem administrasi, keuangan dan mekanisme komunikasi internal yang melibatkan segenap elemen partai berikut anggota-anggota partai. Semua aspek itu perlu dikembangkan dalam kerangka penegakkan disiplin partai yang demokratis dan profesional.

2. *Penguatan struktur organisasi partai.* Intinya adalah memastikan bahwa struktur partai menjangkau setiap daerah (geografis) dan segmen-segmen dalam masyarakat (sektoral). Struktur partai juga harus mulai membedakan antara tempat para politisi dan tempat para birokrat (partai) profesional yang dibayar untuk mengelola organisasi. Pertimbangan lain dalam penguatan struktur partai adalah meningkatkan keterkaitan struktur partai dengan kenyataan posisi PKB yang berada di luar kekuasaan.
3. *Pembentukan sistem kaderisasi dan pelaksanaannya secara intensif.* Intinya adalah membenahi rancangan sistem kaderisasi di pelbagai tingkatan kepengurusan dan memastikan sistem itu – serta kaderisasinya sendiri – terlaksana dengan baik. Orientasi kaderisasi setiap level kepengurusan harus berbeda-beda tekanannya, disesuaikan dengan kebutuhan politik setiap level kepengurusan. Di tingkat desa/kelurahan, misalnya, kaderisasi harus diarahkan pada pembentukan kader-kader yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara intensif dengan masyarakat dan kemampuan yang handal untuk melayani mereka.
4. *Pembentukan sekolah politik dengan modul-modul yang berbeda.* Berbeda dengan kaderisasi yang mirip sekolah umum, maka sekolah politik adalah semacam sekolah kejuruan politik. Modul-modul yang dikembangkan juga harus spesifik dan khas. Misalnya: modul khusus calon

ideolog partai, modul khusus untuk anggota legislatif, modul khusus untuk organiser partai, modul khusus untuk propagandis partai dan seterusnya.

5. *Pengembangan media pendidikan politik dan propaganda partai.* Terbitan-terbitan berkala yang sederhana dan murah perlu diproduksi secara reguler untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas politik kader. Ia juga dapat dipakai sebagai alat untuk memelihara hubungan dengan kader, anggota dan para simpatisan partai.
6. *Pengembangan kebijakan politik yang responsif terhadap masalah-masalah masyarakat.* Intinya diperlukan suatu kebijakan politik partai yang bisa menjadi dasar dan motivasi segenap pengurus dan kader partai untuk cepat tanggap terhadap perkembangan dan masalah yang muncul dalam masyarakat. Panduan praktis mengenai hal ini mungkin juga diperlukan untuk memandu bagaimana kader partai mesti bersikap dan bertindak dalam situasi-situasi krisis di masyarakat.

Strategi Politik Memenangkan Pertarungan: Dari “Politik Kerumunan” ke “Politik Organisasional”

PKB secara nyata berada di luar kekuasaan. Mengembangkan diri sebagai partai profesional yang bisa secara intensif dan persuasif menggalang dukungan publik merupakan keniscayaan.

Dalam rancang-bangun sistem politik nasional yang tidak mengenal dikotomi partai oposisi dan partai pemerintah, maka PKB memutuskan diri untuk menjadi “partai advokasi”.

Bagi PKB, pilihan menjadi partai advokasi merupakan bentuk implementasi dari kepemimpinan politik partai melalui peran-peran mediasi politik yang diorientasikan pada realisasi kaidah fiqih yang berbunyi: *tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manuutun bil-maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyat harus diarahkan untuk kemaslahatan). Kemaslahatan dalam pengertian politik PKB mengandung dua arti, yaitu mensejahterakan masyarakat (*ath’amahum min al-ju’*) dan melindungi hak-hak mereka (*amanahum min al-khauf*).

Konsekuensi politis dan organisatoris sebagai partai advokasi, maka PKB harus segera melakukan reorientasi gerakan politiknya dari “politik kerumunan” ke “politik organisasional”. “Politik kerumunan” berarti gerak politik yang berbasis isu, momentum dan kepentingan jangka pendek, sementara “politik organisasional” merupakan gerak politik yang bersandar pada perjuangan kepentingan bersama yang bersifat strategis, jangka panjang dan terlembaga dalam organisasi partai.

Dalam konteks PKB, kepentingan bersama itu mencakup kepentingan konstituen partai, para kiai dan ulama, kader dan pengurus partai, serta kepentingan bangsa pada umumnya yang dibingkai dalam kerangka perjuangan organisasional partai. Inilah kolektivitas baru yang hendak diwujudkan PKB. Harapannya, PKB menjadi partai yang kuat secara organisasi,

benar-benar berskala nasional, dekat dengan rakyat (konstituen), serta efektif dalam pelbagai bentuk negosiasi kebijakan.

Berikut ini adalah beberapa hal strategis yang perlu dipersiapkan dan diwujudkan sebagai syarat-syarat minimal untuk mendukung perjuangan politik PKB sebagai partai advokasi:

1. *Badan riset yang kuat dan profesional.* Informasi merupakan komoditas dan sekaligus kebutuhan mendasar dalam politik modern. Tanpa informasi yang akurat, tidak akan ada kredibilitas. Tanpa kredibilitas, pemilih tidak akan menoleh kepada partai non-pemerintah. Badan riset memainkan peranan menyediakan informasi dan hasil riset yang akurat berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dari informasi dan hasil riset badan riset partai, maka pengurus partai dan anggota legislatif PKB dapat mengajukan *counter policy* kepada masyarakat, untuk menandingi konsep kebijakan pemerintah. Badan riset ini bukan seperti badan riset akademis, melainkan politis tetapi dengan metode kerja yang ilmiah dan objektif.
2. Politik anggaran yang sinergis-kolaboratif. Politik anggaran merupakan bentuk gerak politik bersama dan sinergis, berbasis kolektivitas organisasional, dengan memanfaatkan pintu kebijakan perencanaan pembangunan (UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), keuangan negara (UU No. 17/2003), perbendaharaan negara (UU No. 1/2004) serta bentuk pengawasannya (UU No.

15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara). Masyarakat dapat memberikan usulan terhadap rencana kerja pemerintah (pusat dan daerah), pagu anggaran, RAPBN atau RAPBD, *delivery system* (sistem penyampaian) dan pengawasannya. Bentuk kerjasamanya adalah kolaborasi antara elemen partai, wakil-wakilnya di DPR dan DPRD serta birokrasi yang mendukung cita-cita PKB.

Dengan demikian, bentuk kerja sama di antara elemen-elemen partai dari pelbagai level dengan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam memastikan alokasi dan distribusi anggaran negara melayani kepentingan konstituen partai menjadi niscaya adanya. Komunikasi, koordinasi dan sinergi gerakan bersama dalam soal ini akan membuat partai dapat melayani kebutuhan pemilih/masyarakat yang bersifat jangka pendek, menengah dan panjang.

Politik anggaran adalah cara partai politik dan wakil-wakilnya di badan legislatif dalam negara demokrasi memenuhi dan melayani kepentingan konstituen. Tuntutan dan permintaan dari konstituen biasanya sangat banyak dan beragam. Seorang politisi dan anggota legislatif tidak mungkin memenuhi kepentingan mereka secara individual. Kerja kolektif di antara seluruh elemen partai dan wakilnya di badan legislatif memungkinkan seorang politisi atau anggota DPR/DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

melayani pemilih dengan optimal. Membantu pemilih tidak dilakukan dengan memberikan uang kepada mereka, melainkan dengan memfasilitasi akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dan politik. Politik anggaranlah yang memungkinkan seorang politisi atau anggota legislatif melaksanakan itu. PKB, sebagai partai yang peduli pada peningkatan kualitas hidup pemilihnya, harus membangun konsensus dan merumuskan prosedur tentang bagaimana politik anggaran itu dijalankan dengan baik dan transparan.

3. *Organisasi sektoral pendukung.* Pendukung dan simpatisan partai perlu diwadahi dalam organ-organ sektoral tertentu yang memungkinkan mereka mengakses partai dan berkarya untuk partai dalam pelbagai bentuknya. Sektor-sektor strategis dalam masyarakat seperti buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, kaum profesional, dan lain-lain harus dijangkau seluas mungkin melalui organ pendukung sektoral ini. Bagi partai di luar pemerintahan, organisasi pendukung sektoral ini adalah alat tekan pada suatu momentum penting tertentu. Posisi organ sektoral pendukung tidak harus formal di bawah partai, tetapi harus secara tegas berafiliasi secara politik kepada PKB.
4. *Jaringan dan strategi media yang tepat.* Salah satu kunci keberhasilan partai non-pemerintah adalah apabila ia dapat bersinergi dengan kepentingan media massa. Media massa adalah alat utama komunikasi politik partai non-pemerintah

kepada publik. Tanpa media, kerja-kerja partai non-pemerintah tidak akan punya pengaruh dan pada gilirannya sia-sia. Jaringan media karenanya harus diperluas dan PKB harus mencoba menjadi *trend-setter* di luar pemerintah yang selalu memasok isu-isu yang bernilai berita kepada media massa. Strategi media diperlukan untuk memastikan media memberi tempat memadai terhadap aktivitas PKB dan memastikan pemberitaan mereka selaras dengan harapan partai.

5. *Distribusi peran kader di pelbagai lini.* Partai di luar pemerintahan membutuhkan penguasaan medan yang luas dan penempatan artikulatur politik partai di segala lini. Sehingga tidak secuil pun gerak pemerintah luput dari pengawasan dan pengawalan partai yang berada di luar pemerintahan. PKB karenanya harus memiliki SDM artikulatur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kemampuannya berdebat, berwacana dan mengajukan alternatif kebijakan partai yang berbeda dengan pemerintah di semua bidang strategis. Diperlukan penataan menyeluruh dan konsolidasi sumber daya yang tersedia dan penguatan kapasitas mereka sesuai dengan lini-lini strategis yang hendak dikuasai partai.

Dengan semangat dan komitmen seperti itu, PKB bisa tetap eksis membawa manfaat (*maslahah*) bagi masyarakat dan bangsa, konsisten dengan ideologi yang bersandar pada *mabda' siyasy* yang dirumuskan para tokoh pendiri dan ulama

deklarator PKB, mampu melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan persoalan internal dan masyarakat, serta bisa menyikapi perubahan dengan produktif tanpa harus kehilangan tradisi besar dan identitas kolektifnya. (*)

Jakarta, 15 April 2005

- 5 -

SENTRALISME DEMOKRATIS, “MEDIAKRASI”, DAN KEPEMIMPINAN POLITIK VISIONER

Sentralisme Demokratis

Salah satu komitmen tokoh pendiri dan ulama deklarator PKB adalah mewujudkan tegaknya demokrasi, politik dan aturan main dalam percaturan politik di bumi Indonsia. Tegaknya aturan main, etika politik dan prinsip-prinsip demokrasi menjadi salah satu komitmen strategis PKB karena tanpa ketiganya proses politik bisa menjadi kontra-produktif terhadap cita-cita PKB dalam rangka menjaga hak-hak politik warga negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, komitmen kepada demokrasi sudah menjadi pilihan hidup para tokoh-tokoh PKB sejak awal 1980-an, terutama KH Abdurrahman Wahid, ketika banyak orang justeru takut untuk membicarakan dan memperjuangkannya karena tekanan rezim yang berkuasa.

Meski demikian, dalam pandangan saya, PKB menempatkan demokrasi bukan sebagai tujuan, melainkan sebuah sarana, *wasilah*, untuk mencapai tujuan itu sendiri. Ibarat syariat yang harus ditempatkan sebagai jalan untuk mencapai tujuan-tujuan mulia dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, bukan tujuan beragama itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu terjebak dan terkecoh dengan menjadikan alat, sarana atau jalan sebagai tujuan. Karena itu, PKB tidak perlu menghabiskan seluruh energinya untuk membicarakan sarana atau alat itu yang akan membuatnya kehilangan orientasi, fokus dan keluar dari tujuan kolektif yang sudah menjadi konsensus bersama seluruh komponen partai. Dalam beberapa hal, kita perlu melampaui demokrasi, bukan mencederainya. Kita perlu malampaui syariat tanpa harus meninggalkannya, untuk mencapai hakikat dan sekaligus ma'rifat. Ini memang bukan hal mudah, tetapi harus dilalui untuk menjadi partai yang berhasil dan syarat menjadi bangsa yang besar.

Untuk itu, dalam kehidupan organisasi dan kepartaian, termasuk di dalam PKB, dibutuhkan garis komando yang jelas. Dibutuhkan kolektivitas dan loyalitas. Dalam beberapa hal partai perlu dijalankan dengan garis komando yang memungkinkan kerja partai berjalan efektif, karena menyerahkan proses politik sepenuhnya kepada mekanisme demokrasi yang cair justru akan membawa sistem kepada situasi kacau (*systemic chaos*), padahal ulama kita terdahulu dari kalangan *Ahlus Sunnah wal Jamaah* sudah secara tegas menggariskan bahwa tidak mungkin keadilan

dan kesejahteraan bisa diwujudkan dalam suasana kacau (*la 'adla ma'al-faudla*). Dalam kata lain, kehidupan organisasi perlu ditegakkan dalam prinsip sentralisme demokratis. Dengan mekanisme seperti juga, kita melihat Cina, Malaysia, Iran atau Rusia hari ini menjadi kekuatan penting dalam percaturan geopolitik internasional sekaligus sukses membangun politik dan ekonomi nasional yang melindungi kepentingan warga negaranya.

Dalam tahun pertama kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Semarang, sudah tercatat sudah ada 33 kegiatan berskala nasional yang diselenggarakan oleh DPP PKB. Mulai dari Mukernas, Halaqah Politik Walisongo, Deklarasi *Islam for Peace*, Kaderisasi Nasional, pelatihan-pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berdimensi strategis. Hal ini membuktikan bahwa DPP PKB tetap solid dan mendapat dukungan riil dari para ulama dan warga PKB serta masyarakat luas. Saya percaya bahwa PKB adalah partai yang besar dan sudah teruji terhadap berbagai rongrongan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Berbagai upaya memecah belah PKB hanya akan menghasilkan gejala di permukaan, tetapi tidak sampai merusak ruang batin dan ikatan historis-kultural dalam masyarakat dan warga PKB, karena PKB mewarisi tradisi Islam yang panjang dan mewakili budaya Nusantara yang mengakar dalam kesadaran psiko-historis masyarakat yang ada.

Kegiatan-kegiatan tersebut bukan lagi sekadar proses pembelajaran demokrasi, atau sosialisasi program partai, tetapi

yang lebih penting adalah bagaimana dengan aktivitas tersebut bisa dibangun tradisi politik yang kokoh, program partai yang jelas, terukur dan nyata dampaknya bagi masyarakat, serta terbentuk kepemimpinan kuat, berkarakter dan visioner.

Salah satu fokus saya ketika dicalonkan sebagai Ketua Umum DPP PKB satu tahun yang lalu adalah mewujudkan PKB sebagai partai yang memiliki basis pengetahuan yang kokoh sekaligus daya kolektivitas yang produktif sehingga keberhasilan program PKB tidak semata-mata ditentukan oleh integritas dan kapabilitas para pelaku politiknya, tetapi juga oleh kerjasama antar-sektor, antar-bidang, antar-daerah dan antar-lembaga. Forum Kerjasama Program (FOKSAM) yang dibentuk oleh DPP PKB pada awal tahun 2006 -- yang menjadi lembaga mediasi antara anggota/pimpinan DPRD dan pejabat eksekutif (bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, gubernur/wakil gubernur), baik yang berasal dari PKB maupun partai lain -- merupakan salah satu media dan upaya dalam rangka mewujudkan sinergi bagi terlaksananya program PKB di berbagai tingkatan dan daerah secara terpadu.

PKB harus konsisten dan *full speed* untuk menjalankan agenda-agenda utamanya dan berkonsentrasi kepada program-program partai, karena tanpa konsistensi itu, bukan saja PKB telah mengingkari mandat dari masyarakat/umat, tetapi juga potensial memunculkan citra elitisme yang tentu tidak menguntungkan PKB ke depan sebagai akibat munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada partai. Karena realisasi pro-

gram partai merupakan alasan dari keberadaan (*raison d'être*) partai itu sendiri. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa PKB sebagai partai besar tidak terpengaruh oleh gejolak baik yang sifatnya internal maupun eksternal, karena bagi PKB, konflik ataupun perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari pendewasaan dan pematangan berpolitik aktivis partai dan masyarakat luas.

Jebakan “Mediakrasi”

Alasan lain yang tidak kalah urgensinya mengapa PKB harus fokus dan konsisten kepada realisasi program adalah karena seringkali kita bisa dengan mudah dijebak, diprovokasi dan dikendalikan oleh pihak luar, terutama media, sehingga program-program PKB terbengkalai sementara kita justeru sibuk dengan isu-isu dan persoalan yang tidak strategis. PKB harus mempunyai filter dan kanal yang jelas agar tidak terjebak dalam isu-isu atau gosip yang tidak fundamental atau masalah *remeh-temeh*. Masalah yang ramai dibicarakan dan menghabiskan waktu serta memunculkan kontroversi/polemik luas belum tentu merupakan masalah strategis/urgen yang sedang dihadapi masyarakat/bangsa dan perlu penanganan segera. Persoalan seperti penerbitan *Playboy* versi Indonesia atau goyang dangdut Inul dkk, biarlah diurus oleh mereka yang memang *concern* dengan masalah-masalah seperti itu. Sementara PKB tetap fokus pada agenda besarnya dan persoalan-persoalan strategis

menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan kemandirian bangsa.

PKB yakin bahwa dengan tradisinya yang panjang, para ulama sudah mempunyai nalar dan cara sendiri bagaimana memaknai itu semua. FKB dan PKB tidak perlu terjebak dalam tabir asap (*smoke screen*) atau gejolak di permukaan. PKB harus melihat masalah pada akar masalahnya. Masalah tidak cukup dilihat dari orang per orang atau kelompok per kelompok. Masalah perlu dilihat secara utuh, yaitu dengan melihat struktur yang bergerak dan struktur yang menggerakkannya. Dengan begitu kader-kader dan pemimpin PKB tidak akan mudah terkecoh dalam apa yang oleh sementara kalangan disebut sebagai mediakrasi (“kedaulatan ada di tangan media” atau “pemerintahan oleh media”).

Dalam era yang sering disebut sebagai “abad informasi” ini, peranan media massa memang sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sehingga, kajian-kajian sosial-politik tentang kelompok elit strategis seringkali juga menyertakan unsur ini dalam analisisnya.

Pada awalnya, seperti dirintis oleh Gaetano Mosca dalam bukunya *The Ruling Class*, yang dikategorisasikan sebagai kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) di luar pemerintahan adalah semua aktivitas manusia yang mempunyai signifikansi sosial, seperti uang, tanah, tentara, agama, pendidikan, dsb. Merekalah kelompok yang disebut sebagai elit atau kelompok berpengaruh.

Namun kategori Mosca itu sepertinya lebih mengacu kepada struktur masyarakat agraris-tradisional, atau bahkan feodal. Dalam masyarakat yang sudah lebih modern, kekuatan-kekuatan sosial yang memiliki pengaruh luas dan besar ditambah oleh beberapa varian baru seperti bank, industri dan media komunikasi massa. Kelompok seperti inilah yang kemudian disebut sebagai “*strategic elites*”.

Dimasukkannya media massa dalam kategori kelompok yang berpengaruh besar tidak lain karena memang media mempunyai kekuasaan untuk menyediakan, menentukan, mengendalikan persepsi atau pemahaman masyarakat tentang suatu fakta/persoalan dengan sajian informasinya. Media massa-lah yang pada akhirnya cenderung menjadi rujukan dan sekaligus wasit bagi masyarakat luas tentang berbagai hal menyangkut kehidupan orang banyak. Media bisa membuat hal yang tidak penting menjadi begitu penting, hal yang tidak faktual menjadi (seolah-olah) faktual, membuat “orang baik” menjadi jahat. Pendek kata media bisa membunuh karakter seseorang atau kelompok, termasuk partai politik, dengan informasinya yang *bias* dan sepihak. Tetapi media juga bisa melakukan hal yang sebaliknya.

Ketergantungan masyarakat modern kepada informasi media massa juga semakin menguatkan kecenderungan “otoritarianisme media” dalam mempengaruhi pikiran dan kesadaran masyarakat. Memori masyarakat yang cenderung pendek juga sangat rentang terhadap provokasi media massa.

Dalam kehidupan politik Indonesia masa kini, media massa pun mempunyai peran yang sangat menentukan. Contoh yang sederhana misalnya pada kasus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dirasa sangat memberatkan masyarakat pada Oktober 2005 yang lalu. Ketika tiba-tiba terjadi kasus bom di Bali sehari setelah kenaikan harga BBM, maka media massa tidak lagi memberi informasi yang cukup untuk masyarakat yang menolak kenaikan BBM dan dampak kenaikan tersebut terhadap pendapatan dan daya tahan ekonomi rakyat, karena media sibuk dengan informasi bom Bali. Peristiwa bom Bali merupakan keprihatinan bangsa, tetapi masalah kenaikan BBM juga menyangkut kehidupan seluruh bangsa.

Begitu juga ketika tarik-ulur masalah pengelolaan Blok Cepu antara Pertamina dan Exxon Mobil terjadi, beberapa media pun menggeser perhatian masyarakat kepada masalah pembahasan Rancangan Undang-undang Pornoaksi dan Pornografi, seolah-oleh masalah yang disebut terakhir jauh lebih penting dibandingkan dengan hal yang menyangkut masalah hajat hidup orang banyak, yang dalam istilah usul al-fiqh masuk dalam kategori kebutuhan asasi (*ad-dlaruriyyat*). Dengan demikian, berita-berita media massa bisa menjadi proses pengalihan informasi yang sangat canggih, sehingga orang kehilangan fokus, dan lupa akan masalah mendasar yang dihadapinya untuk kemudian sibuk dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak strategis.

Karena itu, setiap pemimpin, tokoh agama, politisi, aktivitas dan masyarakat -- terutama kader PKB -- harus mempunyai keawasan dan kebijaksanaan dalam menerima dan mengolah informasi. Informasi seharusnya diolah menjadi pengetahuan (*knowledge*). Pengetahuan menjadi dasar bagi pengambilan sebuah sikap atau keputusan. Namun, realisasi dari keputusan atau sikap tersebut harus berdasarkan pada kebijaksanaan (*wisdom*), bukan karena mengikuti teori atau prosedur semata. Tanpa keawasan dan kebijaksanaan, kita sebagai bangsa akan selalu kehilangan kontak dengan cita-cita besar dan tujuan didirikannya Republik ini, terputus dengan aspirasi kepentingan fundamental masyarakat yang terus berubah dan semakin kompleks baik karena kuantitas persoalan yang dihadapi maupun karena semakin bertambahnya populasi di kawasan yang secara geografis justru semakin menyempit.

Kepentingan Nasional

Ideologi besar dunia yang dianut oleh berbagai negara dengan segala variannya telah dan terus mengalami revisi guna menjaga dan melindungi kepentingan nasional (*national interest*) negara bersangkutan. Kapitalisme misalnya terus mengalami revisi, demikian juga anak kandungnya yang dikenal dengan neo-liberalisme. Sosialisme dengan *welfare state* yang banyak dianut negara Eropa Barat juga terus direvisi untuk kepentingan nasional dan sekaligus membedakan diri dengan Amerika. Cina lain lagi menganut apa yang ditakakan sebagai sosialisme pasar yang

terkenal dalam istilah “satu negara dua sistem”, dan terbukti membawa hasil yang memuaskan.

Dengan ideologi berikut revisinya sesuai kebutuhan masyarakat dan kepentingan nasionalnya itulah negara-negara tersebut bisa menjalankan fungsinya terhadap masyarakat dan eksis dalam pergaulan internasional di tengah tata sistem dunia yang mengalami pasang-surut hegemoni.

PKB juga perlu secara terus-menerus merumuskan ideologi nasional terutama di saat partai-partai politik dan komponen bangsa yang lain semakin larut dalam arus hedonisme dan pragmatisme politik. Pada saat yang sama PKB perlu memikirkan dan merumuskan ulang bangunan sistem politik nasional. Demokrasi tidak dengan sendirinya bisa mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah masalah pemekaran. Kita tahu, pada awal 2006 ada 110 kabupaten/kota dan 20 provinsi yang proses pemekarannya ditunda. Beberapa wilayah memang mendesak untuk dimekarkan, karena berbagai alasan mendasar yang bisa diterima. Tetapi ada juga wilayah yang tidak mendesak dimekarkan, karena niat pemekarannya adalah mencari kesempatan atau celah untuk menarik dana dari APBN, sehingga akan sangat memberatkan negara. Beberapa daerah yang sudah terlanjur dimekarkan ternyata juga kurang optimal dalam pemberdayaan dan pembangunan daerah, baik karena alasan SDM maupun sumber daya alam lokal yang terbatas. Karena itulah, sistem politik nasional kita perlu dirumuskan kembali

secara menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah masalah otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan dan direstrukturisasi - baik pada level horizontal menyangkut hubungan antar-lembaga negara maupun vertikal terkait hubungan antara pemerintah pusat dan daerah -- untuk mencegah Balkanisasi dan Afrikanisasi di Republik ini.

Ancaman terhadap NKRI juga muncul dari lemahnya pertahanan atas wilayah-wilayah kepulauan kita. Fakta sudah menunjukkan pulau-pulau terluar di Indonesia bisa dijualbelikan dengan mudah oleh orang per orang. Beberapa pulau juga diiklankan untuk dijual. Realitas ini merupakan hal yang naif dan memprihatinkan, karena sebagai negara kepulauan kita justru kurang membangun kesadaran maritim dan memperkuat pertahanan dan penjagaan di wilayah laut dan pulau-pulau yang ada.

Dalam konteks ini, selain membentuk forum-forum semacam FOKSAM, PKB juga harus membangun hubungan baik dan jaringan dengan berbagai kekuatan strategis di Indonesia, termasuk dengan negara luar dalam kerangka hubungan bertetangga yang baik (*good neighborhood*). Forum-forum, jaringan dan kerjasama itu dibentuk bukan sekadar untuk mengawal dan merealisasikan program-program PKB, tetapi dalam jangka panjang diorientasikan untuk menjaga kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan nasional di tengah percaturan geopolitik antar-negara. Hanya dengan

orientasi seperti itulah, program-program partai yang dijalankan atas nama agenda partai dalam jangka panjang akan memperkokoh dan merengkuh seluruh sumberdaya nasional sehingga memperkuat identitas, kemandirian, kedaulatan dan kemakmuran bangsa di masa depan.

Cita-cita utama para pendiri bangsa (*the founding fathers*) ketika meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan dan kebangsaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia -- sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 -- adalah (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan dan perdamaian abadi.

Fokus pada masalah dasar dan kepentingan nasional bisa dijaga jika partai dan bangsa ini memiliki kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang demikian memungkinkan kita bisa awas melihat gerak struktur sejarah, bijak dalam membuat keputusan, peka terhadap krisis, dan tanggap menghadapi situasi darurat.

Tanpa bisa menjaga dan memahami secara menyeluruh kepentingan nasional kita sendiri, maka kehidupan kita sebagai bangsa akan berjalan kontraproduktif terhadap cita-cita besar partai itu sendiri. Secara tidak disadari, kita secara kolektif terus mengabdikan kepada kepentingan lain dari luar. Sesuatu yang tidak kita inginkan, tentunya.

PKB DAN POLITIK PEMUDA

Idealisme Pemuda dan Perubahan Politik

Di berbagai belahan dunia sejarah membuktikan gerakan pemuda (*youth movements*) -- termasuk di dalamnya gerakan mahasiswa -- seringkali memelopori perubahan penting dalam suatu masyarakat atau bangsa, bahkan menjadi kekuatan utama yang melahirkan revolusi yang pada gilirannya membentuk tata kehidupan baru dalam suatu masyarakat. Revolusi pemuda di Prancis tahun 1968 misalnya bukan hanya melahirkan tatanan politik baru di negara itu, tetapi juga melahirkan gagasan-gagasan besar yang baru seperti feminisme, gerakan anti-nuklir dan ekologisme [Robert Gildea, "French Student Revolt", dalam Jack A Goldstone (ed.), *The Encyclopedia of Political Revolution*, Chicago & London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1998, hlm. 185-186].

Potensi tersebut dimiliki pemuda dan kaum muda pada umumnya karena kelompok ini secara umum masih penuh dengan idealisme, semangat revolusioner dan cenderung tidak

sabar dengan perubahan yang dinilai terlalu lambat. Di masa transisi dari remaja menuju dewasa, pemuda selalu berada dalam perasaan sebagai manusia ideal karena masih bersih dari kepentingan politik kekuasaan. Yang dilakukan lebih merupakan aktualisasi diri, sehingga kepentingan kekuasaan dianggap sebagai tahapan yang terlalu jauh.

Sejarah pemuda di Indonesia juga menghadirkan idealisme berikut perubahan revolusioner yang mengesankan. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 melahirkan nasionalisme bentuk baru dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pemuda juga yang mendesak segera diumumkannya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, di saat kaum tua masih ragu-ragu untuk mengumumkannya. Benedict R O'G Anderson mencatat dalam bukunya, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946* (Cornell University Press, 1972), bahwa pemuda merupakan kekuatan politik yang paling menonjol pada masa revolusi menjelang dan setelah kemerdekaan. Demikian juga pada masa-masa transisi penting seperti tahun 1966 dan tahun 1998.

Namun, harus diakui tidak semua pemuda terlibat dalam proses perubahan politik besar di masyarakatnya. Sikap politik pemuda dalam berbagai episode sejarah bagaimanapun tidak pernah seragam, tetapi plural. Dan pluralitas adalah bagian dari fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Sebagian pemuda secara sadar mendedikasikan hidupnya untuk perubahan masyarakat. Sebagian yang lain beraktivitas dalam organisasi sebagai batu

loncatan politik untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan atau partai politik. Ada juga yang karena sikap dasarnya apolitik atau karena desakan ekonomi kemudian menjalankan kehidupan secara biasa-biasa saja dengan bekerja di perusahaan, membangun usaha mandiri atau menjadi buruh biasa di lingkungannya.

Pemuda sebagai Aset Bangsa

Dalam sosiologi pendidikan baru (*new sociology of education*), kaum muda dikategorisasikan sebagai kelompok sosial yang signifikan, bahkan menjadi ‘kelas’ tersendiri dalam masyarakat. Sebagai kelas tersendiri, ada yang memandang kaum muda dengan optimistik, tetapi ada juga ada yang pesimistik. Seperti ditulis oleh David Harris dalam *From Class Struggle to the Politics of Pleasure: The Effects of Gramscianism on Cultural Studies* (London: Routledge, 1992, hlm. 78), yang optimistik melihat kaum muda sebagai agen perubahan sosial yang cenderung idealistik. Sementara yang pesimistik melihat kaum muda sebagai korban dari industri kebudayaan yang konsumeristik.

Partai Kebangkitan Bangsa memandang kaum muda sebagai aset bangsa secara optimistik, meski tetap sadar bahwa kelompok ini bisa sangat labil bila terlalu jauh terjebak dalam budaya massa dan keluar dari tradisinya. Karena itulah PKB membentuk organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) dalam rangka meningkatkan kemandirian, pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran politik generasi muda,

serta mendorong munculnya kader-kader gerakan dan kepemimpinan kaum muda dalam proses berbangsa dan bernegara.

PKB sangat berkepentingan dengan munculnya kader-kader muda dalam politik. Hal ini karena ada kebutuhan mendesak untuk melakukan regenerasi kepemimpinan, pendidikan politik yang berkesinambungan dan perlunya ditumbuhkan sikap idealistik dalam berpolitik. Kaum muda merupakan faktor pendorong perubahan yang sangat potensial dan sekaligus mengurangi kecenderungan pragmatisme politik berbahaya yang berwujud pada petualangan politik yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatantasan (bisa juga disebut sebagai *political animals*).

Dalam kaitan dengan pemuda, politik PKB berorientasi pada upaya menjadikan politik kaum muda tidak terjebak dalam slogan-slogan perubahan atau idealisme yang semu. Para aktivis pemuda, termasuk politisi muda PKB, harus memperkaya diri dengan wawasan nasional, meningkatkan ketajaman naluri politik dalam membaca gerak ekonomi dan politik dalam kerangka sistem dunia, dan tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan etos kepemimpinan yang berakar pada tradisi dan hati nurani. Dengan modal seperti itu, kita semua bisa menjaga kepentingan dan keamanan nasional (*national security*), kemandirian bangsa dan identitas kolektif sebagai bangsa yang bermartabat.

Bagaimana seorang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa membaca kepentingan di balik misi kemanusiaan tentara asing di Aceh misalnya, yang disangkal semua orang, lalu dibenarkan sendiri oleh mereka yang terlibat, merupakan pelajaran berharga. Tidak semua pemimpin bangsa bisa membaca gejala tersebut dalam kompleksitas persoalan berikut konsekuensinya bagi kehidupan bangsa di masa mendatang. Bahkan para pemimpin bangsa sekarang punya kecenderungan yang semakin menguat untuk tunduk menyerah pada kekuatan asing daripada menumbuhkembangkan etos dan kemandirian bangsa sekuat tenaga.

Pemuda dalam Struktur PKB

Salah satu syarat calon ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang diajukan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) -- menjelang Muktamar II PKB di Semarang April 2005 yang lalu -- adalah masih muda. Gus Dur memang secara tegas ingin menjadikan kepemimpinan PKB di semua tingkatan bersifat kolektif yang dikelola oleh kaum muda, baik dari kalangan pengusaha maupun kaum intelegensia.

Secara faktual, kepemimpinan PKB terutama di jajaran Tanfidz, dari pusat sampai cabang, memang banyak diisi oleh kaum muda. Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan yaitu HM Rosehan NB yang juga Wakil Gubernur Kalsel 2005-2010, Ketua DPW PKB Bengkulu John Ramadan dan Ketua DPW

PKB Jawa Timur Imam Nahrawi, untuk menyebut beberapa nama, adalah mantan ketua Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa, organisasi kepemudaan PKB, di wilayah masing-masing.

Keberadaan kaum muda dalam struktur politik PKB merupakan suatu komitmen untuk menjadikan politik PKB lebih inovatif dan dinamis. Jadi hal ini bukan merupakan eksperimentasi atau keharusan sejarah yang diterima sebagai takdir, melainkan menjadi bagian dari proses regenerasi dan kaderisasi yang didesain secara sadar dan sekaligus dikelola sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan etos kepemimpinan yang peka terhadap perubahan gerak politik di dalam negara maupun antar-negara. Dengan modal seperti itu, kita bisa berharap dan optimis akan datangnya pemimpin-pemimpin politik muda seperti Sukarno, Tan Malaka atau Wahid Hasyim yang sudah menjadi motor penggerak nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Namun apa yang paparkan di atas hanya akan menjadi wacana atau slogan jika tidak ada *political will* dari elit-elit PKB untuk mengintegrasikan sumberdaya kaum muda dalam politik PKB secara terpadu. Dalam kebijakan PKB, *political will* itu salah satunya dimanifestasikan dalam tiga hal berikut.

Pertama, jajaran pimpinan PKB di sektor Dewan Tanfidz diserahkan kepada politisi-politisi muda, misalnya 75% anak

muda terpilih, dan 25% politisi yang sudah agak senior, usia 50 tahun ke atas. Jajaran Dewan Syura diisi oleh para ulama dan politisi dari kaum tua, karena Dewan Syura berfungsi mengarahkan dan mengendalikan politik PKB yang bersifat strategis.

Kedua, dalam lembaga perwakilan rakyat, baik DPR RI maupun DPRD, komposisi kaum muda bisa lebih besar dibandingkan dengan wakil dari kaum tua, sekurang-kurangnya *fifty-fifty*. Hal ini diharapkan menciptakan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di lembaga legislatif bisa lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Ketiga, perlu dikembangkan sistem meritokratis – tidak sekadar model genealogis seperti yang selama ini dianggap mewarnai regenerasi PKB – dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan akseptabilitas calon kader. Termasuk dalam pengembangan sistem ini adalah memberi “kuota” yang proporsional kepada unsur Garda Bangsa untuk “naik kelas” menjadi pengurus PKB.

Penting dicatat, ketiga hal tersebut, dikedepankan dengan tetap memperhatikan prinsip PKB sebagai partai terbuka. Implementasi dari sistem partai terbuka ini – seperti dinyatakan Gus Dur dalam berbagai kesempatan – adalah pengurus PKB (dan juga anggota legislatif PKB) disusun atas dasar perimbangan: 50 dari Nahdaltul Ulama, 25% dari tokoh Islam di luar NU dan 25% dari non-muslim. Pembagian tersebut bukan merupakan ‘keterpaksaan’ dari sikap yang diambil sebagai

partai terbuka, melainkan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat luas dari berbagai golongan sekaligus membangun tradisi yang bisa mengayomi kepentingan berbagai pihak. Karena bagi PKB, salah satu kebesaran Islam bisa diukur dari manifestasi sikap umatnya yang bersifat mengayomi dan merangkum seluruh potensi masyarakat sebagai syarat utama kebangkitan bangsa.

Tantangan PKB ke depan sebagai “partai anak muda” adalah membangun manajemen partai yang modern dengan mensinergikan politik kaum muda di jajaran Dewan Tanfidz dan kharisma-visi kaum tua di Dewan Syura dalam suatu kolektivitas baru yang bisa membuka ruang politik yang memungkinkan semua sumber daya partai bisa direngkuh dan diberdayakan untuk mengelola kepentingan konstituen dan sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Karena itulah dibutuhkan pemimpin-pemimpin di Dewan Syura yang mempunyai pandangan dunia (ideologi) yang luas, kharisma yang bisa diteladani, wawasan yang jauh ke depan dan pengalaman yang cukup sehingga bisa menjadi payung politik bagi gerakan kolektif baru di PKB.

Sedangkan di jajaran Dewan Tanfidz dibutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang berkarakter, loyal kepada Dewan Syura, mau bekerja keras dan punya nyali. Kombinasi dua watak kepemimpinan itu memungkinkan adanya dinamika internal yang kreatif, sehingga PKB bisa sedikit lepas dari konflik internal yang tidak perlu dan fokus kepada perjuangan partai seperti

diamanatkan dalam *mabda' siyasi* dan keputusan-keputusan muktamar.

Yang dibutuhkan kemudian adalah sistem silaturahmi atau manajemen komunikasi yang baik antara kedua generasi itu. Manajemen tersebut bisa dilembagakan melalui forum-forum partai, tetapi bisa juga diserahkan kepada tradisi keagamaan santri yang sudah ada, khususnya tradisi yang selama ini terbukti berwatak produktif dan dialogis yang melekat dalam kebiasaan kaum santri.

Inti Kepemimpinan Kita

Setiap individu, organisasi atau masyarakat mempunyai cita-cita atau nilai-nilai tertentu yang ingin diperjuangkan dan diwujudkan dalam kehidupan. Cita-cita atau nilai itu kalau dalam organisasi biasanya dirumuskan dalam visi dan misi dan diimplementasikan dalam program kerja organisasi.

Dalam bukunya *The Staring Into Chaos: Exploration In The Decline Of Western Civilization*, B.G Brander menyatakan bahwa perubahan peradaban digerakkan oleh seseorang atau kelompok minoritas saja, yang memiliki kreativitas dan kharisma luar biasa. Asumsi Brander ini dibuktikan dalam sejarah Iran dengan Ayatullah Khomaini, Cina dengan tradisi partai yang berdisiplin tinggi dan Malaysia dengan kepeloporan Mahathir Mohamad.

Sebuah partai juga memerlukan inti kepemimpinan yang solid. Tanpa inti kepemimpinan yang solid, partai akan mudah

berganti kelamin, diintervensi dan tidak jelas trayeknya. Kepemimpinan yang solid bertujuan untuk menjaga ideologi dan arah gerakan partai politik. Agar ideologi dan arah tersebut selalu terjaga dan berkesinambungan, maka harus ada jaminan bahwa pemimpin baru tidak akan membawa partai keluar dari ideologi dan trayeknya yang sudah disepakati bersama. Pepatah Italia mengatakan: *Si cambia il maestro di capella, ma la musica e sempre quella* (dirigen boleh ganti, namun musik tetap sama).

Untuk kasus tertentu, karena tidak ada jaminan terjaganya ideologi partai atau negara, inti kepemimpinan dapat dipertahankan sampai jangka waktu di mana pemimpin tertinggi partai atau negara merasa ada penggantinya yang pas. Di Malaysia, Mahathir Mohammad mau melepaskan jabatan kursi Perdana Menteri – tanpa harus keluar dari dunia politik – setelah ia menemukan penggantinya yang tepat, yaitu Abdullah Ahmad Badawi yang dinilai sangat konsisten dengan nilai-nilai Melayu dan komitmen pada kepentingan Malaysia.

Kalau disederhanakan, ada dua tipe kepemimpinan di PKB yang bersifat saling menopang dan melengkapi. Pertama, *kepemimpinan ulama*. Kepemimpinan tertinggi di PKB adalah kepemimpinan ulama. Kepemimpinan ulama berwatak kharismatik, bertugas menjaga moral dan ruang batin partai. Kepemimpinan ini melembaga dalam Dewan Syura. Karena menyangkut masalah moral dan kharisma, ada unsur dalam Dewan Syura yang harus dikembangkan misalnya soal hak-hak

prerogatif (*privileged elites*). Tanpa ada hak-hak tersebut, moral politik partai akan sulit dijaga.

Kedua, *kepemimpinan intelektual*. PKB adalah salah satu partai politik yang banyak menampung aspirasi kaum intelektual. Fakta ini juga bisa dijadikan modal sosial untuk membangun kepemimpinan intelektual dalam tradisi partai di bawah kepemimpinan kharismatik ulama.

Tugas utama kepemimpinan intelektual membangun tradisi politik berbasis kemanusiaan dengan merumuskan seperangkat pengetahuan dasar untuk kepentingan transformasi politik secara luas. Seperti dikatakan Rajni Kothari dalam *State Against Democracy: In Search of Humane Governance* (Delhi: Ajanta, 1989, hlm. 13-14), intelektual juga memainkan apa yang dinamakan sebagai “*the role of rationalisers and legitimisers*” terhadap fakta politik berdasarkan fatwa ulama. Intelektual juga berusaha untuk menghubungkan antara *upper discourses* dan *lower discourses*. Kepemimpinan ini biasa dilembagakan dalam Dewan Pakar, Litbang, atau departemen-departemen. Kombinasi antara kepemimpinan ulama dan kepemimpinan intelektual kaum muda di PKB menciptakan apa yang disebut sebagai *strong but limited leadership*. Kepemimpinan yang mempunyai visi menyeluruh menyangkut kepentingan partai, masyarakat dan bangsa dan dijalankan dengan garis komando yang jelas.

Dalam aras seperti itu, pemuda bisa mengambil posisi dalam kepemimpinan intelektual dan berperan sebagai penerjemah

bebas atas berbagai kebijakan yang diambil dalam kepemimpinan ulama partai. Dengan relasi seperti itulah, pemuda akan mempunyai posisi yang strategis dalam kehidupan partai dan bangsa secara keseluruhan.(*)

Jakarta, 3 Februari 2005

- 7 -

GUS DUR DAN INTERNASIONALISASI PERAN ULAMA

Garansi Demokrasi dan Pluralisme

Terpilihnya KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-4 Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999 sangat mengejutkan banyak kalangan baik di dalam maupun luar negeri. Seperti dilaporkan *BBC News*, Rabu 20 Oktober 1999, *the election of the influential Muslim cleric came as a shock to many after Megawati Sukarnoputri's PDI-P party had emerged as the winner of Indonesia's elections in June*. Majalah *The Economist* di cover depannya juga menulis: Astaga, Gus Dur yang Terpilih: Presiden Baru Indonesia yang Mengejutkan!

Dunia sungguh tidak menyangka dan sangat terkejut, sebagaimana mereka terkejut atas kemenangan Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Namun, kalau keterkejutan atas Revolusi Islam di Iran disertai kecemasan yang sangat kuat terhadap radikalisme Islam, keterkejutan dunia internasional atas terpilihnya Gus Dur sama sekali tidak disertai ketakutan akan

menguatnya Islam radikal di Indonesia – karena Gus Dur sangat menentang fundamentalisme Islam – tetapi justru keterkejutan yang disertai keheranan. Mereka heran, *kok* bisa seorang kiai – yang dalam banyak literatur Barat dianggap *kolot* dan kaku – terpilih menjadi seorang presiden?

Diakui oleh majalah *Time* (21 Oktober 1999), Gus Dur memang sering membuat manuver dan keputusan yang sulit ditebak (*unpredictable moves and decisions*). Langkah-langkah dan keputusan politiknya sulit diprediksi, bahkan bagi warga Nahdaltul Ulama (NU) dan orang-orang dekatnya sendiri. Meski demikian, orang dekat, masyarakat luas dan dunia internasional sedikit pun tidak pernah merasa cemas dengan Gus Dur karena ia dikenal dan diakui secara luas sebagai orang yang tidak diragukan komitmennya kepada demokrasi, HAM dan pluralisme. Artinya, bagi banyak orang, terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI menjadi jaminan bahwa proses demokratisasi dan penegakkan HAM akan lebih baik. Pada saat yang sama, Gus Dur juga menjadi garansi atas tegaknya nilai-nilai pluralisme dan toleransi karena pembelaannya pada pandangan nasional (*national view*) dan keyakinan keagamaannya yang kuat atas universalisme dan inklusivisme Islam.

Pengaruh besar Gus Dur dalam proses demokratisasi di Indonesia telah diakui secara luas. Pada 31 Agustus 1993, ia menerima penghargaan *Ramon Magsaysay*, “Nobel Asia” dari pemerintah Filipina. Penghargaan diberikan karena Gus Dur

dinilai mempunyai komitmen dan peran yang sangat penting terhadap demokrasi, penegakan HAM dan toleransi beragama di Indonesia.

Kecintaan Gus Dur yang mendalam atas nilai-nilai universal Islam dan pandangan tradisi pesantren membuatnya tidak pernah kehabisan energi untuk memperjuangkan kehadiran Islam di Indonesia sebagai etika sosial (*social ethics*) yang akan mengukuhkan proses demokratisasi dan wajah negara bangsa yang multikultural. Ia tidak ingin pujian, juga tidak takut dengan cacian. Yang dijalankan hanyalah panggilan hidup untuk sebuah perjuangan panjang sebagaimana dicontohkan oleh para pejuang Republik dan juga kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama di masa awal.

Gus Dur sepanjang perjalanan hidupnya selama ini adalah sosok pemikir dan aktivis sosial-keagamaan yang gigih membela nilai-nilai keislaman universal, pandangan hidup kiai dan fakta kemajemukan Indonesia sebagai negara nasional (*national state*). Ketika muncul kecenderungan untuk menjadikan agama dalam posisi suplementer atau agama sekadar menjadi alat legitimasi terhadap pembangunan atau menjadikannya sebagai ideologi alternatif, Gus Dur mengemukakan gagasannya tentang agama sebagai faktor komplementer dalam kehidupan. Baik sebagai faktor suplementer maupun ideologi alternatif, menurut Gus Dur, agama hanya akan dimanipulasi untuk kepentingan golongan yang bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri.

Begitu juga ketika muncul gejala yang meremahkan dan

meminggirkan kiai-kiai pesantren, lewat tulisan-tulisannya Gus Dur memaparkan rasionalitas, dinamisme dan potensi untuk beradaptasi yang dimiliki kaum kiai, sehingga faktor kiai tidak bisa diabaikan dalam seluruh proses perubahan sosial di tengah masyarakat.

Sebagai manifestasi dari komitmen atas itu semua, ketika menjadi presiden Gus Dur memelopori penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mengeluarkan Inpres No 6/2000 tanggal 17 Januari 2000, mencabut Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Gus Dur juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 yang mencabut Keppres NO. 29/1998 tentang Bakorstanas dan Keppres No. 16/1990 tentang Litsus. Kedua lembaga ini dinilainya lebih banyak menimbulkan keruwetan daripada kemanfaatan dan secara jelas merugikan nilai-nilai hak asasi manusia (Lihat A Muhaimin Iskandar, *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita*, 2004: 42-43).

Gus Dur bukan saja bisa disebut sebagai pembela negara bangsa dan kepentingan minoritas karena kecintaannya yang dalam terhadap nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan universal, tetapi juga diakui sebagai “penyelamat” tradisi pesantren dan wibawa kiai karena kecintaannya yang juga sangat dalam terhadap Islam tradisional.

Pandangan Hidup Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di

Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi pusat belajar agama dan pendidikan para calon pemimpin agama Islam. Sebagai lembaga pendidikan tertua yang masih eksis sampai saat ini, pesantren secara nyata telah menunjukkan daya tahannya terhadap berbagai tantangan kehidupan dan sekaligus watak dinamisnya dalam menyediakan perangkat keilmuan dan sikap hidup yang fleksibel, terbuka dan adaptif bagi santri dan masyarakat sekitarnya.

Daya tahan dan daya gerak tersebut menjadi sesuatu yang melekat pada dunia pesantren karena beberapa faktor. *Pertama*, pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan Islam secara komprehensif (*kaffah*). Pesantren tidak hanya mengajarkan tauhid, tetapi juga fiqih/syariat dan tasawuf. Tradisi keilmuan pesantren hampir tidak pernah menafsirkan ayat atau Hadis secara sepotong atau parsial, tetapi dengan kajian tafsir yang dilengkapi dengan berbagai alat kelengkapan bahasa Arab seperti *nahwu*, *saraf*, *balaghah* dan yang lain. Ayat al-Quran atau teks Hadis juga selalu dipahami dalam konteks kesejarahan yang dipadukan dengan pendekatan fiqih secara utuh dalam kerangka pemikiran mazhab.

Pemahaman ajaran Islam secara sepotong hanya akan melahirkan proses pendangkalan pemikiran keagamaan yang pada gilirannya nanti menjadi bibit bagi radikalisme dan fundamentalisme. Dengan tradisi pemikiran dan pengambilan keputusan hukum yang menyeluruh dan kontekstual, pesantren tidak akan pernah melahirkan pemikiran dan sikap keagamaan

yang radikal dan hitam putih. Dengan kata lain, tidak mungkin terorisme lahir dan tumbuh dalam lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama.

Kedua, pesantren mempunyai tradisi mengambil jalan tengah jika ada pertentangan sikap dan pemikiran. Tradisi berpikir dalam kerangka mazhab (*mazhabiy*) menyediakan ruang yang sangat luas dan terbuka untuk memikirkan berbagai kemungkinan dilihat dari sudut pandang keilmuan dan juga kepentingan kemanusiaan (*maslahah al-'ammah*). Karena agama diturunkan untuk kepentingan dan kemudahan hidup manusia, maka tradisi pesantren selalu diorientasikan kepada bagaimana menjadikan syariat sebagai jalan untuk mewujudkan kemaslahatan sebaik-baiknya, bukan untuk menjadikan agama sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok atau menjaga klaim-klaim kebenaran yang tiada ujung pangkalnya. Karena orientasi kemaslahatan yang menjadi tujuan bermazhab, maka pemikiran dan pandangan hidup pesantren selalu terhindar dari ekstrimitas, karena jalan tengah adalah bagian integral dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan sekaligus menjaga kemuliaan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Ketiga, pesantren adalah lembaga pendidikan yang menyatu dengan masyarakat. Kedekatan dan integrasinya dengan realitas kehidupan di sekitarnya menjadikan pesantren memiliki tradisi pemikiran dan sikap hidup yang realistik dalam arti selalu menjadikan realitas sebagai bahan pertimbangan dalam pemikiran dan pengambilan keputusan mengenai hukum

agama.

Tradisi pesantren juga bersifat *ngemong* atau mengayomi budaya masyarakat sehingga nilai-nilai baru yang diterima masyarakat bisa dijinakkan. Pada saat yang sama, pesantren juga menginternalisasikan budaya masyarakat sebagai salah satu sumber pengambilan keputusan hukum (*al-adah al-muhakkamah*). Dengan proses dialektik yang demikian, tradisi pesantren memiliki keluwesan dan kelenturan sehingga mengakar secara kuat dalam kesadaran kolektif dan menjadi landasan bagi eksistensinya di tengah kehidupan masyarakat di berbagai tempat dan waktu.

Keempat, pesantren adalah lembaga pendidikan yang dekat dengan rakyat dengan watak egalitarianisme yang kental. Ketika terjadi polemik kebudayaan pada pertengahan 1930-an, Dr Sutomo menyatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang populis dan egaliter, karena pesantren bisa mempersatukan santri muda dan dewasa, mempertemukan anak-anak dari segala lapisan masyarakat, anak orang tani, anak saudagar, anak bangsawan bisa berkumpul dalam satu kamar dan pondok. Pesantren juga bisa menyatu dengan masyarakat, misalnya dalam hal gotong-royong, menggarap sawah atau ladang, tradisi selamatan, dsb. Sementara pendidikan model Barat seperti HIS (*Hollandsche Inlandsche Scholen*) dan ELS (*Europeesche Lagere Scholen*), menurut Sutomo, cenderung membuat siswa atau alumninya menjadi sombong karena merasa

lebih tinggi derajat dan kualitasnya dari anak-anak lainnya (Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudajaan*, Djakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1950).

Sampai saat ini, pesantren-pesantren yang mempertahankan corak salafiyahnya juga tetap menyatu dengan masyarakat sekitar. Tidak ada tembok tinggi yang menjadi sekat antara lingkungan pesantren dengan masyarakat, sehingga relasi dan komunikasi antara keduanya berjalan baik. Masyarakat bisa ikut belajar agama atau bentuk-bentuk ketrampilan lain di pesantren, sementara santri bisa bekerja di sawah atau ladang milik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Santri juga sering diminta untuk memberi ceramah agama atau ikut dalam upacara-upacara keagamaan masyarakat, sehingga keduanya hidup dalam kebersamaan, saling melengkapi dan dengan sendirinya saling menguatkan. Tidak ada dominasi atau hegemoni, karena keduanya bisa dikatakan berdiri sejajar dan masing-masing memiliki kontribusi yang khas dalam rangka menopang proses bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Kelima, pada masa-masa awal pendiriannya, pesantren mempunyai misi yang transformatif, yaitu mengubah struktur dan kultur masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Pada masa dahulu, kiai-kiai mendirikan pesantren biasanya di daerah yang rawan atau biasa disebut daerah hitam. Tujuannya adalah mengubah tata nilai dan struktur masyarakat yang tidak adil

dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa kiai-kiai terdahulu mendirikan pesantren bukan untuk unjuk kekuatan, kemewahan bangunan, kepintaran ilmu atau kesaktian dalam olah kanuragan, tetapi benar-benar dimaksudkan untuk mengubah sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang datang mengubah tata nilai dan struktur masyarakat Arab, kiai-kiai juga melakukan hal yang sama terhadap masyarakatnya. Dalam pandangan kiai, salah satu fungsi agama dalam kehidupan adalah fungsi transformatif yaitu mengubah masyarakat secara fundamental tanpa harus menghancurkan inti kebudayaan atau kepercayaan yang ada.

Internasionalisasi Peran Ulama

Selama kurang lebih dua dasawarsa terakhir, Gus Dur berhasil meletakkan landasan yang kokoh bagi tiga hal berikut:

(1) Proses transisi kepemimpinan dari 'kaum tua' ke 'kaum muda' di internal masyarakat NU. Sejak Gus Dur memimpin PBNU pada tahun 1984 setelah kiai-kiai kurang nyaman NU dipimpin oleh Dr Idham Chalid, politisi lulusan Pesantren Gontor Ponorogo, dinamika pemikiran dan regenerasi kepemimpinan di dalam masyarakat NU berjalan sangat dinamis. Lima belas tahun sejak kepemimpinan Gus Dur di NU, muncul politisi-politisi belia NU, kaum intelektual dan

juga kiai-kiai muda yang progresif.

Yang tidak kalah pentingnya adalah lima belas tahun waktu yang dibutuhkan oleh Gus Dur sejak memimpin PBNU untuk menjadi presiden (1984-1999), yang diikuti oleh persebaran tokoh-tokoh muda NU di eksekutif dan lembaga legislatif di berbagai tingkatan.

Jelaslah di sini bahwa Gus Dur adalah sebuah lokomotif yang membawa ratusan gerbong di belakangnya dengan berbagai keahlian dan kepedulian. Ada juga beberapa gerbong yang keluar dari relnya, tetapi hal tersebut sama sekali tidak mengurangi nilai keberhasilan Gus Dur dalam mengubah wajah dan bobot masyarakat NU selama ini.

(2) Proses integrasi PKB sebagai sayap politik NU. Secara historis, kultural dan aspiratif, PKB adalah satu-satunya sayap politik NU karena kelahiran partai ini pada 23 Juli 1998 secara resmi difasilitasi oleh Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU) dan kiai-kiai.

Saya yang menjadi anggota Tim Asistensi Pendirian PKB yang dibentuk PBNU pada thun 1998 merasakan betul bahwa kiai-kiai dan warga NU menghendaki adanya partai politik yang akan menjadi payung politik kaum Nahdliyyin dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas dari berbagai agama dan golongan. Latar belakang demikian menunjukkan bahwa politik PKB terintegrasi secara historis, aspiratif dan kultural dengan Nahdaltul Ulama. Demikian juga sebaliknya, aktivitas sosial-keagamaan NU terintegrasi secara aspiratif dan kultural

dengan PKB.

(3) Internasionalisasi peran ulama sebagai juru bicara dunia Islam, yang salah satunya direpresentasikan dengan mengagumkan oleh Gus Dur sendiri. Internasionalisasi peran kiai memungkinkan pemimpin umat ini terus mengembangkan diri dengan berbagai pemikiran dan tantangan yang lebih global, sehingga keterbukaan dan keluasan pandangan bisa terus dirawat.

Peran-peran yang mendunia juga pernah dimainkan para kiai misalnya lewat Komite Hijaz pada waktu NU akan didirikan pada pertengahan tahun 1920-an, juga pada kepedulian kiai terhadap masalah Palestina dan Timur Tengah pada umumnya di masa lampau.

Setelah cukup lama peran-peran di dunia internasional itu menurun, Gus Dur kemudian tampil sebagai pemimpin NU yang diakui secara internasional. Hubungannya dengan para kepala negara atau pemerintahan asing, NGO internasional atau tokoh-tokoh agama dan politik dunia, membuatnya bisa memainkan peran yang lebih strategis dalam pergaulan internasional, sekaligus membawa perubahan penting terhadap NU di mata dunia.

Sebagai contoh, seperti di-*taushiyah*-kan (rekomendasi) oleh Halaqah Politik Walisongo yang diselenggarakan DPP PKB pada 3 Desember 2005, keluarnya Israel dari Jalur Gaza beberapa waktu yang lalu, merupakan buah dari solusi damai yang

diperjuangkan Gus Dur secara konsisten dalam menyelesaikan masalah konflik Palestina-Israel, dan konflik di Timur Tengah pada umumnya.

Kini hubungan Gus Dur dengan beberapa kiai yang dulu dibela dan berjuang bersamanya dianggap banyak kalangan sedang dalam suasana sedikit renggang, paling tidak seperti yang tampak di permukaan. Namun, kecintaan Gus Dur yang sangat total terhadap kiai yang dikombinasikan dengan karakteristik watak kiai NU dengan rasionalitasnya sendiri, kita semua yakin bahwa yang terjadi merupakan bagian dari proses pendewasaan wawasan politik dalam kerangka pengembangan ajaran *Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Hanya Allah SWT Sang Pemberi Petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar. Dan, politik serta spiritualitas PKB adalah membela yang benar.

Jakarta, 5 Oktober 2005.

PKB DAN KOSMOPOLITANISME PERADABAN ISLAM

Pemecah Kebuntuan Dialog Islam-Negara

Ketika bertemu Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Negara, Sabtu, 26 Mei 2001, Guru Besar Universitas Kairo Mesir, Profesor Dr Hassan Hanafi mengemukakan bahwa di bawah kepemimpinan Gus Dur, Indonesia dengan tradisi, budaya dan sejarahnya dapat menjadi tumpuan bagi dunia Islam untuk memajukan diri, khususnya bagi bangsa-bangsa Muslim Asia dan Afrika. Indonesia juga diharapkan menjadi jembatan untuk mengatasi berbagai persoalan dan perbedaan pendapat yang melibatkan negara-negara muslim dan non-muslim.

Pernyataan Hassan Hanafi itu tentu bukan tanpa alasan. Pertama, Gus Dur adalah tokoh dunia Islam yang diakui punya visi yang jelas bagaimana mengembangkan pemikiran Islam dan masyarakatnya dengan menempatkan agama sebagai faktor komplementer di lingkungan negara bangsa maupun dalam

hubungan antar-bangsa. Konsepnya tentang Islam sebagai etika sosial (*social ethics*) merupakan temuan yang luar biasa dalam memecahkan kebuntuan dialog antara Islam dan negara yang sudah berlangsung ribuan tahun dalam sejarah panjang peradaban Islam.

Kedua, di belakang Gus Dur ada tradisi besar yang merepresentasikan kekayaan peradaban Islam yang kosmopolit dan khazanah Islam serta kultur Indonesia yang non-monolitik. Tradisi itu secara sosial-keagamaan diwarisi oleh Nahdaltul Ulama, dan secara politik diwakili oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB, Pewaris Tradisi Besar Islam

PKB adalah partai politik yang memiliki konsep jelas dan proporsional tentang Islam dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain yang ada dalam rumah besar bangsa Indonesia. Konsep demikian memungkinkan PKB bisa keluar dari persoalan-persoalan yang rumit, memberikan makna atas perubahan yang membumi, dan memberikan penjelasan yang rasional berdasarkan hukum agama dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat.

Kemampuan tersebut merupakan warisan dari tradisi politik Partai NU yang pada masa lalu bisa menunjukkan sikap yang lebih rasional dan akomodatif terhadap otoritas sekular dan perubahan secara umum, daripada sikap kaum modernis Islam yang cenderung kaku dan tidak fleksibel. Inilah yang disebut

anomali oleh Allan A Samson [lihat dalam Karl D Jackson & Lucian W Pye (eds.), *Political Power and Coummunications in Indonesia*, 1978: 212].

Menurut saya anomali tersebut sebenarnya bukan sekadar anomali. Tetapi suatu realitas yang tidak terbantahkan bahwa modernisasi - dan juga globalisasi - tidak bisa diterima tanpa *reserve*, dengan meninggalkan tradisi. Modernisasi pemikiran Islam yang secara gegap gempita disebarkan melalui gerakan purifikasi dalam jangka panjang ternyata melahirkan radikalisme dalam bentuk fundamentalisme. Begitu juga globalisasi yang justeru melahirkan terorisme dalam skala luas dan kompleks. Sejarah juga menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses menjadi modern, seperti Jepang, Cina, Korea Selatan atau Malaysia, adalah negara yang menjadikan tradisi sebagai penopang modernisasi.

PKB sebagai pewaris tradisi panjang peradaban Islam dan kebudayaan Nusantara memiliki modal dan potensi yang lengkap untuk menjadi lokomotif perubahan yang bersumber pada agama dan tradisi masyarakat. Salah satunya adalah cita-cita PKB untuk mewujudkan Islam sebagai agama perdamaian dan Islam sebagai rahmat bagi semua, termasuk dalam konteks hubungan antar-bangsa. PKB dalam hal ini sepenuhnya mengadopsi watak kosmopolitan dari peradaban Islam.

PKB menganggap penting untuk mengambil inisiatif terhadap persoalan ini, karena dalam beberapa tahun terakhir muncul kecenderungan radikalisasi Islam yang ditunjukkan oleh

beberapa partai dan ormas Islam. Kecenderungan tersebut jelas akan merusak pluralitas bangsa, mengasingkan Islam dari tujuannya sendiri, dan dalam jangka panjang menghancurkan tradisi dan kebudayaan masyarakat. Sebuah proses nyata menuju degradasi nilai dan anarki, yang akan membuat bangsa ini berada dalam peradaban yang gemerlap di permukaan, tetapi hancur dari dalam. Suatu proses sejarah yang harus disadari dan dihindari sejak dini.

Visi Dasar Politik-Keagamaan

Visi dasar PKB dalam memahami dan manyikapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dengan modal sejarah dan kebudayaan seperti dipaparkan di atas dapat dirumuskan dalam beberapa hal berikut. *Pertama*, sebagaimana NU, PKB menganggap bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila adalah final. Tidak ada lagi toleransi untuk mengubah dasar negara dengan agama atau yang lainnya. Juga tidak bisa diterima upaya-upaya merusak tatanan NKRI, baik dengan alternatif federasi maupun upaya-upaya yang bersifat separatis. Dalam situasi darurat sangat dimungkinkan untuk mengeluarkan fatwa politik sebagai pemberontak (*bughat*) bagi kelompok separatis atau mereka yang bermaksud mengubah dasar negara yang sudah menjadi konsensus nasional.

Kedua, bagi PKB Islam adalah agama moral dan sekaligus agama yang bersifat membebaskan. Sebagai agama moral, Islam menyediakan seperangkat nilai untuk pengembangan karakter

individu dan tertib sosial dalam konteks historis kehidupan masyarakat. Karena kebudayaan merupakan salah satu manifestasi dan ekspresi keagamaan, maka dengan sendirinya moralitas yang terbentuk merupakan perpaduan dari unsur-unsur agama dan nilai-nilai keutamaan dalam kebudayaan setempat.

Sementara sebagai agama yang berwatak membebaskan Islam menyediakan seperangkat nilai-nilai kritik yang memungkinkan pemeluknya melakukan koreksi dan reformasi atas sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Nilai-nilai kritik tersebut bersamaan dengan meningkatnya pemahaman dan penghayatan seseorang tentang ajaran agama, akan melahirkan etos, sehingga seorang kritikus sistem ekonomi atau politik bisa melakukan tugasnya sebagai bagian dari panggilan atau tugas keagamaan.

Baik sebagai agama moral maupun pembebasan, Islam bersifat terbuka terhadap berbagai nilai yang datang dari agama atau peradaban lain. Keterbukaan tersebut justru semakin menunjukkan kemuliaan Islam dan sekaligus menjadi modal bagi usaha-usaha memperkaya wawasan keagamaan dan kemasyarakatan.

Dengan asumsi-asumsi dasar seperti itu, agama pada hakikatnya merupakan proses transendensi dan humanisasi sekaligus. Sebagai proses transendensi, agama bersifat trans-historis dan sangat pribadi. Ia berfungsi membangun kapasitas spiritual individu sebagai makhluk sosial yang lemah tetapi

punya tanggung jawab kekhilafahan dan punya potensi yang harus terus dikembangkan bersama individu-individu yang lain dalam ruang sosial tertentu.

Sebagai proses humanisasi, agama berfungsi membangun kekuatan batin atau sebagai inspirasi teologis bagi upaya-upaya manusia menjadi khalifah, menegakkan keadilan, kemakmuran dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa ada kapasitas seperti itu, perjuangan mewujudkan keadilan atau kemakmuran cenderung hanya sebagai komoditas, penghias bibir atau wacana yang tidak lahir dari nurani yang paling dalam.

Dengan pemahaman seperti itulah, menurut hemat saya, agama bisa menjadi faktor perubahan dan perdamaian dan menjadi spirit penting menentang proses dehumanisasi dalam kehidupan manusia itu sendiri yang melekat dalam proses modernisasi beserta seluruh proses yang ikut di belakangnya.

Ketiga, pemahaman keagamaan harus dikembangkan dalam cakupan yang lebih luas terutama berkaitan dengan hubungannya dengan negara (*state*) dan juga pasar (*market*). Selama ini, kita sering hanya mempertentangkan antara agama dan negara, tetapi melupakan varian lain yang sebenarnya sangat “berkuasa” bahkan melebihi negara, yaitu pasar. Ketidakawasan melihat gerak pasar, baik dalam proses perubahan politik maupun dalam wacana keagamaan, menjadikan agama sebagai komoditas atau alat legitimasi atas keadaan yang ada. Wacana juga menjadi tidak berkembang dari waktu ke waktu sehingga mencapai titik jenuh dan kebuntuan yang terus dilestarikan

dengan isu yang berlainan.

Tanpa melihat dan memahami faktor pasar, tokoh atau kaum agamawan juga dengan mudah terkecoh oleh kejadian-kejadian kecil di permukaan, tetapi gagal mendeteksi gerak struktur di belakang kejadian itu.

Keempat, bagi PKB, prinsip dasar Islam tentang politik (*as-siyasah ad-dunya*) adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat secara umum (*al-maslahah al-'ammah*), karena tujuan fundamental dari diturunkannya agama berikut syariatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemuliaan martabat manusia.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, dalam terminologi fiqih dikenal istilah "*as-siyasah as-syar'iyah*", yaitu teori yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seorang pemimpin atau penguasa (*imam*) bisa mengambil atau memutuskan suatu kebijakan khusus untuk mewujudkan tujuan itu, meskipun hal tersebut tidak ditetapkan secara jelas oleh nas atau al-Quran dan Hadis Nabi (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *at-Turuq al-Hukmiyyah*, Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah, 1961: 15).

Teori "*as-siyasah as-syar'iyah*" memberi ruang yang sangat luas kepada para pemimpin politik untuk melakukan ijtihad dalam rangka mewujudkan tujuan partai yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Kalau tujuan itu bisa direalisasikan sesuai dengan harapan masyarakat, maka agama bukan hanya menunjukkan relevansinya dalam kehidupan, tetapi

juga menjadi semakin jelas bahwa Islam diturunkan untuk memuliakan anak cuku Adam dalam situasi yang adil dan makmur.

Bagi PKB, adanya teori “*as-siyasah as-syar’iyyah*” yang menjadi rujukan kiai-kiai ahli fiqih pesantren juga menjadi dasar bagi kosmopolitanisme dan keterbukaan ajaran Islam dalam hubungannya dengan berbagai sendi dan persoalan kehidupan, termasuk persoalan politik dalam arti luas. Dengan teori itu juga politik kiai yang direpresentasikan oleh PKB, tanpa harus terjebak dalam formalisme syariat atau menjadi partai agama, bisa tetap berada dalam trayek dan misi Islam yang bersifat universal.

Kelima, mengingat masih rapuhnya struktur politik negara, maka upaya-upaya politik dan keagamaan yang dirumuskan dan dijalankan PKB adalah langkah yang diambil untuk membangun semacam *terugval basis*, yaitu titik pertahanan yang menyiapkan landasan baru untuk restrukturisasi menyeluruh dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita sejak saat sekarang.

Titik pertahanan itu sangat penting karena jika titik itu tidak ada, maka ketika upaya-upaya atau terobosan yang selama ini dilakukan mengalami kebuntuan atau bahkan kegagalan, cepat atau lambat bukan proses akumulatif yang didapat, tetapi involusi di mana kita bisa lebih mundur dari titik di mana gerakan kita dibangun dan dimulai.

Kelima hal yang disebutkan di atas juga bisa menjadi semacam

titik pertahanan bagi PKB yang menjadi dasar sekaligus rel bagi upaya-upaya dan terobosan politik dalam rangka mengubah atau memperbaiki struktur politik dan ekonomi bangsa sesuai dengan aspirasi masyarakat luas.

Politik Strategis Ulama

Karena itu dalam pandangan PKB, ulama tidak bisa bersikap apolitik atau lari dari politik, karena politik dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bisa dikategorisasikan sebagai kewajiban agama, di samping tuntutan situasi yang sudah bersifat darurat

Dengan bahasa lain, politik adalah sarana penting untuk menegakkan cita-cita luhur Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Benar jika dikatakan Islam tidak bisa dilepaskan dari politik. Sebagaimana dikatakan KH A Wahab Chasbullah – seperti dikutip Allan A Samson dalam Karl D Jackson & Lucian W Pye (Eds.), *Political Power and Communications in Indonesia* (1978: 213) – Islam dan politik seperti gula dan manisnya. Jika seseorang bisa memisahkan gula dari manisnya, dia akan mampu memisahkan Islam dari politik (*if someone is able to separate sugar from its sweetness, he will be able to separate Islamic religion from politics*). Demikian pendapat Kiai Wahab, kiai-politisi NU yang piawai, handal dan dikenal pandai berargumentasi berdasarkan logika dan pemikiran orang pesantren.

Namun, politik kiai akan berubah menjadi proses degradasi

kultur dan nilai jika dimanifestasikan dalam ruang politik praktis yang bersifat jangka pendek dan sesaat, seperti dukung-mendukung tokoh tertentu untuk merebut kepemimpinan partai politik, menjadi juru kampanye calon pejabat eksekutif (presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, kepala desa, dll.) dalam suatu pemilihan umum, atau yang lain. Politik kiai sebaiknya diorientasikan untuk kepentingan jangka panjang dan mengurus hal-hal fundamental menyangkut kepentingan dasar masyarakat seperti kesejahteraan dan pendidikan, serta politik yang bersifat strategis menyangkut eksistensi dan kemandirian negara dalam pergaulan internasional. Diharapkan, kiai akan tetap memainkan peranan penting dalam politik kebangsaan secara umum dan pesantren lebih berkembang dengan kepemimpinan kharismatik-visioner kiai yang berorientasi pada tujuan universal menyangkut kemaslahatan, kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan visi dan orientasi seperti itu, kiai-kiai akan tetap menjadi figur sentral di tengah masyarakat yang terus berubah baik sebagai ahli agama, pendidik masyarakat, maupun perawat akhlak bangsa yang terus diguncang badai demoralisasi dan dehumanisasi. Kiai dan seluruh sumber daya pesantren juga bisa lebih fokus pada pengembangan dan penataan pendidikan pesantren dan distribusi personil para alumninya di berbagai daerah dan kecakapan. Dengan demikian, eksistensi dan kemandirian pesantren lebih terlindungi dari politisasi yang

merusak citra dan sistem secara keseluruhan yang pada gilirannya akan meningkatkan kembali peran moral dan sosial pesantren dalam masyarakat modern. Sesuatu yang sangat didambakan umat dan masyarakat, bukan?

Jakarta, 1 Muharram 1426 H/31 Januari 2006

POLITIK BERBASIS TRADISI: STRATEGI PKB MENJEMPUT GELOMBANG PASANG GLOBALISASI

Akumulasi Modal atau Pengetahuan?

Pada tanggal 3-4 Desember 2005 yang lalu, bertempat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Jawa Timur, DPP PKB menyelenggarakan *Halaqah Politik Walisongo: Membingkai Gerakan Islam Nusantara, Merumuskan Visi Kebangkitan Bangsa*. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 3.500 kiai dan pengurus PKB dari berbagai daerah tersebut digelar untuk (1) merefleksikan kembali perjuangan politik dan kultural Walisongo dalam membangun masyarakat dan meletakkan dasar-dasar kehidupan keislaman sebagai pijakan untuk merumuskan perjuangan politik dan kultural ulama di masa kini dan masa depan.

(2) Membangun perspektif-perspektif baru dalam perjuangan ulama, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional; dan (3) menata kembali tali silaturahmi dan persaudaraan ulama

dan umat Islam sebagaimana dicita-citakan oleh Hadratusyaikh KH Hasyim Asy'ari dan para pendiri Nahdaltul Ulama yang lain, karena hanya dengan persatuan dan persaudaraan itulah ulama bisa berperan efektif dalam kehidupan masyarakat bangsa dan bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan.

Kegiatan seperti itu menjadi salah satu kepedulian PKB dalam pengembangan politik berbasis tradisi atau kebudayaan. Upaya ini dalam kehidupan sekarang terasa penting sekurang-kurangnya karena tiga alasan. *Pertama*, politik Indonesia saat ini sangat didominasi oleh kepentingan pragmatis jangka pendek, seperti berebut jabatan atau uang (akumulasi modal), sementara kelompok yang memikirkan akumulasi pengetahuan sangat terbatas. Akumulasi modal tanpa akumulasi pengetahuan hanya akan menyuburkan praktek politik dagang sapi dan kecenderungan manipulatif di dalam segala aspek kebijakan negara atau partai politik. Dalam jangka panjang, ketiadaan akumulasi pengetahuan akan semakin menempatkan bangsa ini sebagai bangsa kuli (seperti pernah diingatkan oleh para pendiri bangsa ini), minus inovasi dan terseret dalam arus konsumerisme.

Salah satu cita-cita saya setelah diberi amanah untuk memimpin PKB adalah menjadikan akumulasi pengetahuan sebagai bagian integral dari kerja-kerja politik PKB, sehingga ada warna lain dari gerakan politik yang dibangun karena politik digerakkan oleh pengetahuan, bukan semata-mata oleh

kekuasaan atau uang seperti selama ini menjadi arus utama di sekitar kita.

Kedua, ulama saat ini mengalami pergeseran orientasi politik yang dalam beberapa kasus membuat kelompok ini terlihat kehilangan fokus dan garis perjuangan yang selama ini dijadikan sebagai pusat pengabdian hidupnya sebagai ahli agama dan tokoh masyarakat. Pergeseran itu terjadi karena banyaknya ulama yang masuk dalam arus politik praktis jangka pendek sehingga disadari atau tidak pemikiran yang dalam dan kebijaksanaan yang selama ini ditunjukkan tergantikan oleh semangat politisasi dan mobilisasi sumberdaya atau khazanah mereka sendiri, untuk kepentingan yang sebenarnya di luar kebiasaan politik ulama pada masa lampau. Dengan menelaah kembali politik Walisongo, diharapkan ada acuan dan referensi historis yang menjadi rujukan dan bisa diterima untuk mengembalikan peran ulama pelopor di tengah masyarakat.

Ketiga, kita sebagai bangsa yang kaya dengan nilai-nilai dan praktek budaya membutuhkan jaminan bahwa proses perubahan yang sedang berlangsung, masuk di dalamnya adalah proses globalisasi, tidak menghancurkan tata nilai dan tradisi masyarakat yang ada, termasuk tradisi panjang Nahdlatul Ulama yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak Islam masuk pertama kali di kawasan ini.

Dalam konteks ini ada dua hal yang bisa membuat masyarakat kehilangan tradisinya yang dalam jangka panjang akan menimbulkan perasaan teralienasi secara kolektif dan

kekosongan ruang batin sehingga kebudayaan kehilangan *inner beauty*-nya, tinggal menjadi aksesoris atau objek wisata, sebagaimana agama yang hanya termanifestasi dalam prosedur syariat, tetapi kehilangan sentuhan tasawuf, hakikat dan dimensi spiritualitasnya. Sikap keberagamaan pun menjadi gersang, kaku dan juga keras.

Hal pertama yang bisa membuat masyarakat kehilangan atau keluar dari tradisinya adalah globalisasi yang berjalan secara massif dan diterima menurut hukum pasar bebas. Dengan dukungan industri hiburan, gaya hidup (*life style*) atau iklan-iklan yang disebarluaskan melalui media seperti televisi atau internet, nilai-nilai dan gaya hidup liberal (Barat) akan menjadi rujukan dan konsumsi semua orang dari berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, globalisasi bisa menjadi proses homogenisasi kebudayaan di mana ada satu kebudayaan, yaitu kebudayaan atau gaya hidup liberal, yang menjadi pusat dan kebudayaan lain menjadi pinggiran. Masyarakat, terutama kaum muda, secara perlahan lebih senang bergaya hidup luar, daripada melestarikan budayanya sendiri. Misalnya anak muda di sekitar kita lebih suka dan merasa menjadi lebih modern jika makan di MacDonald atau KFC daripada menikmati ayam goreng Nyonya Suharti atau Mbok Berek yang merupakan makanan khas dan asli lokal.

Bergaya hidup liberal sebenarnya tidak menjadi soal apabila hal itu dilakukan dengan membangun tradisi berpikir, sehingga yang kita terima bukan hanya penampakan luarnya, tetapi juga

substansi dari nilai-nilai yang ada. Bukankah dalam tradisi pesantren dikenal kaidah “memelihara tradisi/nilai lama yang masih relevan, dan mengadopsi tradisi/nilai baru yang membawa perubahan (*al-muhafadhah ‘ala al-qadim as-salih, wal-akhdu bil-jadid al-aslah*)? Namun, jika tradisi berpikir tidak dibangun, maka kita akan semakin terseret dalam kultur konsumeristik dan semakin terasing dari tradisinya sendiri.

Hal kedua yang bisa membuat masyarakat teralienasi dan kehilangan tradisinya adalah purifikasi ajaran agama. Gerakan ini bermaksud membersihkan agama dari tradisi atau kebudayaan lokal yang dianggap tidak sesuai dengan agama (menyimpang atau sesat). Proses ini secara nyata membuat manifestasi keagamaan kering dari nilai-nilai dan simbol budaya. Kalau globalisasi menjadikan nilai-nilai dan gaya hidup liberal sebagai rujukan, purifikasi menjadikan simbol-simbol dan tradisi Timur Tengah sebagai yang paling benar dan teladan paling otentik. Pada akhirnya kedua nilai dan kultur yang datang dari luar tersebut hanya menjadi komoditas atau barang konsumsi tanpa bisa dibangun tradisi berpikir dialektik yang merangkum keseluruhan nilai-nilai yang ada.

Dengan menyelenggarakan *Halaqah Politik Walisongo* tersebut, DPP PKB bermaksud mengambil inisiatif untuk merumuskan kembali peran politik ulama dalam ruang sosial-politik yang lebih luas sehingga ada gagasan dan kontribusinya yang bisa menjadi sumber perubahan serta menjaga kesinambungan tradisi. Akumulasi pengetahuan pun bisa diraih

dalam setiap proses ekonomi dan politik di berbagai sektor kehidupan.

Walisongo dan Islam Indonesia

Walisongo adalah perkumpulan ulama yang berhasil mengislamkan tanah Jawa dan bumi Nusantara pada umumnya. Proses Islamisasi yang dilakukan, bukan sekadar mengajak masyarakat masuk Islam atau menjalankan syariat, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat menuju tata sosial yang lebih adil, berlandaskan moralitas khusus, manusiawi dan berakar pada tradisi setempat. Pendek kata, politik Islamisasi Walisongo adalah gerakan keagamaan yang lebih menonjolkan – meminjam istilah Abdurrahman Wahid dan Zamakhsyari Dhoefier – aspek-aspek Islam yang bersifat mengubah (*transformative aspects*) terhadap seluruh tata kehidupan masyarakat [Lihat “Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus dari Jombang”, *Prisma*, April 1978].

Perubahan besar yang dilakukan Walisongo merupakan proses berkesinambungan yang dibangun di atas tradisi atau kebudayaan setempat, ditambah nilai-nilai transformatif Islam yang dipahami secara kontekstual. Jadi tidak ada hegemoni atau dominasi agama atas budaya, juga sebaliknya. Keduanya bersifat saling melengkapi dan menguatkan, sehingga perubahan yang dihasilkan mengakar secara kokoh dalam kesadaran masyarakat dan tata nilai yang melekat dalam tradisinya.

Ulama-ulama penerus Walisongo kemudian juga selalu konsisten dengan peran-peran trasformatif tersebut. Pada masa penjajahan, peran tersebut dimanifestasikan dalam sikap tegas non-kooperatif terhadap kolonialisme. Martin van Bruinessen misalnya menunjukkan peran penting ulama, yang sebagian besar adalah ulama tarekat, dalam perlawanan melawan penjajah, seperti ditunjukkan oleh Syaikh Abdussamad dan Syaikh Yusuf Makassar. Syaikh Abdussamad tidak pernah berhenti mendorong Sultan Mataram (Hamengku Buwono I) dan Susuhunan Prabu Jaka (putra Amangkurat IV) untuk terus berjihad melawan orang kafir, sebagaimana dilakukan Sultan Mataram sebelumnya. Sementara Syaikh Yusuf Makassar menjadi penasihat Sultan Agung Tirtayasa dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda (Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 11-12).

Temuan Martin van Bruinessen tersebut mementahkan tesis yang menyatakan bahwa ulama dan gerakan tarekat cenderung bersikap apolitik dan lari dari persoalan duniawi. Terlebih jika kita mengamati secara seksama bahwa ulama-ulama pejuang yang dengan gigih melawan penjajahan adalah pengikut suatu aliran tarekat. Tarekat yang dipahami dan dijalankan dengan benar selalu melahirkan kepribadian yang peka terhadap persoalan dan perubahan.

Sartono Kartodirdjo dalam bukunya *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth*

and Early Twentieth Centuries (1973) menyatakan peran efektif kiai dalam menanamkan sikap bermusuhan dan agresif terhadap orang asing dan juga pribumi yang menjadi aristokrat kolonial. Seperti halnya Sartono Kartodirdjo, dalam bukunya *The Indonesian Revolution 1945-1950* (terbit tahun 1974), Anthony Reid menyatakan bahwa dalam setiap pergolakan atau krisis sosial-politik di Indonesia, kiai selalu menunjukkan kemampuannya untuk memberikan dukungan dan inspirasi bagi perlawanan masyarakat dan heroisme, termasuk masuk di sini adalah Resolusi Jihad yang diproklamasikan ulama-ulama Nahdaltul Ulama pada 22 Oktober 1945 dalam rangka mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.

Di luar politik, ulama juga menjadi kekuatan utama dalam proses transformasi kultural masyarakat. Pendidikan di pesantren, selain ditekankan pada penguasaan peralatan yang cukup untuk kebutuhan beribadah intensif dalam mendekatkan diri kepada Allah, juga memiliki fungsi kemasyarakatan yang lebih luas: ia dipergunakan untuk melakukan transformasi kultural secara total. Kisah para kiai yang “babat alas”, yaitu mendirikan pesantren dengan sengaja di daerah-daerah “hitam” di pinggiran kota, bahkan jauh dari daerah perkotaan, adalah bukti nyata dari kecenderungan untuk menggunakan pendidikan di pesantren sebagai alat transformasi kultural yang berlangsung secara perlahan tetapi menyeluruh dengan berbagai resiko yang tidak kecil.

Tokoh-tokoh atau elit masyarakat yang selama ini berkuasa atau sekurang-kurangnya menikmati keuntungan dari sistem yang ada, tentu akan terusik dengan kehadiran kiai atau ulama yang menawarkan perubahan mendasar dalam sistem kehidupan masyarakat. Karena itu tidak berlebihan jika pada masa-masa awal berdirinya, pesantren banyak mendapat intimidasi dan ancaman yang bersifat fisik.

Persoalannya kemudian muncul, ketika terjadi hegemoni dan dominasi satu kebudayaan atas kebudayaan lain, satu negara atas negara lain, dan pada saat yang sama, terjadi kerapuhan struktural politik bangsa, sehingga peran-peran transformatif ulama harus dirumuskan ulang. Tradisi perang melawan penjajah dalam rangka menegaskan kedaulatan dan martabat kaum Bumiputera atau tradisi “babat alas” dalam rangka mengubah sistem nilai dan budaya masyarakat memerlukan perspektif dan orientasi baru sehingga ulama tetap memiliki peran transformatif dalam dunia kekinian.

Ulama, Moralisasi Politik dan Transformasi Kultural

Keterlibatan ulama atau kiai dalam politik di berbagai level kehidupan masyarakat bangsa masa kini tetap dibutuhkan, meski harus tetap ada orientasi dan pertaruhan yang jelas dari keterlibatan itu. *Pertama*, keterlibatan ulama dalam perubahan politik dan ekonomi menjadi penting untuk mentransenden-sikan hal-hal yang bersifat praktis-pragmatis sehingga proses

perubahan menjadi punya dimensi etis dan spiritual, yang mendorong para pelaku politik atau akonomi punya tanggung jawab moral kepada masyarakat, alam dan Khaliqnya serta melaksanakannya secara sungguh-sungguh sebagai manifestasi tugas kekhalifahan yang digariskan agama.

Tanpa ada dimensi seperti itu, politik akan menjadi kehilangan makna. Politik hanya menjadi ajang aktualisasi nafsu hedonistik dan keserakahan tanpa batas yang dibungkus dalam prosedur-prosedur atau aturan main dan retorika elitis yang bombastis.

Kedua, di antara tugas keulamaan yang paling dasar sebagaimana tradisi kenabian adalah menjadikan agama sebagai dasar bagi transformasi sosial dan perekat bagi kohesi sosial yang plural dan multikultural. Islam datang untuk mengubah struktur dan kultur masyarakat Arab menuju tatanan yang lebih kondusif bagi terwujudnya keadilan dan kemakmuran, serta melindungi seluruh potensi dan komponen masyarakat yang ada, tanpa ada satu golongan atau nilai-nilai primordial yang menegasikan yang lain.

Fungsi demikian, kalau dijalankan dengan baik dan proporsional akan semakin membuktikan betapa mulia ajaran Islam, dan pada saat yang sama memposisikan ulama dalam kedudukan yang sentral di tengah kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan dalam skala yang luas.

Ketiga, sebagaimana Walisongo, dakwah ulama di tengah masyarakat adalah dakwah kebudayaan dalam arti selalu

menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran Islam dan sekaligus mengintegrasikan agama dalam berbagai ekspresi kebudayaan masyarakat.

Dakwah agama tidak bisa diletakkan dalam ruang kosong sehingga agama kehilangan konteksnya dalam kebudayaan masyarakat. Dakwah agama juga berfungsi untuk “menjinakkan” nilai-nilai yang datang dari luar sehingga ada proses saling belajar dan saling mengisi antara keduanya yang pada akhirnya akan memperkokoh kohesi masyarakat dan watak perubahan itu sendiri.

Dengan watak seperti itu diharapkan proses-proses politik dan pembangunan sosial yang tengah berlangsung bisa berjalan seiring dengan transformasi kultural masyarakat. Artinya, proses pelebagaan politik dan konsolidasi demokrasi juga disertai tumbuhnya mentalitas dan kesadaran politik warga negara dan nilai-nilai kejujuran dan keteladanan di kalangan elit. Perubahan politik tanpa transformasi kultural adalah proses involusi dan bentuk lain dari pelebagaan rutinitas dan penghambaan kepada prosedur.

Konsolidasi Pemahaman, ‘Image’ dan Massa

Halaqah Politik Walisongo tersebut merupakan bagian dari upaya awal konsolidasi di tiga sektor sekaligus yang menjadi program PKB sampai 2009. Tahun 2006, PKB akan terus melakukan konsolidasi pemahaman untuk menguatkan dan mengokohkan pemahaman konstituen dan basis-basis PKB

tentang gerakan politik dan kaitannya dengan berbagai sektor kehidupan lain. Dengan konsolidasi ini diharapkan tidak muncul lagi pelbagai kesalahpahaman terhadap apa yang menjadi model gerakan dan perjuangan PKB ke depan. Kalau PKB melakukan pendekatan dengan kelompok luar, atau menjalankan pendekatan baru, diharapkan tidak ada lagi yang curiga dan salah memahami gerakan tersebut. Konsolidasi pemahaman dilakukan dalam berbagai bentuk, melalui pertemuan-pertemuan rutin, dialog sampai penerbitan buku atau pamflet yang memungkinkan sosialisasi gerakan PKB bisa lebih efektif.

Setelah konsolidasi pemahaman dirasa cukup, pada tahun 2007, PKB akan melakukan konsolidasi *image* (citra) untuk merebut simpati dan dukungan dari warga di luar pendukung asli PKB yang mayoritas warga NU. PKB akan membangun citra baru sebagai partai terbuka, nasional dan pengayom semua golongan, sehingga warga di luar NU, bahkan di luar Islam, bisa lebih mengenal dan dekat dengan PKB. Dan pada akhirnya, mereka akan mencintai PKB dan menjadikannya sebagai pilihan politik secara sadar.

Pada tahun 2008, PKB akan melakukan konsolidasi massa dengan menggabungkan massa asli dengan basis baru untuk menghadapi 2009, sehingga suara PKB lebih solid dan meningkat secara signifikan.

Konsolidasi itu akan membawa hasil dan perubahan yang positif jika dilakukan dengan kerja keras dengan dukungan

ulama dan berbagai komponen masyarakat dan didukung oleh kepedulian kader-kader PKB yang loyal kepada nilai-nilai dan garis komando partai.

Politik Kebudayaan PKB dan Gerakan Islam

Hakikat politik PKB di Indonesia adalah dalam rangka memuliakan ajaran Islam dan kaum muslimin (*izzul islam wal muslimin*) sebagai agama dan umat yang memiliki kepedulian kepada kepentingan sesama dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kemuliaan itu bisa diwujudkan jika Islam bisa menjadi kekuatan yang melindungi, merengkuh dan menggerakkan berbagai komponen bangsa dari berbagai agama, suku dan tradisi.

Belajar dari politik dakwah Walisongo, PKB sangat menentang cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama, karena hal itu akan kontraproduktif terhadap dakwah Islam dan juga menodai kemuliaan ajaran Islam.

Para wali mengajarkan bagaimana dakwah yang santun terhadap realitas, sekaligus dakwah yang bersifat transformatif yang menggerakkan seluruh potensi dan sumberdaya masyarakat menuju perubahan mendasar dalam pandangan hidup dan tata sosialnya. Dakwah model Walisongo adalah pendekatan keagamaan yang sangat khas berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang diperkaya dengan sentuhan seni dan budaya sehingga perubahan yang dihasilkan juga menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Apa yang dilakukan Gus Dur dengan gagasan pribumisasi Islam dan Islam sebagai etika sosial sepenuhnya mewarisi tradisi politik dakwah Walisongo dan ulama-ulama besar terdahulu. Dengan model seperti itu juga, Gus Dur sukses menambah warga dan simpatisan PKB dari kalangan di luar Islam dan NU. Kalau selama ini pertambahan jumlah warga dan simpatisan NU hanya berdasarkan keturunan, maka Gus Dur berhasil menambahnya dengan kebesaran pemikiran dan keluwesan sikap politiknya.

Dengan pemahaman yang benar dan utuh terhadap gerakan Islam dalam konteks historis dan realitas pluralistik masyarakat Indonesia, maka PKB akan terus melakukan konsolidasi pikiran dan gerakan sehingga model gerakan politik PKB menjadi bagian yang menyatu dengan gerakan Islam Indonesia yang selaras dengan apa yang telah dibangun oleh para wali dan ulama terdahulu.

Pemahaman yang demikian juga memungkinkan kita tidak terjebak dalam legal-formalisme yang selalu melihat dan menilai persoalan dari kacamata normatif, tanpa mengedepankan unsur kepentingan kemanusiaan (*maslahah*) dan kemuliaan martabatnya yang menjadi tujuan dari syariat Islam sendiri. Para wali dan ulama mengajarkan bagaimana berdakwah dengan orientasi kepada kemaslahatan.

Ke depan PKB akan mengembangkan model-model gerakan yang menjangkau dan melibatkan berbagai komponen masyarakat atau kelompok di luar Islam, karena hanya dengan

model seperti itulah partai ini bisa tumbuh dewasa dan menjadi besar, sekaligus menguatkan bangunan masyarakat Indonesia yang sangat mejemuk. Dengan memahami secara utuh politik walisongo dan tradisi ulama Nahdaltul Ulama, maka apa yang dikembangkan PKB itu sebenarnya merupakan upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi Islam Indionesia yang luhur. Jadi kalau ada pihak yang tidak menerima atau salah memahami strategi tersebut, itu berarti mereka secara nyata tidak memahami tradisi walisongo dan ulama NU.

Itulah politik kebudayaan yang sedang diperjuangkan PKB untuk Indonesia masa depan yang lebih baik. Suatu perjuangan yang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit jika ada niat yang tulus disertai kerja keras semua pihak yang peduli. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R O'G, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*, Cornell University Press, 1972.
- Arrighi, Giovanni & Beverly J. Silver, *Chaos and Governance in the Modern World System*, Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1999.
- Asy'ari, KH Hasyim, *ad-Durar al-Muntathirah fil-Masail al-Tis'a Asharah*, ttp., tp., 1359H/1940M.
- Brander, B.G., *The Staring Into Chaos: Explorations In The Decline Of Western Civilization*, Dallas: Spencer Publishing, 1998.
- Coker, Christopher, "Globalization and Terrorism", makalah pada seminar "The Prospects for the Canadian Summit", Kedutaan Besar Kanada di Tokyo, the Japanese-British Society, the LSE International Social Economic Forum dan G8 Research Group, Tokyo, 10 Juni 2002.
- Dierckxsens, Wim, "The End of Neoliberalism, Unsustainable Capitalism and the Need for a New Utopia", Jurnal

Concilium, No. 5, Tahun 2004.

Gildea, Robert, "French Student Revolt", dalam Jack A Goldstone (ed.), *The Encyclopedia of Political Revolution*, Chicago & London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1998.

Gurr, TR., *Why Men Rebel*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970.

Harris, David, *From Class Struggle to the Politics of Pleasure: The Effects of Gramscianism on Cultural Studies*, London: Routledge, 1992.

Iskandar, A Muhamin, *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita*, LKiS, 2004.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *at-Turuq al-Hukmiyyah*, Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah, 1961.

Kartodirdjo, Sartono, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Singapore: Oxford University Press, 1973.

Khor, Martin, *Rethinking Globalization: Critical Issues and Policy Choice*, London, Zed Books, 2001.

Kothari, Rajni, *State Against Democracy: In Search of Humane Governance*, Delhi: Ajanta, 1989.

Lawson, Key (ed.), *Political Parties and Linkage: A Comparative Perspective*, New Heaven, London: Yale University Press, 1980.

- Liddle, R William , “Modernizing Indonesian Politics”, dalam *Political Participation in Modern Indonesia*, Yale University Southeast Asian Studies, 1973.
- Lipset, Saymour M , *Political Man: The Social Bases of Politics*, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1981.
- Mihardja, Achdiat K, *Polemik Kebudajaan*, Cet. II, Djakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1950.
- Reid, Anthony, *The Indonesian Revolution 1945-1950*, Victoria, Australia: Longman, 1974.
- Root, Hilton L, “Do Strong Governments Produce Strong Economies?”, *The Independent Review*, Vol. V, No. 4, Spring 2001.
- Rupert, Mark, *Ideologies of Globalization: Contending Vision of a New World Order*, London & New York: Routledge, 2000.
- Samson, Allan A., “Conceptions of Politics, Power and Ideology in Coontemporary Indonesian Islam”, dalam Karl D Jackson & Lucian W Pye (eds.), *Political Power and Coummunications in Indonesia*, Berkeley-Los Angeles, London: University of California Press, 1978.
- Shimogaki, Kazuo, *Kiri Islam antara Modernisme dan Posmodernisme: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*,

Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1995.

Wahid, Abdurrahman, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman: Kumpulan Pemikiran KH Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia*, Jakarta: Kompas, 1999.

_____, dan Zamakhsyari Dhofier “Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus dari Jombang”, *Prisma*, April 1978.

INDEX

A

- Abdullah Ahmad Badawi 5, 92
Abdurrahman Wahid
 6, 16, 22, 27, 42,
 44, 71, 87, 95, 107,
 124, 138
Achdiat K. Mihardja 102
ad-dlaruriyyat al-khamsah 36
advanced democracies 33
Advokasi 10, 11, 24, 25,
 28, 29, 30, 31, 35,
 36, 37, 39, 40, 159
Afrika Utara 19
Afrikanisasi 81
Ahlus Sunnah wal Jamaah
 23, 72, 106
akumulasi kapital 4
akumulasi Modal 119, 120
akumulasi pengetahuan 120,
 123
Allan A Samson 109, 115
Amangkurat IV 125
Amerika Serikat 7, 18
anak jalanan 14
anarki 110
anomali 109
Anthony Reid 126
anti-politik 9
apolitik 9, 85, 115, 125
aristokrat kolonial 126
arsitektur dunia 7
as-siyasah ad-dunya 113
Asia Selatan 19
Asia-Afrika 6
aspirasi 34, 39, 42, 44, 47,
 51, 54, 79, 89, 90, 93,
 115
aspiratif 29, 41, 49, 104
avonturisme 40
Ayatullah Khomaini 91

B

- B.G Brander 91
babat alas 126, 127
Bakorstanas 98
balaghah 99
Balkanisasi 81
Barat 19, 20, 96, 101, 122
BBM 41, 78
Belanda 125, 126
Benedict R.O'G Anderson 84
Beverly J. Silver 7
Blok Cepu 78
bughat 110
Bumiputera 39, 127
buruh 11, 14, 67, 85
buta huruf politik 9

C

chaos 6, 7, 72

Christopher Coker 15

Cina 5, 73, 79, 91, 98, 109

counter policy 65

D

dakwah 128, 129, 131, 132

Daniel Bell 20

David Harris 85

degradasi 40, 55, 110, 115

dehumanisasi 112, 116

deideologisasi 23, 43

deklarator partai 43

demokrasi 5, 13, 14, 17, 18,
27, 31, 33, 34, 41, 54,
55, 61, 66, 71, 72, 73,
80, 95, 96, 97, 98, 129,
136, 159

demokratisasi 13, 16, 17,
39, 42, 96, 97

deprivasi relatif 14

desentralisasi 59, 60

dikotomi sipil-militer 16

diktator yang murah hati 5

dimensi etis 128

dinamisme 98

disiplin partai
5, 45, 55, 60, 61

disorientasi 13, 21

dlaruriyyat 16, 78

dominasi 102, 120, 124, 127

DPP PKB 2, 16, 27, 30,
31, 44, 73, 74, 87,
105, 119, 123, 159,
161

DPR 40, 56, 66, 89

Dunia Ketiga 17, 19

duniawi 35, 125

Dwight Y King 16

E

Edward Shils 20

egoisme golongan 42

ekologisme 83

ekonomi pasar 7, 18

eksekutif 53, 74, 104, 116,
160

ekspansi kapital 4

ekspansi transnasional 4

elit 8, 11, 51, 76, 88, 127,
129

elitisme 74

ELS (*Europeesche Lagere
Scholen*) 101

eskalasi konflik 6

etika 97

etos 45, 86, 87, 88, 111

Exxon Mobil 78

F

federasi 110

feminisme 83

FKB 40, 76, 89, 162

FOKSAM 74, 81, 160

fundamentalisme
7, 96, 99, 109

G

Gaetano Mosca 76

Garda Bangsa 85, 88, 89

genealogis 89

geopolitik 27, 73, 81

gerakan anti-nuklir 83

gerakan pemuda 83
 Giovanni Arrighi 7
global monoculture 16
 globalisasi 4, 5, 6, 13, 15,
 109, 119, 121, 122,
 123, 160
 Gontor 103
good neighborhood 81
 Gus Dur 22, 27, 31, 43,
 87, 89, 95, 96, 97,
 98, 103, 104, 105,
 106, 107, 108, 132,
 136, 138, 160

H

hajiyat 16
 Hamengku Buwono I 125
 harga produk pertanian 41
 Hassan Hanafi 23, 107
 KH Hasyim Asy'ari
 25, 120, 135
 hedonisme 20, 80
 hedonistik 20, 128
 hegemoni 7, 80, 102,
 124, 127
 heroisme 126
 Hilton L Root 11
 HIS (*Hollandsche Inlandsche
 Scholen*) 101
 historis 4, 29, 41, 46,
 73, 104, 111, 121,
 132
 homogenisasi 122
Human Development Report
 14
 humanisasi 111, 112, 116

I

Ibn Qayyim al-Jauziyyah 113
 idealisme 83, 84, 86
 idealistik 85, 86
 identitas nasional 5
 ideologi 8, 9, 10, 12, 13
 20, 21, 22, 23, 25,
 28, 31, 40, 43, 44,
 46, 52, 57, 68, 79,
 80, 90, 92, 97
 ideologi alternatif 97
 ideologisasi
 8, 9, 21, 22, 23, 43
 Idham Chalid 103
 Ikhwanul Muslimin 22
 ilmu pengetahuan dan teknologi
 4, 20
 industri kebudayaan 85
 inklusivisme 96
 intelektual 93, 103
 Internasionalisasi peran ulama
 105, 95, 103
 intervensi 15, 19, 20, 55
 interventionistik 3
 Iran 73, 91, 95
Islam for Peace 73, 160
 Islam tradisional 98
 Islamisasi 124
 Israel 105, 106
 Italia 92
izzul islam wal muslimin 131

J

Jack A Goldstone 83, 136
 Jalur Gaza 105
 Jawa-sentris 10
 Jepang 5, 109

K

- kader khusus 46
- kader militan 47
- kader penggerak 47
- kader profesional 47
- kader simpatisan 46
- kaderisasi 10, 22, 23, 24,
44, 45, 46, 47, 57,
58, 61, 62, 73, 88
- kafir 125
- Kapitalisme 79
- Karl D Jackson 109, 115, 137
- kaum miskin 67
- Kazuo Shimogaki 23
- keadilan sosial 37, 42
- kebangkitan nasional 2
- kedaulatan 15, 20, 42,
76, 82, 127
- kekhalifahan 112, 128
- kemakmuran masyarakat 17
- kemaslahatan
28, 32, 40, 64,
100, 113, 115, 116, 132
- kemiskinan 5, 14
- Kepemimpinan
71, 82, 91, 92, 93, 159
- kepemimpinan
5, 6, 10, 12, 20, 22,
32, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 64, 71,
74, 82, 86, 87, 88,
90, 91, 92, 93, 94,
103, 107, 116, 159
- kepemimpinan intelektual 93
- kepemimpinan ulama
92, 93, 94
- kepentingan nasional
4, 5, 6, 9, 13,
27, 38, 40, 79, 80,
81, 82, 90, 159
- kesejahteraan rakyat 17
- keteladanan 52, 129
- keunggulan komparatif 53, 58
- Key Lawson 11
- KFC 122
- khadim ar-ra'yyah* 28
- kharisma 90, 91, 92
- kharismatik 92, 93, 116
- kiai 1, 32, 64, 96, 97, 98,
102, 103, 104, 105,
106, 114, 115, 116,
119, 126, 127, 160
- kiai muda 104
- Kiri Islam 23, 137
- knowledge* 79
- Koalisi Kebangsaan 40
- Koalisi Kerakyatan 41
- kohesi sosial 128
- kolektif 22, 23, 24, 25,
28, 46, 66, 69, 72,
82, 86, 87, 90, 101,
121
- kolektivitas 25, 32, 64, 65,
72, 74, 90
- kolonialisme 125
- Komisi Pemberantasan Korupsi
21
- Komisi Yudisial 21
- Komite Hijaz 105
- komodifikasi 15
- komoditas 65, 112, 123
- kompetensi 58, 61
- komplementer 97, 107
- komunikasi massa 77

konfidensi positivistik 20
 Konsolidasi 129, 130
 konsolidasi 22, 28, 41, 68,
 129, 130, 132
 konsolidasi demokrasi 41, 129
 konspirasi 7, 8
 konstituen 3, 11, 28, 29,
 32, 35, 40, 47, 55,
 56, 64, 65, 66, 90,
 129
 Konstituensi 58
 konsumerisme 9, 120
 konsumeristik 85, 123
 kontra-pemerintah 33
 kontraproduktif 25, 82, 131
 kosmopolitan 19, 109
 kosmopolitanisme 107, 114,
 160
 krisis struktural 21
 kultural 10, 29, 41, 43,
 73, 104, 119

L

leadership 45, 93
legal opinion 29
 legislatif 50, 53, 56, 63, 65,
 66, 67, 89, 104
 liberal 4, 122, 123
 liberalisasi 5, 18, 39
life style 122
 Litsus 98
 London School of Economics 15
lower discourses 93
 loyal 3, 44, 47, 90, 131
 loyalitas 12, 25, 72
 LSM 27
 Lucian W Pye 109, 115, 137

M

MacDonald 122
 Mahathir Mohammad 5, 92
 Mahkamah Konstitusi 21
 Malaysia 5, 73, 91, 92, 109
 manajemen politik 51
maqasid asy-syari'ah 36
 Mark Rupert 4
market 7, 112
 Martin van Bruinessen 125
maslahah 3, 12, 32, 36,
 64, 68, 100, 113, 132
 massa 11, 58, 130
 massa mengambang 9
 masyarakat adat 14
 mayoritas 11, 40, 130
 mazhab 99, 100
mazhabiy 100
 Mbok Berek 122
 media massa 53, 54, 67, 68,
 76, 77, 78
 mediakrasi 71, 75, 159
 mediasi 11, 31, 32, 34,
 37, 38, 39, 64, 74
 Melayu 6, 92
 menjinakkan globalisasi 6
 mentalitas kewarganegaraan 39
 meritokratis 89
 militer 16, 27, 40, 61
 minoritas 11, 40, 91, 98
 mobilisasi 47, 121
 modal asing 15
 modal kultural 43
 modernisasi 109, 112
 modernitas 40
 moralitas 111, 124
 MPR 41

Muhaimin Iskandar 98, 159
Muktamar 3, 10, 24,
28, 30, 73, 87
Muktamar Luar Biasa 28
Muktamar Semarang 73
multikultural 97, 128

N

Nahdaltul Ulama 89, 96,
104, 108, 120, 126, 133
Nahdliyyin 104
nahwu 99
nasionalisme 6, 84, 88
national state 97
national view 96
negara Islam 6, 19, 40
negara kepulauan 81
negara nasional
37, 38, 40, 43, 97
nelayan 14, 67
neo-liberalisme 79
new sociology of education 85
NKRI 81, 110
Nobel Asia 96
non-kooperatif 125
non-monolitik 108
non-muslim 89, 107
non-oposisional 33
NU 35, 40, 41, 58,
89, 96, 103, 104, 105,
106, 108, 110, 115, 130,
132, 133
Nusantara 73, 109, 124
Nyonya Suharti 122

O

olah kanuragan 103

oposisi 11, 24, 28,
32, 33, 34, 64
oposisional 33
otoritarianisme media 77

P

Palestina 105, 106
Pancasila 110
partai advokasi 10, 11, 24,
27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 40, 41, 46,
64, 65, 159
partai anak muda 90
partai oposisi 11, 24, 28,
32, 33, 34, 64
partai pemerintah 11, 24,
32, 33, 34, 64
partisipasi 31, 34, 38
PBNU 103, 104
pelembagaan politik 129
Pemilu 2004 40
pemimpin dunia Islam
6, 17, 18, 38
pendidikan nasional 2
pendidikan politik
9, 61, 63, 86
pengadilan media 54
pengangguran 14
penjajah 125, 126, 127
penjajahan 125
peradaban Islam 19, 107,
108, 109, 160
Perang Dingin 7
perang sipil 6
Pertamina 78

pesantren 1, 2, 19, 35, 42,
97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 114, 115,
116, 117, 123, 126,
127
peta realitas 8
petani 14
PKB 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 16, 18, 19, 21,
24, 25, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 47, 49,
50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 61,
62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 79,
80, 81, 83, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 92,
93, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110,
113, 114, 115, 119,
120, 129, 130, 131,
132, 133
Playboy 75
plural 84, 128
pluralisme 95, 96
pluralistik 41, 42, 132
pluralitas 42, 44, 84, 110
polarisasi biner 24, 28
political animals 86
political appeal 51
political will 88
Politik anggaran 65, 66, 67
politik anggaran 67
politisasi 19, 116, 121
Pornoaksi dan Pornografi 78

power sharing 45
pragmatisme
20, 40, 43, 80, 86
Prancis 18, 83
pribumi 126
pribumisasi Islam 132
primordial 17, 50, 128
privileged elites 93
pro-pemerintah 33
progresif 19, 23, 104
proklamasi 84, 126
proteksi 18
protektif 18
psiko-historis 73
public decency 52
public policy 24, 28
purifikasi 109, 123

Q

qawaid fiqhhiyyah 36

R

radikalisasi 13, 15, 19, 109
radikalisme 95, 99, 109
Rajni Kothari 93
Ramon Magsaysay 96
rasionalitas 98, 106
Raymond Aron 20
rekomendasi 105
rekrutmen 45, 57, 59
Resolusi Jihad 126
restrukturisasi 8, 9, 21, 81
revolusi 83, 84, 95
Revolusi Islam 95
Revolusi pemuda 83
revolusioner 83, 84
rezim 53, 71

riset 50, 65
Robert Gildea 83
ruang batin 15, 73, 92, 122
Rusia 73

S

salafiyah 102
santri 2, 91, 99, 101, 102
saraf 99
Sartono Kartodirdjo 125, 126
satu negara dua sistem 80
sektor informal 14
sentimen etnis 6
sentralisme demokratis 71, 73, 159
separatis 110
Seymour Martin Lipset 20
sirkulasi sumberdaya 22
sistem dunia 12, 44, 80, 86
as-siyasah as-syar'iyah 113, 114
smoke screen 76
social distrust 52
social ethics 97, 108
social welfare 102
sosialisme 79
spiritualitas 25, 35, 106, 122
state 11, 112
state of mind 35
statecraft mechanism 33
status quo 23
strategic elites 77
subsidi 18, 41
Sukarno 88, 95
Sultan Agung Tirtayasa 125
Sultan Mataram 125
Sumpah Pemuda 84
suplementer 97

Susuhunan Prabu Jaka 125
Sutomo 101
Syaiikh Abdussamad 125
Syaiikh Yusuf Makassar 125
syariat 36, 72, 100, 113, 114, 122, 124, 132
systemic chaos 72

T

tahsiniiyyat 16
Tan Malaka 88
tarekat 125
tarif dasar listrik 41
tasawuf 99, 122
tauhid 23, 99
taushiyah 105
tawasut 40
Tebuireng 2
teknologi informasi 4, 15
teologi 2, 23, 112
terorisme 7, 15, 100, 109
terugval basis 114
The Economist 95
the end of ideology 20
the founding fathers 43, 82
The Independent Review 11, 137
The Ruling Class 76
Tim Asistensi Pendirian PKB 104
Time 96
Timur Tengah 19, 22, 105, 106, 123
Tionghoa 98
TR. Gurr 14
tradisi 5, 10, 15, 19, 22, 40, 69, 73, 74, 76, 85, 86, 90, 91,

93, 97, 98, 99, 100,
101, 107, 108, 109,
110, 120, 121, 122,
123, 124, 127, 128,
131, 132, 133
trans-historis 111
transendensi 111, 127
transformasi kultural 126, 129
transformasi nasional 42
transformasi sosial 128
transformative aspects 124
trend-setter 68

U

ulama 1, 2, 29, 32, 35,
41, 42, 43, 44, 47,
64, 68, 71, 72, 73,
76, 89, 92, 93, 94,
105, 115, 119, 120,
121, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 131,
132, 133
ulama pelopor 121
Universitas Kairo 107
upper discourses 93
usul al-fiqh 16, 78
UUD 1945 13, 82

V

visioner
6, 42, 44, 74, 82, 116

W

KH Wahab Chasbullah 115
Wahid Hasyim 88
Walisongo
73, 105, 119, 121,

123, 124, 125, 128,
129, 131, 132
wasilah 11, 72
welfare state 79
William Liddle 8
wisdom 18, 79

Y

KH Yusuf Hasyim 2

Z

Zamakhshary Dhofier 124, 138

SUMBER TULISAN

Versi asli sembilan tulisan dalam buku ini merupakan sambutan A Muhaimin Iskandar dalam berbagai acara dan Kata Pengantar untuk beberapa buku yang dikembangkan lebih lanjut dengan pengayaan perspektif dan referensi:

1. *PKB di Tengah Kompleksitas Persoalan Bangsa dan Krisis Sistem Dunia*, sambutan pada Pengukuhan Pengurus DPP PKB 2005-2010 di Jakarta, 2 Mei 2005.
2. *Ideologi, Demokrasi dan Kepentingan Nasional*, Kata Pengantar buku *Partai Advokasi: Wacana, Gerakan dan Keberpihakan* (2005), Cetakan II.
3. *Partai Advokasi dan Pengembangan PKB*, Kata Pengantar buku *Partai Advokasi: Wacana, Gerakan dan Keberpihakan* (2004), Cetakan I.
4. *Fundamental Politik Partai Kerja Modern: PKB Lima Tahun ke Depan*, pokok-pokok pikiran pada Mukatamar II PKB di Semarang, 16-18 April 2006.
5. *Sentralisme Demokratis, “Mediokrasi” dan Kepemimpinan Politik Visioner*, pokok-pokok pikiran yang disampaikan

pada pertemuan Forum Kerjasama Program (FOKSAM) anggota DPRD dan pejabat eksekutif PKB se-Jateng, di Semarang, 6 Maret 2006.

6. *PKB dan Politik Pemuda*, Kata Pengantar buku *PKB Itu Indah, dari Hobi Menjadi Amanah: Pemikiran dan Perjalanan Politik Rosehan NB* (2006).
7. *Gus Dur, Kiai dan Negara Bangsa*, Pengantar Buku *Gus Dur Pecinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Etnis-Keagamaan* (2005).
8. *PKB dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, Pengantar buku *PKB dan Islam for Peace* (2006).
9. *Politik Berbasis Tradisi: Strategi PKB Menjemput Gelombang Pasang Globalisasi*, sambutan pada acara *Halaqah Politik Walisongo: Membingkai Gerakan Islam Nusantara, Merumuskan Visi Kebangkitan Bangsa*, Surabaya, 3 Desember 2005.

TENTANG PENULIS

A Muhaminin Iskandar, adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) periode 2005-2010 dan Wakil Ketua DPR 2004-2009, jabatan yang sebelumnya sudah dipercayakan kepadanya sejak tahun 1999. Lahir di Jombang Jawa Timur pada 24 September 1966. Menyelesaikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Jogjakarta tahun 1991 dan pascasarjana (S2) jurusan Komunikasi Publik Universitas Indonesia. Sejak mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi, mulai dari Ketua Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fisipol UGM sampai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jogjakarta (1989) dan tahun 1994 terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PMII. Selain aktif dalam berbagai kelompok studi di Jakarta sejak tahun 1991, ia juga bekerja sebagai peneliti pada Lembaga Pendapat Umum (LPU), menjadi Kepala Litbang Tabloid *Detik*, dan bekerja pada Hellen Kellner Internasional. Pada usia yang relatif muda, ia ikut membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa dengan menjadi anggota Tim Sembilan dan dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB yang pertama. Pada Pemilu 1999 terpilih sebagai anggota DPR dan menjadi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang pertama, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI hasil Pemilu 1999.

Buku karyanya yang sudah diterbitkan antara lain *Masyarakat Indonesia Abad XXI* (1996), *Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran* (1997) dan *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa* (2000).